

AGREGAT

JURNAL EKONOMI & BISNIS

- Gaya Kepemimpinan Wanita Pada Usaha Kecil Menengah di Tangerang Selatan** Hal 1-19
Sumarta, Budi Permana Yusuf
- Kelayakan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Pada Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata** Hal 20-31
Abel Gandhy
- Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Emiten BEI** Hal 32-43
Saifudin Saifudin, Septiani Putri
- Return on Assets*, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal** Hal 44-54
Marwan Effendi, Nugraha Nugraha
- Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Propinsi Aceh** Hal 55-66
Sri Mulyati, Yusriadi Yusriadi
- Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba dan *Leverage* Terhadap Kinerja Perusahaan** Hal 67-78
Maryati Rahayu, Bida Sari
- Peran Audit Internal Dalam *Good Corporate Governance* Bank Syariah Di Indonesia** Hal 79-99
Rito Rito, Fathimah Azzahra
- Proyeksi Potensi Fiskal DKI Jakarta 2018-2022** Hal 100-139
Yurianto Yurianto

AGREGAT

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Jurnal berkala Ilmiah ini fokus dalam kajian ekonomi dan bisnis terbit dua kali dalam satu tahun (Maret dan September)

Editor In Chief

[Edi Setiawan](#) (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Managing Editor

[Emaridial Ulza](#) (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Associate Editors

[Faizal Ridwan Zamzany](#) (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

[Dewi Pudji Rahayu](#) (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

[Novita Kusuma Maharani](#) (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

[Hera Khairunnisa](#) (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

[Meita Larasati](#) (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Editorial Advisory Board

[Sofia.L. Eremina](#) (National Research Tomsk Polytechnic University, Rusia)

[Selevich T.S.](#) (National Research Tomsk Polytechnic University, Rusia)

[Eko Suyono](#) (Universitas Jendral Soedirman Purwokerto)

[Erna Setiany](#) (Universitas Mercu Buana)

[Zuhairan Y. Yunan](#) (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

[M Nurianto Al Arif](#) (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

[Hikmah Endraswati](#) (IAIN Salatiga)

[Muchdie](#) (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

[Sunarta](#) (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Assistant to Editor

Prayoga Agasi

Elmy Nur Azizah

Alamat Redaksi

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Jl. Raya Bogor KM 23. No. 99. Flyover. Pasar Rebo. Jakarta Timur 13830

Telp: 021-87796977, Fax: 021-87796977

Email: agregat@uhamka.ac.id

<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat/index>

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| GAYA KEPEMIMPINAN WANITA PADA USAHA KECIL MENENGAH DI TANGERANG SELATAN <i>Sunarta Sunarta, Budi Permana Yusuf</i> | Hal 1-19 |
| KELAYAKAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA IKAN PADA KERAMBA JARING APUNG DI WADUK CIRATA <i>Abel Gandhy</i> | Hal 20-31 |
| DETERMINASI PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN <i>TUNNELING INCENTIVE</i> TERHADAP KEPUTUSAN <i>TRANSFER PRICING</i> PADA EMITEN BEI <i>Saifudin Saifudin, Septiani Putri</i> | Hal 32-43 |
| <i>RETURN ON ASSETS</i>, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL <i>Marwan Effendi, Nugraha Nugraha</i> | Hal 44-54 |
| DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROPINSI ACEH <i>Sri Mulyati, Yusriadi Yusriadi</i> | Hal 55-66 |
| KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, MANAJEMEN LABA DAN <i>LEVERAGE</i> TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN <i>Maryati Rahayu, Bida Sari</i> | Hal 67-78 |
| PERAN AUDIT INTERNAL DALAM <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> BANK SYARIAH DI INDONESIA <i>Rito Rito, Fathimah Azzahra</i> | Hal 79-99 |
| PROYEKSI POTENSI FISKAL DKI JAKARTA 2018-2022 <i>Yurianto Yurianto</i> | Hal 100-139 |

GAYA KEPEMIMPINAN WANITA PADA USAHA KECIL MENENGAH DI TANGERANG SELATAN

Sunarta, Budi Permana Yusuf
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
sunarta@uhamka.ac.id, budipermanayusuf@uhamka.ac.id

Diterima: 5 Februari 2018; Direvisi: 8 Februari 2018; Disetujui: 12 Februari 2018

Abstract

This study aims to determine the management of women's leadership style to employee performance on home business. Building relationships with employees need experience in leading, Sources of development of the character of an entrepreneur also found in the family's internal education since childhood. The self-concept of an entrepreneur is a social product formed through the process of internalization and organization and psychological experiences. This psychological experience is the result of individual exploration of the environment and the reflection of himself received from others. Meet the needs of employees is a bond between leaders with subordinates to do, success is strongly influenced by internal and external environment, in the environment someone will be affected on psychological factors that are very supportive and influence the mindset of an entrepreneur, and have a desire to achieve a great job is also ready hard, diligent, have great confidence and perseverance in the fight. Leading patiently, with a sincere heart and always turning on two-way communication, has a successful self-concept and clear goal direction.

Keywords: Management, female, leadership style

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen gaya kepemimpinan wanita terhadap kinerja karyawan pada usaha rumahan. Membangun hubungan dengan karyawan perlu adanya pengalaman dalam memimpin, Sumber pembangunan karakter seorang pengusaha juga terdapat pada pendidikan internal keluarga sejak kecil. Konsep diri seorang pengusaha merupakan produk sosial yang dibentuk melalui proses internalisasi dan organisasi serta pengalaman-pengalaman psikologis. Pengalaman psikologis ini merupakan hasil eksplorasi individu terhadap lingkungan dan refleksi dari dirinya yang diterima dari orang lain. Memenuhi kebutuhan karyawan merupakan ikatan antara pemimpin dengan bawahan yang harus dilakukan, sukses sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan external, dalam lingkungannya seseorang akan terpengaruh pada factor psikologis yang sangat mendukung dan mempengaruhi pola pikir seorang pengusaha, serta memiliki hasrat untuk berprestasi yang besar juga siap bekerja keras, tekun, mempunyai keyakinan besar dan keuletan dalam berjuang. Memimpin dengan sabar, dengan hati yang ikhlas dan selalu menghidupkan komunikasi dua arah, *sukses* mempunyai konsep diri dan arah tujuan yang jelas.

Kata Kunci: Manajemen, gaya kepemimpinan, wanita

PENDAHULUAN

Pimpinan dalam suatu perusahaan sangat berperan menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Berbagai upaya dilakukan seorang pimpinan untuk mempengaruhi karyawan agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan konsep yang telah ditentukan, diantaranya dengan memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan motivasi, dan dengan memberikan tekanan terhadap karyawan. Kepemimpinan menggambarkan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dan bagaimana seorang pemimpin mengarahkan yang dipimpin. Pemimpin dapat mempengaruhi perilaku para bawahan melalui pendekatan dalam mengelola manusia. Untuk itu organisasi memerlukan pemimpin yang mampu menjadi motor penggerak perubahan organisasi dan pemimpin yang mampu menetapkan sasaran-sasaran khusus, memonitor perkembangan, dan mengidentifikasi penghargaan yang diterima karyawan apabila sasaran dapat tercapai.

Gaya kepemimpinan merupakan usaha atau cara seorang pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan unsur-unsur falsafah,

keterampilan, sifat, dan sikap karyawan. Sehingga gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah gaya kepemimpinan yang dapat mendorong atau memotivasi bawahannya, menumbuhkan sikap positif bawahan pada pekerjaan dan organisasi, dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi. Gagasan awal mengenai gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional dikembangkan oleh James MacFregor Burns yang menerapkannya dalam konteks politik. Selanjutnya disempurnakan serta diperkenalkan ke dalam konteks organisasi oleh Bernard Bass. Burn membedakan antara kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Salah satu permasalahan dasar dalam perusahaan adalah bagaimana meningkatkan kinerja. Kinerja adalah tingkat keberhasilan seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan (Prawirosentono, 1999). Seorang pemimpin yang baik adalah yang mampu memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada dalam perusahaan, sehingga kepemimpinan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kinerja karyawan.

Athaya Shoes merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang usaha produksi sepatu yang tergolong industri

rumahan dalam hal ini sangat diperlukan gaya kepemimpinan yang tepat sangat dibutuhkan dalam aktivitas perusahaan. Menurut keterangan seorang karyawan bagian produksi, menyatakan bahwa pimpinan pada perusahaan secara sadar atau tidak telah melakukan upaya yang digolongkan dalam kepemimpinan transformasional dan transaksional seperti: pemimpin menjadi contoh yang baik bagi karyawan (transformasional), pemimpin memberi bonus jika target pekerjaan berhasil dicapai bawahan (transaksional), pemimpin mau mendengarkan dan memberi masukan-masukan kepada bawahan (transformasional), pemimpin memberi pujian jika target berhasil dicapai (transaksional).

Kepemimpinan merupakan halter penting dalam sebuah organisasi. Karena kualitas suatu organisasi dapat dilihat dari kerjasama antara anggota organisasi dan pemimpinnya. Lazimnya, sebuah organisasi dipimpin oleh seorang pria. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman, wanita pun mampu memimpin sebuah organisasi. Telah banyak sosok wanita-wanita hebat yang menjadi pemimpin, baik itu sebagai presiden,

direktur perusahaan, pemimpin organisasi atau komunitas dan sebagai pemimpin lainnya. Pria dan wanita memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Pria lebih menggunakan norma keadilan sementara wanita menggunakan norma persamaan. Pria juga menggunakan strategi yang lebih luas dan lebih positif, perbedaan manajemen tidak akan terlihat jika wanita memiliki rasa percayadiri yang tinggi. Di Indonesia, R. A. Kartini merupakan tokoh penting bagi perempuan Indonesia. Beliau adalah tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan seperti hak untuk belajar di sekolah dan hak untuk memimpin sebuah organisasi.

Seorang wanita memiliki sifat demokratis dan rasa kepedulian yang tinggi (Eagly dan Johnson, 1996). Hal ini membuat wanita berkompeten untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi sekalipun organisasi yang bergerak di bidang yang selayaknya dipegang oleh seorang pria. Namun apakah kepemimpinan wanita dalam organisasi di bidang industri sepatu yang lazimnya digeluti oleh pria ini akan lebih efektif dan memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan kepemimpinan pria? Dalam penelitian ini akan dibahas

mengenai seberapa efektifkah kepemimpinan wanita dalam organisasi yang bergerak di bidang industri sepatu yang tergolong usaha kecil.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Ancangan dasar kajian ini adalah fenomena hermeneutik, yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, tradisi fenomenologi hermeneutik cenderung mengedepankan eksistensi manusia sebagai sesuatu yang harus ditafsirkan, karena kajian bertujuan memahami subyek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif hermeneutika Gadamerian.

Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah Yossy Iratriana (Yossy) yang lahir di Jakarta dan berdomisili di Cipayung Ciputat, subyek penelitian ini dipilih karena sukses dalam berwirausaha dan kesediaan mereka untuk mengeksplorasi dan mengartikulasikan pandangan dan pengalamannya secara sadar.

Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian

Penentuan Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Cipayung Ciputat Tangerang Selatan adalah tempat tinggal subyek dalam

menjalankan aktivitasnya. Dalam proses mendapatkan data penelitian paling tidak akan dikonsentrasikan pada lokasi tersebut. Disamping untuk melakukan wawancara dengan subyek penelitian, lokasi-lokasi tersebut juga akan dijadikan sebagai tempat untuk mengamati interaksi subyek baik dengan sesama wirausahawan maupun dengan kelompok sosial lainnya. Lokasi tersebut sangat penting didatangi karena untuk mengamati fenomena interaksi juga untuk melihat *impression management* yang mereka lakukan.

Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berasal dari kata-kata, perbuatan, tindakan dan atau perilaku sehari-hari dari para subyek yang diteliti serta data yang dapat diungkap/diambil berupa bahasa yang berasal dari pembicaraan diantara para subyek penelitian. Penelitian inipun menjadikan pernyataan (ungkapan) dan tindakan sadar dan Yossy Iratriana sebagai sumber data utamanya. Disamping menjadikan pernyataan dan tindakan sebagai sumber data utama penelitian, terdapat beberapa kalangan yang dijadikan sumber data di luar subyek penelitian. Pemilihan sumber data tersebut didasarkan pada kebutuhan penelitian (Fatchan, 2011:105).

Data dalam kajian ini diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter. Dokumen yang dikumpulkan teks-teks lisan dan tulis dari subyek dan para informen. Data berupa rekaman wawancara, tulisan di surat kabar, foto-foto, buku karya subyek, pidato, penelusuran lewat teman sejawat, penelusuran lewat masyarakat lingkungan subyek.

Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, observasi (pengamatan) berperan serta dan studi pustaka serta dokumen teks. Dengan demikian, peneliti yang merupakan instrument pokok dalam penelitian bertindak sebagai partisipan penuh melalui keikutsertaan sebagai bagian dari tempat yang diamati. Bertindak sebagai partisipan penuh dilakukan untuk membangun situasi. Tindakan tersebut juga berguna dalam mempertajam, tidak saja kemampuan panca indera tetapi juga perasaan dan intuisi yang digunakan dalam menggali data di lapangan. Dalam

penelitian ini, teknik yang paling utama digunakan peneliti adalah dengan melakukan pengamatan berperan serta dan kajian teks kehidupan dan dokumen tentang subyek yang diteliti. Sedangkan teknik lainnya seperti penggunaan dokumentasi dan wawancara mendalam adalah sebagai pendukung, walaupun keduanya tidak bisa dikesampingkan sama sekali.

Observasi (Pengamatan, Berperanserta)

Pengamatan berperan-serta adalah strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara dengan responden dan informan, partisipasi dan abservasi langsung serta instropeksi (Denzin, 2011:526). Sedangkan Pengamatan berperan-serta menurut (Mulyana, 2011:162) dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dalam kehidupan sehari-hari dari subyek yang menjadi obyek penelitian. Pengamat juga menyesuaikan diri atau terlibat secara langsung dengan mengikuti orang-orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari, melihat apa yang dilakukan, kapan, dengan siapa, dan dalam keadaan apa, serta bertanya mengenai tindakan tersebut, teknik ini memaksimalkan peluang peneliti untuk menghasilkan pernyataan-

pernyataan yang sah mengenai gejala yang dipelajarinya, karena:

Wawancara Mendalam

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti (Soehartono, 1999:67). Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali keterangan yang dibutuhkan dalam mengkonstruksi realitas yang ada. Pertanyaan harus dibuat luwes serta disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, sehingga baik peneliti maupun informan dapat saling memahami. Wawancara secara garis besar dibagi dua yaitu wawancara tak struktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka dan wawancara etnografis; sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.

Studi Dokumen

Untuk melengkapi hasil penelitian, peneliti menggunakan pula data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang terkait dengan hal penelitian ini. Dokumen

yang membantu dalam penelitian ini antara lain; teks berita dari Koran maupun artikel majalah, teks dokumen resmi, brosur, foto dan sebagainya. Data yang diperoleh merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan. Sumber dokumen lain seperti surat atau catatan pribadi yang sebenarnya dapat memberikan informasi penting, dalam hal ini tidak dimasukkan sebagai bahan kajian.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan melalui deskripsi data penelitian, penelahan tema-tema yang ada, serta penonjolan pada tema tertentu (Creswell, 1998:65).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti tiga tahap analisis data yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, penyajian (*display*) data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi,

Setelah proses pengumpulan data, maka dilakukan analisis data. Langkah awal dalam analisis data adalah melakukan reduksi data. Data atau

informasi yang ada dikelompokkan sesuai dengan topik permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dilakukan pengelompokkan data yang berkaitan dengan Soetrisno Bachir, menjadi dua kategori data yaitu data tentang pandangan Soetrisno Bachir tentang diri, keluarga dan lingkungannya (yang berkaitan dengan konsep dirinya), orientasi sosial (motif dan karier) serta pengelolaan kesan.

Setelah reduksi data, maka dilakukan penyajian (*display*) data, setelah data direduksi, tersusun secara sistematis dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan polanya, selanjutnya disusun dalam bentuk bagan-bagan atau narasi-narasi sehingga membentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan penelitian.

Langkah berikutnya adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Setelah melewati tahap pertama dan kedua, selanjutnya langkah yang harus diambil adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Setelah mendapatkan kesimpulan langkah selanjutnya adalah verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan cara mencari data baru

yang lebih mendalam untuk mendukung kesimpulan yang sudah didapatkannya. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan penelitian yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian ini. Dalam tahap ini, juga dimungkinkan untuk dibuatnya model sebagai bentuk konstruk derajat kedua (*second order construct*) dari penelitian ini.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Setiap penelitian ilmiah bertujuan menghasilkan pengetahuan yang obyektif. Artinya, kebenarannya yang dihasilkan dibatasi oleh kesepakatan serta bakuan-bakuan ilmu pengetahuan, dan oleh kenyataan empiris yang dikaji. Dua kriteria yang penting bagi obyektivitas suatu penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miler adalah keandalan (*reliability*) yang menyangkut langkah-langkah penelitian tersebut, dan kesahihan (*validity*) yang berkaitan dengan isi penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen pokok. Reliabilitas dan validitas data banyak ditentukan oleh hubungan antara peneliti dengan sasaran

penelitiannya. Peneliti bukan saja dituntut menguasai alat-alat konseptual dan teoritis yang relevan dengan gejala yang ditelitinya, tetapi juga perlu pula mengetahui keragaman para calon responden dan informannya menurut kedudukan masing-masing dalam struktur sosial dan struktur interaksi yang ada dikehidupan yang nyata. Relevansi disini adalah signifikansi dari pribadi terhadap lingkungan senyatanya. Usaha menemukan kepastian dan keaslian merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Validitas data juga perlu dijaga dengan penggabungan berbagai sumber informasi serta metode pengumpulan data. Upaya agar mendapatkan data yang valid peneliti melakukan seperti berikut.

Triangulasi data

Triangulasi pada hakekatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Oleh karena itu triangulasi adalah usaha

mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data (Mudjia Rahardjo). Konsep triangulasi digunakan dalam penelitian ini, dilandasi asumsi bahwa setiap bias yang inheren dalam sumber data, peneliti, atau metode tertentu, akan dinetralkan oleh sumber data, peneliti atau metode lainnya (Creswell, 1994:174). Reliabilitas dan validitas hasil penelitian dapat dikendalikan secara terencana melalui triangulasi. Triangulasi merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Reliabilitas dan validitas data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu dengan data yang didapat dari sumber atau metode lain.

Sebagai bukti konkrit informasi dari teks berupa berita yang menginformasikan bahwa subyek penelitian melakukan kegiatan sosialnya berupa hibah sebuah bangunan gedung bertingkat tujuh kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan nilai kurang lebih enam puluh milyar rupiah. Dengan adanya berita tersebut, peneliti mencari bukti berupa dokumen

yang berupa serah terima dan bukti sertifikat tanah.

Member check

Dengan suatu upaya meningkatkan keabsahan data dalam kajian ini dilakukan member check yaitu memeriksa dan mendiskusikan hasil penelitian dengan subyek maupun dengan para informan dengan tujuan agar diperoleh pengertian dan kesimpulan yang tepat dan melihat kekurangan-kekurangan yang ada untuk dimantapkan sehingga menjadi data yang akurat.

Ketekunan pengamatan

Maksud melakukan pengamatan dengan tekun, untuk menemukan cirri-ciri dan unsure-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, sehingga penyelidikan lebih dapat dipusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi partisipasi dan tinggal atau membaur beberapa waktu di daerah penelitian bersama subyek yang sedang diteliti. Tujuannya agar para peneliti dapat dengan tekun melakukan pengamatan terhadap berbagai

pembicaraan atau perbincangan, perilaku/perbuatan dan atau tindakan subyek penelitian, Dengan melakukan begitu peneliti dapat memahami dengan baik noumena yang ada dibalik semua pembicaraan dan tindakan mereka itu.

Persistent observation

Melalui observasi yang dilakukan secara terus menerus mengikuti subyek penelitian diharapkan agar memahami secara utuh dan menyeluruh terhadap gejala yang timbul dari berbagai percakapan ataupun tindakan yang dilakukan oleh subyek penelitian.

Teknik Analisis dan Penafsiran Data

Dalam penelitian kualitatif sejak pengumpulan data yang pertama, peneliti sudah harus melaksanakan analisis dan penafsiran data. Analisis tersebut dilakukan secara terus menerus dan simultan, hingga ditemukan suatu simpulan yang benar, alamiah, dan seperti apa adanya. Jenis teknik analisis data tersebut yaitu; analisis kasus perkasus, analisis antar kasus, analisis kawasan, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tematik, dan analisis interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Demografik Informan Penelitian

| Nama Informan & Jenis Kelamin (L/P) | Sebutan | Status Dalam Penelitian | Kode | Usia | Asal Suku | Pendidikan Terakhir | Pekerjaan |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|-------|-----------|---------------------|---------------|
| Yossy Iratriana (P) | Yossy | Subyek Penelitian (Key Informan) | Pengu | 55 th | Jawa | SMA | Entrepreneur |
| Roby Novianto (L) | Roby | Adik kandung | Adk | 48 th | Jawa | Sarjana | Entrepreneur |
| Ade Setiawan (L) | Ade | karyawan | Kar1 | 56 th | Sunda | Sekolah Dasar | Tukang sepatu |
| Yandi (L) | Oji | karyawan | Kar2 | 46 th | sunda | Sekolah dasar | Tukang sepatu |
| Owen | oweni | karyawan | Kar3 | 47 th | sunda | Sekolah dasar | Tukang sepatu |

Sumber: Hasil Penelitian

Analisis Data Hasil Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan data hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian yang dianalisis berdasarkan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu 1) paparan hasil wawancara dan penentuan tema, 2) Display data kategorisasi, 3) penarikan kesimpulan .

Paparan Hasil Wawancara dan Teks Kehidupan Subyek serta Temuan Tema

Bahasa menurut Claude Lancelor dan Antoine Arnauld, adalah cermin pikiran pemakainya. *“Language is a mirror of thought”* (Baert, 1998: 16). Sedangkan dalam perspektif komunikasi, pernyataan di atas dipandang sebagai bentuk

komunikasi yang tidak ideal, sebab menurut Johannesen (1996: 50) komunikasi harus lebih meningkatkan kerjasama sosial. Dari sudut retorika, menurut Weaver dan Burke (dalam Johannesen, 1996: 4), pemilihan kata-kata seperti itu dengan sendirinya mengekspresikan pilihan, sikap dan kecenderungan komunikator. Menurut Hikam (1996: 81), sejauh bahasa adalah proses produksi simbol, maka ia tidak bisa dipisahkan dari maksud sang pembicara. Sedangkan hermeneutika Gadamerian Baginya pemahaman yang benar adalah pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologism bukan metodologis, artinya kebenaran dapat dicapai bukan melalui metode tetapi melalui dialektika dengan mengajukan banyak pertanyaan. Dengan

demikian bahasa menjadi medium sangat penting bagi terjadinya dialog. Sebagai metode tafsir, hermeneutika menjadikan bahasa sebagai tema sentral. memandang makna dicari, dikonstruksi dan direkonstruksi oleh penafsir sesuai konteks penafsir dibuat sehingga makna teks tidak pernah baku, senantiasa berubah tergantung dengan bagaimana, kapan dan siapa pembacanya. Setelah melakukan wawancara mendalam dengan subyek penelitian dan berbagai teks tentang tindakan subyek serta 4 orang informan penelitian, diperoleh beberapa pernyataan seperti tampak pada tabel-tabel berikut:

Telaah pandangan Yossy Iriatiana seorang entrepreneurship tentang diri dan lingkungannya

| Subyek & Informan | Pernyataan | Tema yang muncul |
|-------------------|--|---|
| Yossy Iriatiana | Pemimpin harus amanah, Saya merasakan sangat beruntung tinggal bersama pedagang yang lain. Saya banyak dipengaruhi oleh orang tua dan kehidupan keluarga saya sebagai pedagang, model peranan yang sangat penting bagi saya adalah orang tua dan keluargaku. (Pengu) | Memimpin dipengaruhi Pendidikan internal keluarga dan peran orang tua serta lingkungan Memimpin dengan hati, sabar dan saya penuhi kebutuhan hidupnya |
| Roby | Pemimpin yang baik banyak faktor ya, diantaranya disebabkan dia itu memang keluarga pengusaha, bapaknya, kakeknya, juga karena lingkungannya, pendidikan dari orang tuanya juga mengarah pendidikan berdagang, jadi yang ada dibenaknya mbak Yossy itu sudah penuh dengan selok belok pengusaha. (adk) | Pemimpin itu harus sabar dipengaruhi pendidikan orang tua serta peran orang tua dan lingkungannya sebagai pemicu entrepreneur. Kuat berpendapat dan memimpin dengan sabar |
| Ade | Bu Yossy sangat baik dan gaya memimoinnya luwes, mungkin itu hasil didikan orang tuanya, nurun prigel dadi wong dagang. (kar1.) | Pengenalan berdagang sejak usia dini, pendidikan orang tua sangat mempengaruhi dan membentuk karakter entrepreneur. Bu yossy orangnya sabar dan memenuhi kebutuhan saya |
| Oji | Sudah terbiasa memimpin, Sebenarnya lulus SMA sudah mulai kegiatan bisnis, karena dari kecil memang sudah dididik dan memang dalam lingkungan pengusaha, terus mengembangkan bisnisnya itu, peluang yang ada memang usaha sepatu (Kar2) | Tidak banyak tingkah dalam memimpin. Bu yossy orangnya sabar dan baik memenuhi kebutuhan hidup saya |
| owen | Senang dipimpin bu Yossy, orangnya sabar, pengertian, selalu memberi arahan dengan sabar. (Kar3) | Terbentuknya karakter pemimpin dengan menimba pengalaman dari pebisnis senior. Bu yossy pengertian dan sabar, senang dipenuhi kebutuhan saya |

Telaah Orientasi Sosial yang meliputi pilihan karier dan motif
setelah menjadi entrepreneurship

| Informan | Pernyataan | Tema yang Muncul |
|-------------------|---|---|
| Yosy Iratriona | Tidak ada profesi lain, saya ini dibesarkan dilingkungan orang yang beraktivitas berwirausaha, jadi dari kecil sudah dididik kemandirian, ya inilah saya sampai sekarang tekad saya menjadi pengusaha, saya mengharapkan dari teman-teman seprofesi saling bermitra, saling menjalin hubungan bisnis yang sehat dan selalu memikirkan lingkungan sosialnya, sadar akan tujuan hidup ini, harapan saya bagi teman yang dari kampung, secara khusus agar berupaya menjadi orang yang berdampak pada lingkungan dimana mereka dilahirkan dan secara umum mereka juga harus memikirkan dampak perekonomian Negara Indonesia yang kita cintai ini. (Pengu) | Bertekad menjadi seorang entrepreneur karena cita-cita dan kebebasan berkarya setinggi mungkin. Serta pengembangan bisnis yang berorientasi sosial. Memimpin dengan sabar |
| Roby | Harapan saya tentu saja lebih banyak lagi adanya wirausahawan-wirausahawan seperti mbak Yosy, juga dukungan saya untuk berbuat banyak lagi dalam hal mengurangi pengangguran dengan menciptakan usaha-usaha kecil sehingga masyarakat kecil bisa meningkatkan kesejahteraannya. (adk) | Berprofesi sebagai pengusaha turut berkontribusi dalam perekonomian Negara dan menciptakan lapangan kerja sehingga turut mengentaskan kemiskinan. Sabar dan pengertian |
| Ade | Sudah lama saya bekerja ikut bu Yosy, yang namanya kesalahan ya pasti ada, tapi bu Yosy dengan sabar memberikan arahan (kar1) | Baik sekali cara memimpin dalam industri kecil ini, selalu menjalin hubungan sosial dengan rekan bisnis maupun dengan masyarakat umum. Terpenuhi kebutuhan hidupnya |
| Oji | Saya yakin karena didikan dari keluarga, juga lingkunganlah secara alamiah menentukan pilihannya menjadi pengusaha. (Kar2) | Profesi entrepreneur bisa mengembangkan ide seluas mungkin, Pemimpin yang sabar dan saling pengertian |
| Owen | Terutama bisa membuat keluarga bahagia karena kecukupan materi dan secara umum bisa memberikan hal terbaik buat masyarakat melalui karya yang bisa membuat orang lain mempunyai pendapatan. (Kar3) | Profesi pengusaha bisa memberikan dampak/perubahan perekonomian bagi masyarakat serta profesi entrepreneur merasa berguna bagi orang lain. |

Telaah cara manajemen diri baik dengan orang lain maupun dengan
sesama entrepreneurship

| Informan | Pernyataan | Tema yang Muncul |
|-------------------|---|--|
| Yosy Iratriona | Kalau yang dimaksud itu bisnis yang mempunyai indikasi ke arah bisnis yang tidak sehat, ya ada kaitannya dengan agama, saya diajarkan nilai-nilai kejujuran oleh orang tua saya, dulu saya disantrikan, alhamdulillah saya diberi kekuatan oleh Allah punya prinsip tidak ikut-ikutan bisnis yang tidak sehat. Komitmen saya terhadap keluarga tentang menjunjung nama baik, merupakan harga mati, dan itu merupakan karakter pengusaha terutama saya.(Pengu) | Nilai-nilai kejujuran merupakan dasar prinsip karakter pengusaha |
| | | |

| | | |
|------|---|--|
| Roby | Sebenarnya kalau dipahami pertemuan bisnis mbak Yossy itu pengembangan dari silaturahmi, terjadinya komunikasi bisnis dengan tidak hanya pada orientasi keuntungan dunia tetapi ada nilai akhirnya yaitu bisnis didasari dengan ibadah. (adk) | Perlunya komunikasi dengan baik dan tidak hanya orientasi keuntungan tapi juga ada nilai ibadahnya. |
| Ade | Bu Yossy itu orangnya senang main kesana kemari dengan teman sebayanya, tapi kalau saatnya nyantri ya harus nyantri, anaknya rajin, disiplin, sampai sekarang kalau pulang kampung ya, main ke tetangga, sosialnya tinggi, apalagi sekarang banyak duit, peduli dengan orang kampung sini. (kar1) | Komitmen dan disiplin dalam berbisnis merupakan tindakan yang penting, dalam menjalin hubungan kerja maupun bermasyarakat. |
| Oji | Sejak dulu bu Yossy itu kalau ada perlu langsung menemui, tapi jaman sudah maju, ya berhubungan dengan HP (handphone), bicara bisnis yang penting pegang prinsip nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan harus dibangun dengan baik. (Kkar2). | Prinsip berhubungan bisnis adalah kejujuran dan kepercayaan harus diangun dengan baik. |
| Owen | Ya senang sekali, bangga punya Majikan yang sukses dan mempunyai prinsip yang kuat artinya tidak terpengaruh pada teman sesama pebisnis maupun masyarakat lain yang memberikan informasi bisnis tapi tidak sehat, saya senang dan saya mencontohnya. (Kar3). | Pengusaha selalu melihat peluang yang ada dan prinsip kehati-hatian merupakan prinsip dalam pengambilan keputusan. |

Display Data: Kategorisasi yang selanjutnya nampak pada table-tabel
 Display data kategorisasi tema yang berikut ini:
 muncul berdasarkan pernyataan informan

Kategorisasi Tema

Menelaah pandangan Yossy Iratriana seorang entrepreneurship tentang diri dan lingkungannya

| Informan | Tema yang Muncul | Kategorisasi Tema |
|--------------------------------------|---|---|
| <u>Pengusaha</u> Yossy Iratriana | Pemimpin itu harus sabar, Pendidikan internal keluarga dan peran orang tua serta lingkungan | Sabar dalam memimpin dan dengan perasaan, Pendidikan keluarga dan lingkungan, |
| <u>Adik Kandung</u> Roby Novianto | Kuat berpendapat tidak ikut ikutan, sabar dalam memimpin keluarga pengusaha dan pendidikan orang tua serta peran orang tua dan lingkungannya sebagai pemicu entrepreneur. | Sabar, memahami kebutuhan karyawan Keluarga pengusaha, dan lingkungannya |

| <u>Karyawan</u> | | |
|-----------------|--|---|
| Ade | Sudah lama memimpin dan Pengenalan berdagang sejak usia dini, pendidikan orang tua sangat mempengaruhi dan membentuk karakter entrepreneur. | Sabar, mengerti kemauan karyawanPengalaman memimpin Pengenalan menjadi pengusaha sejak usia dini. |
| Oji | Pengalaman, Sudah lama memimpin dan Pengenalan berdagang sejak usia dini, pendidikan orang tua sangat mempengaruhi dan membentuk karakter entrepreneur. | Toleran, Sabar, mengerti kemauan karyawanPengalaman memimpin Pengenalan menjadi pengusaha sejak usia dini. |
| Owen | Pengertian dan Sudah lama memimpin dan Pengenalan berdagang sejak usia dini, pendidikan orang tua sangat mempengaruhi dan membentuk karakter entrepreneur. | Baik hati,Sabar, mengerti kemauan karyawanPengalaman memimpin Pengenalan menjadi pengusaha sejak usia dini. |

Kategorisasi Tema

Menelaah Orientasi Sosial yang meliputi pilihan karier dan motif setelah menjadi entrepreneurship

| Informan | Tema yang Muncul | Kategorisasi Tema |
|--------------------------------------|--|--|
| <u>Pengusaha</u> Yosy Iratriana | Bertekad menjadi seorang entrepreneur karena cita-cita dan kebebasan berkarya setinggi mungkin. Serta pengembangan bisnis yang berorientasi sosial. | Senang dan cita-cita menjadi pengusaha |
| <u>Adik Kandung</u> Roby Novianto | Berprofesi sebagai pengusaha turut berkontribusi dalam perekonomian Negara dan menciptakan lapangan kerja sehingga turut mengentaskan kemiskinan. | Profesi pengusaha berkontribusi mengentaskan kemiskinan |
| <u>Karyawan</u> | | |
| Ade | Tegas dalam memimpin, Karakter entrepreneur yang sukses selalu menjalin hubungan sosial dengan rekan bisnis maupun dengan masyarakat umum. | Tegas, disipli, mengerti kebutuhan bawahan dan Karakter <i>entrepreneur</i> dan hubungan sosial |
| Oji | Pemimpin yang baik, Karakter entrepreneur yang sukses selalu menjalin hubungan sosial dengan rekan bisnis maupun dengan masyarakat umum. | Pengertian,disipli, mengerti kebutuhan bawahan dan Karakter <i>entrepreneur</i> dan hubungan sosial |
| Owen | Pemimpin yang dekat dengan karyawan Karakter entrepreneur yang sukses selalu menjalin hubungan sosial dengan rekan bisnis maupun dengan masyarakat umum. | Dengan hati, Tegas, disipli, mengerti kebutuhan bawahan dan Karakter <i>entrepreneur</i> dan hubungan sosial |

Kategorisasi Tema
 Menelaah cara manajemen diri baik dengan orang lain maupun dengan
 sesama entrepreneurship

| Informan | Tema yang Muncul | Kategorisasi Tema |
|----------------------------|--|---|
| <u>Pengusaha</u> | | |
| Yossy Iratriana | Nilai-nilai kejujuran merupakan dasar prinsip karakter pengusaha | Nilai kejujuran |
| Adik Kandung Roby Novianto | Perlunya komunikasi dengan baik dan tidak hanya orientasi keuntungan tapi juga ada nilai ibadahnya. | Komunikasi bisnis dan etika |
| <u>Karyawan</u> | | |
| Ade | Komitmen dan disiplin dalam berbisnis merupakan tindakan yang penting, dalam menjalin hubungan kerja maupun bermasyarakat. | Komitmen dan disiplin |
| Oji | Prinsip berhubungan bisnis adalah kejujuran dan kepercayaan harus diangun dengan baik. | Kejujuran dan kepercayaan |
| Owen | Pengusaha selalu melihat peluang yang ada dan prinsip kehati-hatian merupakan prinsip dalam pengambilan keputusan. | Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip dalam pengambilan keputusan |

Penarikan Kesimpulan penelitian yang diklasifikasikan menurut jenis informan. Adapun temuan dan kesimpulan dalam hal penarikan kesimpulan ini informan. Adapun temuan dan kesimpulan pada dasarnya menjelaskan hasil temuan temuan penelitian Nampak pada tabel sebagai penelitian berdasarkan tujuan dan fokus berikut:

Penarikan Kesimpulan Temuan Penelitian
 Telaah pandangan Yossy Iratriana seorang *entrepreneurship* tentang diri dan lingkungannya

| Temuan Penelitian Stakeholder Pengusaha | Temuan Penelitian Stakeholder Adik Kandung | Temuan Penelitian Stakeholder Karyawan | Kesimpulan Temuan Penelitian | Tema temuan Penelitian |
|---|--|---|--|--|
| Pengalaman memimpin, Pendidikan keluarga dan lingkungan, pengalaman dalam berbisnis ,pengambilan keputusan, pertemuan dan bertanya kepada pengusaha yang sukses lebih dahulu, menyadari adanya sebuah proses menjadi pengusaha dan mewujudkan mimpi | Adaptasi dengan bawahan , mengerti kebutuhan bawahan Pengenalan menjadi pengusaha sejak usia dini dan pendidikan internal keluarga | Sabar, memimpin dengan perasaan Pengenalan bisnis dimulai sejak kecil dan pendidikan orang tua serta pengaruh lingkungannya Pendidikan keluarga dan | Bekerja dengan tekun, kebutuhan hidup tercukupi, saling membantu, Pemahaman tentang diri dan lingkungannya bermakna bahwa: (1) Siapa diri kita menurut diri sendiri dan siapa diri kita menurut orang lain (2) Lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat pembentuk | Sabar, disiplin, tegas, saling pengertian, dipenuhi kebutuhan hidup, saling percaya dan memberi berpengalaman dan berperasaanPen |

| | | | | |
|---|--|---------------|--|------------------------------------|
| yang besar menjadi kenyataan. Keluarga pengusaha, pendidikan orang tua dan lingkungannya | | lingkungannya | karakter pengusaha (3) Pembentukan pola pikir pengusaha dimulai sejak usia dini.(4) Pemimpin harus tegas, disiplin dan berperasaan | didikan keluarga dan lingkungannya |
|---|--|---------------|--|------------------------------------|

Penarikan Kesimpulan Temuan Penelitian
Telaah Orientasi Sosial yang meliputi pilihan karier dan motif setelah menjadi *entrepreneurship*

| Temuan Penelitian Stakeholder Pengusaha | Temuan Penelitian Stakeholder adik kandung | Temuan Penelitian Stakeholder karyawan | Kesimpulan Temuan Penelitian | Tema temuan Penelitian |
|---|--|---|--|--|
| Membantu orang lain, Keluarga pedagang dan cita-cita menjadi pengusaha Profesi pengusaha lebih tampak berkontribusi terhadap perekonomian dan dampak sosial | Cara memimpin dipengaruhi Pendidikan orang tua dan hubungan antar manusia sebagai makhluk Allah yang sewajarnya dilakukan sebagai tali silaturahmi dan komunikasi. | Baik hati, senang meno;ong, gaya memimpinya pengaruh pendidikan keluarga dan lingkungan sekitarnya mempengaruhi prose terbentuknya karakter seseorang. Pendidikan keluarga dan lingkungan sekitarnya, | Pemimpin yang berkemanusiaan Pilihan karier dan motif dipengaruhi oleh Keluarga Pedagang, Pendidikan orang tua, pengaruh lingkungan dan cita-cita. | Pengalaman memimpin, Keluarga Pedagang |

Penarikan Kesimpulan Temuan Penelitian
Telaah cara manajemen diri baik dengan orang lain maupun dengan sesama *entrepreneurship*

| Temuan Penelitian Stakeholder Pengusaha | Temuan Penelitian Stakeholder Adik kandung | Temuan Penelitian Stakeholder karyawan | Kesimpulan Temuan Penelitian | Tema temuan Penelitian |
|--|---|--|--|---|
| Mengerti kebutuhan bawahan, Pendidikan internal keluarga menjadikan pengusaha jujur dan memimpin dengan hati. Komunikasi bisnis mempunyai etika sehingga terjalin hubungan yang harmonis | Komunikasi dengan para karyawan selalu dilakukan. Membangun hubungan dengan masyarakat maupun dengan mitra bisnis harus selalu dilakukan dengan sopan dan jujur | Selalu bicara sesuai dengan janjinya. Kejujuran dan kepercayaan merupakan prinsip dalam berbisnis. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip dalam pengambilan keputusan | Pemimpin yang baik selalu memperhatikan kebutuhan karyawannya, selalu berkoordinasi antara pemimpin dengan rekan bisnis, Manajemen diri bermakna bahwa tidak terpengaruh pada peluang bisnis yang tidak sehat, prinsip kehati-hatian dasar membangun hubungan dengan rekan bisnis dan masyarakat | Memimpin dengan hati, mengerti kebutuhan karyawan, salingn memberi, Pendekatan ke karyawan dan Membangun komunikasi dengan mitra bisnis |

SIMPULAN

Dari hasil analisis data penelitian di atas diperoleh beberapa kesimpulan penelitian, antara lain:

Pengalaman dalam memimpin dan Suatu ciri seorang entrepreneur aktif dan kreatif adalah melahirkan taktik-taktik baru yang diperoleh dari pengalaman yang berkaitan dengan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk kebutuhan hidup perusahaan. Hal tersebut dilakukan seorang entrepreneur tujuannya agar kelangsungan hidup usahanya tetap bertahan walaupun pada kondisi dinamika dan konjungsi sosial dan ekonomi yang terus berubah. Memimpin dengan perasaan dan Konsep diri seorang entrepreneur menentukan berbagai perilaku komunikasi dan persepsi dalam pikirannya sebagai suatu realitas dan kepribadiannya. Jika seorang entrepreneur ingin merubah realitas dirinya maka harus pula mengubah persepsi dalam pikirannya. Memenuhi kebutuhan hidup para karyawan dan proses belajar seorang entrepreneur yang aktif dan kreatif komunikasi bisnis yang berupa proses penyampaian pesan, gagasan, ide, fakta, makna dan konsep yang sengaja dirancang sangat diperlukan. Hal tersebut diperlukan sebagai dasar pembentukan kepribadian bisnis bagi seorang entrepreneur. Dengan pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dan

transaksional feminim, terdapat hal-hal positif yang terjadi di perusahaan seperti terciptanya hubungan kekeluargaan yang erat antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain dan antara pegawai dengan pemimpin. Hubungan kekeluargaan yang erat akan menimbulkan suasana kerja yang menyenangkan. Iklim kerja yang menyenangkan juga dapat membuat pegawai dapat bekerja secara optimal. Selain itu, suasana kerja yang menyenangkan juga dapat membuat tingkat *turn over* pegawai rendah. Hal ini dibuktikan dari pegawai yang berada di Athaya Shoes saat ini adalah pegawai yang sudah lama bekerja di perusahaan dengan kurun waktu minimal 2 tahun. Selain gaya kepemimpinan feminim, gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional juga mempengaruhi kondisi perusahaan. Dimana pemimpin merupakan sosok pemimpin yang memberikan pujian, penghargaan, motivasi, inspirasi, dan dukungan terhadap para pegawainya. Sehingga pegawai yang berada di perusahaan merasa nyaman bekerja di bawah kepemimpinan seorang pemimpin wanita. Memenuhi kebutuhan karyawan merupakan

ikatan antara pemimpin dengan bawahan yang harus dilakukan, sukses sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal, dalam lingkungannya seseorang akan terpengaruh pada faktor psikologis yang sangat mendukung dan mempengaruhi pola pikir seorang pengusaha, serta memiliki hasrat untuk berprestasi yang besar juga siap bekerja keras, tekun, mempunyai keyakinan besar dan keuletan dalam berjuang. Memimpin dengan sabar, dengan hati yang ikhlas dan selalu menghidupkan komunikasi dua arah, *sukses* yaitu mempunyai konsep diri dan arah tujuan yang jelas. Pemilihan karier dengan menjadi pengusaha yang didasarkan pada pertimbangan dan pilihan rasionalnya serta efektivitas tujuan untuk berkreasi yang setinggi mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1990). Transformational leadership development: manual for the multifactor leadership questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.
- Bass, B. M. (2008). Handbook of leadership: theory, research, and application (Fourth Edition). New York: Free Press.
- Ivancevich, J.M., & Konopaske, R. Matteson, M.T. (2008). Perilaku dan manajemen organisasi (jilid 1). Erlangga, Jakarta.
- Kartono, Kartini. (2010). Pemimpin dan kepemimpinan, apakah pemimpin abnormal itu? Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Michael E. Porter, (1985), Strategi Bersaing, Di-Indonesiakan oleh Agus Maulana, Edisi ketiga,
- Prajogo, W. (2003). Pengaruh kepemimpinan transaksional transformasional. *Kinerja* 7 (2), 79 – 149
- Rajawali. Suyuthi, N. F. S., Hamzah, H. D., & Payangan, O. R. (2004). Pengaruh gaya Kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap kinerja melalui kepuasan karyawan PT. Telkom Divre VII Makassar. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Siagian, S.P. (2008). Kiat meningkatkan produktivitas kerja. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugianto, F. A. (2011). Pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Jakarta: Erlangga.

- Situmorang, N.Z. (2011). Gaya kepemimpinan perempuan. Proceeding PESAT Vol. 4.
- Steers, R.M., Porter, L.W., & Bigley, G.A. (1996). Motivation and leadership at work. Singapore: McGraw-Hill.
- Sugiono, (2001), Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung
- Umar, H. (1998). Riset sumberdaya manusia dalam organisasi. Gramedia, Jakarta.
- Yulk, G, (2010), Kepemimpinan dalam organisasi, Edisi 5, terjemahan Budi Supriyanto, PT.Indeks, Jakarta

**KELAYAKAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA IKAN PADA
KERAMBA JARING APUNG DI WADUK CIRATA**

Abel Gandhy

Surya University

email: abel.gandhy@surya.ac.id

Diterima: 3 Februari 2018; Direvisi: 7 Februari 2018; Disetujui: 25 Februari 2018

Abstract

The aim of this research is to analyze the impact of business developmen in term of diversification fish species cultivation in floating cage at Cirata Reservoir. Indicator of feasibility study based on Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Pay Back Period (PP) and Net B/C. The research showed that diversification activities increases NPV, raise IRR, Accelerate the payback period and increases the Net B/C. Therefore, diversification type of fish cultivation is recomended to apply because will increasing farmer income.

Key words: Financial Analysis, Internal Rate of Return, Diversification

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengembangan usaha dalam bentuk diversifikasi jenis ikan yang dibudidayakan pada keramba jaring apung di Waduk Cirata. Indikator analisis finansial yang digunakan adalah *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Payback Period (PP)* dan *Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan diversifikasi jenis ikan meningkatkan NPV, meningkatkan *Internal Rate of Return (IRR)*, dan mempercepat *Payback Period* serta meningkatkan nilai *Net B/C*. Sehingga kegiatan diversifikasi jenis ikan akan meningkatkan pendapat petani dan layak untuk dilakukan.

Kata Kunci : Analisis Finansial, *Internal Rate of Return*, Diversifikasi

PENDAHULUAN

Waduk Cirata merupakan salah satu sentra budidaya perikanan air tawar yang terletak di Jawa Barat. Waduk Cirata terbentuk dari adanya genangan air seluas 62 km^2 akibat pembangunan waduk yang membendung Sungai Citarum. Genangan waduk tersebut tersebar di tiga Kabupaten, yaitu kabupaten Cianjur, kabupaten Purwakarta, dan kabupaten Bandung.

Genangan air terluas terdapat di Kabupaten Cianjur dengan luas 29.603.299 m^2 (Aksomo, 2007). Metode budidaya perikanan yang digunakan di waduk Cirata adalah budidaya perikanan Keramba Jaring Apung (KJA). Pada tahun 2012, Jawa Barat mampu memproduksi 195.312 ton ikan yang menggunakan metode jaring apung (BKPM, 2014). Aktivitas budidaya perikanan sistem keramba jaring apung memiliki tujuan berupa meningkatkan produksi untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Pencapaian tujuan produksi didukung oleh kemampuan pembudidaya dalam mengelola input tetap berupa investasi peralatan dan sewa lahan, serta input variabel berupa benih, pakan, perawatan dan lainnya yang merupakan faktor penting untuk dapat mencapai tujuan. Jenis ikan yang umum digunakan pada

Keramba Jaring Apung di waduk Cirata adalah ikan Nila dan Ikan Mas. Pola budidaya yang digunakan adalah intensif, dimana ikan ditebar dengan kepadatan yang tinggi serta penggunaan pakan komersial selama proses pembesaran (Ardi, 2013).

Dengan pola budidaya intensif, petani dapat memanen ikan dalam waktu yang lebih cepat dengan kualitas yang baik. Salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan petani Keramba Jaring Apung adalah dengan melakukan diversifikasi ikan budidaya yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi serta dapat tumbuh dengan baik di lingkungan Waduk Cirata. Jenis ikan yang dapat memenuhi kriteria diatas dan dapat dibudidayakan di Waduk Cirata adalah Ikan hias jenis Koi serta ikan Bawal. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana analisis finansial dari praktek pengembangan usaha dadalam bentuk diversifikasi jenis ikan yang dibudidayakan ketika diterapkan di Keramba Jaring Apung Waduk Cirata. Analisis finansial merupakan suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan manfaat apakah suatu kegiatan bisnis menguntungkan (Husnan, 2003). Analisis finansial yang dilakukan pada penelitian ini adalah *Net Present Value*

(NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Payback Period* (PP), dan *Break Even Point* (BEP). Pada akhirnya hasil analisis yang didapat diharapkan dapat berguna bagi pengambil keputusan dalam menyusun perencanaan ke depannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Waduk Cirata, Desa Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 25 Mei 2015. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan langsung), wawancara, dan studi pustaka. Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan ditempat penelitian. Observasi dilakukan di Desa Mande Waduk Cirata, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Studi pustaka dilakukan dengan mengambil data dari jurnal, penelitian terdahulu, dan dari internet. Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh dari penerapan diversifikasi spesies ikan pada Keramba Jaring Apung. Parameter yang akan dilihat adalah perubahan penerimaan yang akan didapatkan oleh petani dengan memperhatikan nilai waktu dari uang

yang diperoleh. Sehingga metode analisis data yang digunakan adalah *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Net Benefit Cost Ratio* (Net B/C) dan *Payback Period* (PP).

NPV adalah nilai sekarang dari keuntungan bersih (manfaat neto tambahan) yang akan diperoleh pada masa mendatang, merupakan selisih antara nilai sekarang arus manfaat dikurangi dengan nilai sekarang arus biaya (Gittinger, 1986). Jika nilai NPV positif, berarti usaha layak untuk dilakukan, jika bernilai nol berarti tidak untung dan tidak rugi, sedangkan jika bernilai negatif maka usaha tidak layak untuk dilakukan.

Rumus yang digunakan untuk analisis NPV yaitu,

$$NPV = \sum \frac{(TR - TC)}{(1+i)^t}$$

Dimana :

TR = Penerimaan dalam satu periode produksi

TC = Biaya yang dikeluarkan dalam satu periode produksi

i = Tingkat suku bunga

t = Umur proyek

Internal Rate of Return (IRR) digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dimasa yang akan

datang, atau penerimaan kas, dengan mengeluarkan investasi awal (Umar, 2005). IRR merupakan nilai yang menyebabkan nilai NPV proyek sama dengan 0 (Sylvia, 2013).

Rumus yang digunakan yaitu,

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 - NPV_2} \times (i_2 - i_1)$$

Keterangan:

Jika IRR = tingkat discount rate maka usaha tidak untung dan tidak rugi.

Jika IRR > tingkat discount rate maka usaha layak untuk dijalankan.

Jika IRR < tingkat discount maka usaha tidak layak untuk dijalankan.

Payback period adalah jangka waktu yang diperlukan suatu perusahaan untuk mengembalikan modal investasinya dari cash flow (Gittinger, 1986). semakin cepat dana investasi dapat diperoleh kembali, maka semakin kecil resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Tujuan PP yaitu untuk menghitung berapa jangka waktu yang dibutuhkan agar modal yang diinvestasikan dapat dikembalikan untuk membiayai usaha. Rumus yang digunakan untuk mencari payback period yaitu:

$$\text{Payback Period} = \frac{I}{N} \text{Dimana,}$$

I = biaya investasi

N = manfaat bersih yang dapat diperoleh setiap tahunnya.

Net benefit ratio merupakan nilai perbandingan antara *present value* yang positif dengan *present value* yang negatif (Soekarwati, 1995).

$$\text{Net B/C Ratio} =$$

$$\frac{\Sigma PV \text{ Net Benefit yang positif}}{\Sigma PV \text{ Net Benefit yang negatif}}$$

$$\frac{\Sigma PV \text{ Net Benefit yang positif}}{\Sigma PV \text{ Net Benefit yang negatif}}$$

Keterangan:

Jika Net B/C > 1, maka kegiatan usaha layak dilakukan

Jika Net B/C < 1, maka kegiatan usaha tidak layak dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keramba jaring apung yang digunakan dalam penelitian berukuran 7 x 7 meter dengan total 32 unit keramba.

Investasi adalah biaya awal yang dikeluarkan pada saat awal melakukan suatu usaha. Periode proyek yang digunakan adalah 5 Tahun, karena komponen investasi yang digunakan akan habis masa pakainya setelah 5 tahun. Rumah digunakan untuk beristirahat dan saung digunakan untuk tempat berteduh saat melakukan kontrol lapangan serta pemberian pakan ikan. Sinar matahari yang merata sepanjang tahun menyebabkan tenaga surya digunakan untuk sumber penghasil tenaga listrik.

Biaya investasi yang dikeluarkan oleh berada di desa Mande propinsi Jawa Barat petani ikan Keramba Jaring Apung yang diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Biaya investasi Keramba Jaring Apung (KJA) ukuran 7x7 sebanyak 32 unit

| Komponen | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
|--------------------|-----------|--------------|-------------|
| Rumah | 1 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Saung | 9 | 3.000.000 | 27.000.000 |
| Listrik (genset) | 2 | 2.500.000 | 5.000.000 |
| Modul Tenaga Surya | 2 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| Jaring (Kg) | 512 | 100.000 | 51.200.000 |
| Total Investasi | | | 129.200.000 |

Sumber : Data Primer (diolah tahun 2015)

Biaya tetap adalah komponen biaya produksi yang nilainya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi dan penggunaannya tidak habis dalam satu masa produksi. Biaya tetap merupakan biaya yang tetap dikeluarkan baik saat melakukan produksi ataupun tidak. Total karyawan yang dipekerjakan adalah 4 orang. Sewa lahan per bulan adalah Rp 200.000 yang disetorkan kepada Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC). Total drum yang digunakan adalah 320 unit, dengan biaya penyusutan drum per bulan Rp 170.000. Perawatan jaring dilakukan untuk menjamin agar jaring tetap berfungsi baik sehingga dapat mencegah ikan yang hilang karena jaring yang rusak. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh pemilik KJA adalah seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Biaya Tetap Keramba Jaring Apung (KJA) ukuran 7x7 sebanyak 32 unit

| Komponen | Kuantitas | Biaya per Bulan | Jumlah per Tahun |
|-------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Gaji | 4 | 1.500.000 | 72.000.000 |
| Sewa Lahan | 1 | 200.000 | 2.400.000 |
| Penyusutan Drum | 320 | 170.000 | 54.400.000 |
| Perawatan Jaring | 8 | 50.000 | 4.800.000 |
| Total Biaya Tetap | | | 133.600.000 |

Sumber : Data Primer (diolah tahun 2015)

Biaya variabel adalah biaya yang nilainya berubah seiring dengan bertambah atau berkurangnya produksi. Setiap periode produksi, bibit ikan mas dan ikan nila yang dibutuhkan adalah 5 kg per keramba ukuran 7 x 7. Dalam 1 tahun produksi

ikan Mas dilakukan sebanyak 3 kali dan untuk ikan nila sebanyak 2 kali. Total bibit ikan mas dan ikan nila yang dibutuhkan pada 32 keramba untuk setiap periode produksi adalah 160 Kg. Ikan Mas hidup dibagian permukaan dari air, sedangkan ikan Nila hidup dibagian dasar dari keramba, sehingga pakan yang tidak terkonsumsi oleh ikan mas akan dimakan oleh ikan Nila. Biaya variabel terbesar

adalah untuk Pakan ikan Mas dan Nila yaitu sebesar Rp 387.600.000 atau lebih dari 95% total biaya variabel. Oleh karena itu keuntungan yang diterima oleh petani sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pakan. Biaya variabel yang dikeluarkan oleh pembudidaya ikan mas dan ikan nila di KJA Waduk Cirata selama satu tahun ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Biaya Variabel Keramba Jaring Apung (KJA) ukuran 7x7 sebanyak 32 unit

| Komponen | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|
| Bibit Ikan Nila | 320 | 17.000 | 5.440.000 |
| Bibit Ikan Mas | 480 | 26.500 | 12.720.000 |
| Pakan Mas Dan Nila | 51.000 | 7.600 | 387.600.000 |
| Total Biaya Variabel | | | 405.760.000 |

Sumber : Data Primer (diolah tahun 2015)

Pendapatan adalah jumlah hasil yang diperoleh petani dari penjualan hasil produksi. Setiap periode produksi rata-rata Survival Rate yang terjadi pada ikan mas dan nila adalah 85%. Tingkat *Food Conversion Ratio* ikan mas adalah 0,5 dan Ikan Nila adalah 0,2 dari total pakan yang diberikan. Total Ikan mas yang dihasilkan untuk setiap periode produksi (4 bulan) adalah 250 kg per keramba, sehingga total ikan Mas yang dihasilkan dalam 1 periode produksi adalah 8 ton. Total ikan nila yang dihasilkan setiap periode produksi (6 bulan) adalah 160 kg per keramba ukuran

7 x 7 meter. Harga ikan yang digunakan adalah harga rata-rata ikan Mas dan Nila pada periode Februari 2014 hingga Februari 2015. Penerimaan yang diperoleh dari ikan mas adalah Rp 456.000.000 atau 77% dari total penerimaan petani. Hal ini merupakan fakta bahwa ikan mas merupakan komoditas utama penyumbang penghasilan bagi petani. Total penerimaan yang diperoleh dari ikan Mas adalah Rp 134.400.000. Pendapatan usaha yang diterima oleh petani Keramba Jaring Apung selama 1 tahun ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 4. Total Pendapatan Keramba Jaring Apung (KJA) ukuran 7x7 sebanyak 32 unit

| Keterangan | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Ikan mas (kg) | 24.000 | 19.000 | 456.000.000 |
| Ikan nila (kg) | 11.200 | 12.000 | 134.400.000 |
| Total Penerimaan | | | 590.400.000 |

Sumber : Data Primer (diolah tahun 2015)

Tingkat *discount rate* yang digunakan di Indonesia. NPV yang didapatkan adalah sebesar 12% yang didapat dari selama lima tahun proses produksi rata-rata suku bunga pinjaman pada bank dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Net Present Value (NPV) budidaya Ikan Mas dan Nila

| Tahun Ke- | Penerimaan (Bt) | Biaya (Ct) | Nilai | NPV |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 | | -129.200.000 | -129.200.000 | -129.200.000 |
| 1 | 590.400.000 | 516.560.000 | 73.840.000 | 65.928.571 |
| 2 | 590.400.000 | 516.560.000 | 73.840.000 | 58.864.796 |
| 3 | 590.400.000 | 516.560.000 | 73.840.000 | 52.557.853 |
| 4 | 590.400.000 | 516.560.000 | 73.840.000 | 46.926.655 |
| 5 | 590.400.000 | 516.560.000 | 73.840.000 | 41.898.799 |
| Nilai NPV proyek | | | | 136.976.675 |

Sumber : Data Primer (diolah tahun 2015)

Net Present value merupakan nilai sekarang dari uang dengan tingkat diskonto tertentu, yang akan diterima oleh pelaku usaha jika menjalankan kegiatan bisnis. Pada tahun ke-0 nilai NPV negatif dikarenakan pelaku usaha harus mengeluarkan uang untuk kegiatan investasi tanpa memperoleh penghasilan. Hal ini dikarenakan kegiatan produksi belum berjalan. Pada tahun ke-1 hingga tahun ke-5 nilai NPV positif dikarenakan kegiatan budidaya telah berjalan sehingga petani memperoleh penerimaan dari penjualan ikan hasil panen. Berdasarkan tabel diatas, NPV yang didapatkan sebesar Rp 136.976.675. Artinya nilai sekarang dari pendapatan selama 5 tahun akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 136.976.675 pada tingkat suku bungan 12%. Nilai positif artinya usaha budidaya Ikan mas dan Nila pada Keramba Jaring Apung layak untuk dilakukan.

Internal Rate of Return adalah tingkat *discount rate* yang menghasilkan NPV

proyek usaha budidaya ikan pada Keramba Jaring Apung menjadi sama dengan 0. IRR didapatkan dengan metode *trial and error* sampai didapatkan nilai NPV yang negatif. Langkah selanjutnya

adalah melakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Tabel dibawah ini menjelaskan proses untuk mendapatkan nilai IRR.

Tabel 6. Internal Rate of Return Usaha budidaya Ikan Mas dan Nila

| Tahun Ke- | Nilai | NPV (i=40%) | NPV (i=50%) |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 | -129.200.000 | -129.200.000 | -129.200.000 |
| 1 | 73.840.000 | 52.742.857 | 49.226.667 |
| 2 | 73.840.000 | 37.673.469 | 32.817.778 |
| 3 | 73.840.000 | 26.909.621 | 21.878.519 |
| 4 | 73.840.000 | 19.221.158 | 14.585.679 |
| 5 | 73.840.000 | 13.729.398 | 9.723.786 |
| Nilai NPV proyek | | 21.076.504 | -967.572 |

Sumber : Data Primer (diolah tahun 2015)

Pada saat *discount rate* yang dioperasikan adalah 40%, nilai *net present value* yang dihasilkan adalah Rp 21.076.504. Sedangkan saat *Discount Rate* yang dioperasikan adalah 50%, nilai *net present value* yang dihasilkan adalah Rp -967.572. Kondisi ini mengindikasikan bahwa nilai IRR dari proyek terletak diantara nilai *discount rate* sebesar 40% dan 50%. Dengan metode interpolasi maka akan didapatkan nilai *discount rate* yang menyebabkan nilai *Net Present Value* proyek menjadi 0. Nilai *Internal Rate Return* adalah sebesar 49%. Jadi, hal ini menunjukkan usaha budidaya Ikan Mas dan Nila pada Keramba Jaring Apung layak untuk dijalankan, karena IRR (49%) lebih besar dari tingkat *cost of capital* (12%), yaitu tingkat suku bunga kredit

pada perbankan di Indonesia. *Payback Period* digunakan untuk mengukur seberapa cepat investasi akan kembali. Nilai *Pay Back Period* yang terjadi dari kegiatan usaha budidaya Ikan Mas dan Nila pada Keramba Jaring Apung adalah 1 Tahun 5 Bulan. Artinya, dalam kurun waktu tersebut total investasi yang dikeluarkan oleh petani sudah kembali.

Net B/C adalah perbandingan nilai *present value* yang bernilai negatif dengan *present value* yang bernilai positif. Nilai *Net B/C* dari budidaya ikan Mas dan Nila pada keramba jaring apung di Waduk Cirata adalah 2,06. Nilai *Net B/C* lebih besar dari 1 berarti kegiatan usaha layak untuk dilakukan. Diversifikasi merupakan kegiatan usaha budidaya untuk menambah jenis ikan yang dipelihara dengan tujuan

untuk meningkatkan pendapatan petani keramba jaring apung. Variasi ikan yang dibudidayakan harus disesuaikan dengan karakteristik perairan waduk Cirata, dengan demikian pertumbuhan ikan dapat berlangsung secara optimal serta tingkat mortalitas ikan menjadi rendah. Tambahan ikan yang dibudidayakan terdiri dari ikan hias jenis Koi dan ikan Bawal. Alasan lain pemilihan jenis ikan-ikan tersebut adalah karena tersedianya pasar yang akan menampung ikan hasil panen.

Skema budidaya ikan dalam keramba jaring apung terdiri dari 28 keramba ukuran 7 x 7 meter berisi Ikan Mas dan Ikan Nila, 2 Keramba berisi ikan bawal dan 2 keramba berisi ikan hias jenis Koi. Total keramba yang digunakan adalah 32 unit. Biaya investasi dan biaya tetap yang

digunakan saat dilakukan diversifikasi jenis ikan nilainya sama dengan budidaya yang hanya membudidayakan ikan Mas dan ikan Nila. Total Biaya investasi yang dikeluarkan oleh petani adalah Rp 129.200.000 dan Total biaya tetap per tahun adalah Rp 133.600.000.

Dengan adanya diversifikasi jenis ikan, maka terdapat tambahan biaya untuk pembelian bibit ikan hias jenis Koi dan ikan Bawal. Disisi lain jumlah bibit ikan Mas dan Nila akan berkurang, karena alokasi keramba berkurang untuk kedua jenis ikan tersebut. Keadaan yang sama juga terjadi untuk komponen pakan ikan. Biaya variabel yang dikeluarkan petani selama satu tahun pada proses budidaya keramba jaring apung disajikan dalam tabel:

Tabel 7. Biaya Variabel Budidaya Keramba Jaring Apung Dengan Diversifikasi

| Komponen | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|
| Bibit Ikan Nila | 150 | 17.000 | 4.760.000 |
| Bibit Ikan Hias | 15 | 100.000 | 6.000.000 |
| Bibit Ikan Mas | 150 | 26.500 | 11.130.000 |
| Bibit Ikan Bawal | 30 | 50.000 | 600.000 |
| Pakan Mas | 15.000 | 7.600 | 342.000.000 |
| Pakan Hias | 1.500 | 10.000 | 45.000.000 |
| Pakan Bawal | 1.700 | 7.600 | 38.760.000 |
| Total Biaya Variabel | | | 448.250.000 |

Sumber : Data Primer (diolah tahun 2015)

Tingkat *Food conversion Ratio* (FCR) ikan bawal adalah 0,8. Ikan hias jenis Koi dijual per ekor, dengan harga jual Rp 20.000/ekor. Panen ikan Koi dan Bawal

dilakukan setiap 3 bulan sekali. diversifikasi jenis ikan yang Pendapatan usaha setelah dilakukannya dibudidayakan ditunjukkan oleh tabel.

Tabel 8. Pendapatan Dengan Diversifikasi Jenis Ikan yang dibudidayakan

| Komponen | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Ikan mas (kg) | 21.000 | 18.500 | 399.000.000 |
| Ikan nila (kg) | 11.200 | 12.000 | 134.400.000 |
| Ikan Hias (ekor) | 6.000 | 20.000 | 120.000.000 |
| Ikan Bawal (Kg) | 2.400 | 12.500 | 30.000.000 |
| Total Penerimaan | | | 683.400.000 |

Sumber : Data Primer (diolah tahun 2015)

Kriteria finansial yang dihasilkan dengan dibudidayakan dalam keramba jaring melakukan diversifikasi jenis ikan yang apung dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Pendapatan Dengan Diversifikasi Jenis Ikan yang dibudidayakan

| Kriteria Finansial | Nilai |
|--------------------|-----------------|
| NPV | 294.397.251 |
| IRR | 87% |
| Payback Period | 1 Tahun 2 Bulan |
| Net B/C | 3,28 |

Sumber : Data Primer (diolah tahun 2015)

Nilai *Net Present Value* (NPV) usaha peningkatkan sebanyak 38% dari Internal budidaya dengan diversifikasi jenis ikan Rate of Return. Petani juga akan adalah Rp 294.397.251. Nilai NPV memperoleh waktu yang lebih cepat untuk meningkat sebesar Rp 157.420.576 pengembalian investasi yang dilakukan dibandingkan budidaya ikan Mas dan Nila pada usaha budidaya ikan dengan keramba jaring apung. Dengan menunjukkan kegiatan usaha budidaya dilakukannya diversifikasi jenis ikan, Payback Period usaha adalah 1 Tahun 2 dengan diversifikasi jenis ikan Bulan. Nilai tersebut 3 bulan lebih cepat memberikan peningkatan pendapatan bagi jika dibandingkan budidaya yang petani. dilakukan hanya ikan Mas dan Nila saja.

Kondisi yang sama terjadi pada Indikator *Net Benefit Cost Ratio* (Net B/C) *Internal Rate of Return* (IRR). Dengan juga menunjukkan hasil yang lebih baik. adanya diversifikasi jenis ikan, IRR Jika usaha budidaya hanya menggunakan meningkat dari 49% menjadi 87%. Terjadi

ikan Mas dan Nila saja nilainya 2,06, maka dengan adanya diversifikasi nilainya menjadi 3,28. Nilai yang lebih besar artinya usaha Budidaya semakin layak untuk dilakukan.

SIMPULAN

Usaha budidaya ikan pada Keramba Jaring Apung yang dilakukan di Waduk Cirata pada umumnya membudidayakan ikan Mas dan Nila. Indikator analisis Finansial Usaha budidaya yang dilakukan terdiri dari *Net Present Value* (NPV) bernilai Rp 136.976.675, *Internal Rate of Return* (IRR) adalah 49%, *Payback Period* (PP) adalah 1 Tahun 5 Bulan dan *Net B/C* adalah 2,06. Keseluruhan indikator analisis Finansial menyatakan usaha budidaya ikan pada Keramba Jaring Apung layak untuk dilakukan.

Diversifikasi jenis ikan yang dibudidayakan menggunakan ikan hias jenis Koi dan ikan bawal. Pertimbangan penggunaan kedua jenis ikan tersebut karena cocok dengan karakteristik perairan Waduk Cirata dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Indikator analisis finansial yang dihasilkan adalah peningkatan *Net Present Value* (NPV) sebesar Rp 157.420.576, peningkatan *Internal Rate of Return* (IRR)

sebesar 38%, mempercepat *Payback Period* selama 3 bulan serta meningkatkan nilai *Net B/C* dari 2,06 menjadi 3,28. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa kegiatan budidaya dengan diversifikasi jenis ikan direkomendasikan untuk petani, karena akan meningkatkan pendapatan petani. Dengan demikian petani direkomendasikan untuk menerapkan diversifikasi budidaya jenis ikan karena akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dengan luas lahan budidaya yang sama.

REFERENSI

- Aksomo.R. (2007). Nilai Ekonomi Pemanfaatan Waduk Cirata untuk Perikanan dan Wisata Tirta di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan Kelautan. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Ardi, Idil. (2013). Budidaya Ikan Sistem Keramba Jaring Apung Guna menjaga Keberlanjutan Lingkungan Perairan Waduk Cirata. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya. Jakarta.

- BKPM. (2014). Potensi Budidaya Jaring Apung di Jawa Barat. Diperoleh dari <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/commodityarea.php?ia=32&ic=1565>. Diunduh tanggal 27 Januari (2015) pukul 15.20.
- Gittinger, J. Price. (1986). Economic Analysis of Agricultural Projects. 2nd Edition. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Husnan, Suad. (2003), Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan. Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Soekartawi. (1995). Analisis Usaha Tani. Jakarta : UI Press.
- Sylvia, Rika. (2013). Analisis Investasi Pendirian Home Industry Keripik Singkong di Desa Gunung Ulin Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 7 No. 1 (2013).
- Umar, Husein. (2001). Study Kelayakan Bisnis. Edisi 3 Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

**DETERMINASI PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN TUNNELING INCENTIVE
TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING
PADA EMITEN BEI**

Saifudin, Luky Septiani Putri

Universitas Semarang (USM)

Email: saifudin@usm.ac.id

Diterima: 2 November 2017; Direvisi: 6 November 2017; Disetujui: 24 November 2017

Abstract

This study aims to determine the effect of taxes, bonus mechanism, and tunneling incentive to transfer pricing decisions. Dependent Variables used in this research is transfer pricing and Independent Variables used in this study is the tax bonus mechanism, and tunneling incentive. The population in this study are all companies listed in Indonesia Stock Exchange except for those engaged in the field of finance. The sample selection using purposive sampling method with a final sample of 140 observation period of 2012-2015. The data used is taken from the secondary financial statements of the company. Data analysis techniques used in this study is the technique of logistic regression analysis. With the help of SPSS program application. The results showed that the variables and tunneling tax incentive does not affect terhadap transfer pricing decisions, whereas a variable bonus mechanism of influence on transfer pricing decisions. The coefficient of determination in this study amounted to 13.4%. Future studies are expected to add another independent variable such as an arm's length.

Keywords: Tax, Bonus Mechanism, Incentive Tunneling, and Transfer Pricing.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* dan Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali yang bergerak di bidang keuangan. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel akhir 140 observasi periode tahun 2012-2015. Jenis data yang digunakan adalah sekunder yang diambil dari Laporan Keuangan perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi logistik. Dengan bantuan aplikasi program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan variabel mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kata kunci : Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, Dan *Transfer Pricing*.

PENDAHULUAN

Globalisasi perkembangan perekonomian dewasa ini semakin pesat dan memberikan pengaruh pada pola bisnis dan sikap pelaku bisnis tanpa mengenal batas negara. Dampaknya perusahaan multinasional akan mendapatkan permasalahan yaitu pengenaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara.

Terutama di bidang investasi yang semakin aktif dilakukan oleh investor, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri yang akan berdampak semakin meningkatnya transaksi-transaksi internasional (*cross border transaction*). Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, maka perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal termasuk dengan efisiensi biaya. Persoalan perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau devisi tersebut lazim disebut dengan *transfer pricing* (Mangoting, 2000). *Transfer pricing* dapat menimbulkan berbagai masalah menyangkut bea cukai, pajak, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen. Undang – Undang Perpajakan menyebut *transfer pricing* yaitu transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (*afiliasi*). Hal ini diatur dalam Undang – Undang pasal 18 ayat (4) nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu : hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat

terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak, atau untuk merekayasa besarnya biaya oleh wajib pajak. Hubungan istimewa merupakan hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang terjadi karena adanya keterkaitan antara satu pihak dengan pihak lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa (Mangoting, 2000). Transaksi antara wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dikenal dengan istilah *transfer pricing*.

Permasalahan *transfer pricing* menjadi isu yang menarik dan mendapat perhatian otoritas perpajakan dari berbagai negara. Semakin banyak negara yang memperkenalkan peraturan *transfer pricing*, penelitian akhir-akhir ini menemukan lebih dari 80% perusahaan multinasional melihat *transfer pricing* sebagai suatu isu utama (Suandy, 2011). Hal ini tidak terlepas dari perkembangan globalisasi ekonomi dengan munculnya banyak perusahaan multinasional

diberbagai manca negara. Praktik transfer pricing telah dilakukan di beberapa perusahaan multinasional di Inggris, contohnya Starbuck pada tahun 2011 tidak membayar pajak sama sekali dan mengaku rugi sejak tahun 2008, padahal telah berhasil mencetak penjualan sebesar £112 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun. Selama beroperasi di Inggris, Starbucks hanya menyetorkan pajak sebesar £6 juta. Sebagian besar keuntungan Starbuck telah dialihkan dari Inggris ke perusahaan cabang di Belanda dalam bentuk royalti (Barford & Holt, 2013) dalam (F, Mayowan, & Karjo, 2016). Starbucks mengaku mengalami penurunan pendapatan dengan pihak Belanda. Tetapi pihak Uni Eropa justru menilai adanya *transfer pricing*, dimana perhitungan pajak perusahaan multinasional memasukkan biaya-biaya dari anak perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perhitungan pajak Starbucks ini melanggar aturan dengan membesarkan biaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan pemberian insentif secara ilegal (Ramdania, 2014).

Penelitian tentang pajak yang berkaitan dengan keputusan *transfer pricing* telah dilakukan. Bernard, Jensen, & Scott (2006) dalam Hartati, Desmiyawati, & Azlina

(2014) menemukan bahwa harga transaksi berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif import negara tujuan. Yuniasih, Rasmini, & Wirakusuma (2012) menyatakan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Sedangkan menurut Mispiyanti (2015) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Selain pajak, keputusan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Mekanisme bonus biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja para karyawannya, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya semakin tinggi. Ada juga perusahaan yang menginginkan bonus besar dengan mengubah laba yang dilaporkan. Menurut Purwanti (2010) Tantiem atau jasa produksi (bonus) merupakan penghargaan yang diberikan RUPS kepada anggota direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba.

Beberapa penelitian tentang *transfer pricing* telah dilakukan. Penelitian dari Hartanti, Desmiyawati, & Julita (2015) mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Kemudian Hartati, Desmiyawati, & Azlina (2014) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer*

pricing. Sedangkan Mispuyanti (2015) meneliti bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Selain pajak dan mekanisme bonus, keputusan untuk melakukan *transfer pricing* dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik sehingga menyebabkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas (Hartanti, Desmiyawati, & Julita, 2015). Masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas terjadi dikarenakan pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen, ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas lebih memiliki kendali terhadap keputusan di bandingkan dengan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat membuat keputusan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri, tanpa memedulikan pemegang saham minoritas.

Menurut Claessens *et al.*, (2002) dalam Yuniasih, Rasmini, & Wirakusuma (2012) lemahnya perlindungan hak – hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan

pemegang saham minoritas. Menurut Zhang (2004) dalam Mutamimah (2009) *tunneling* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas. Contoh *tunneling* tidak memberikan deviden, menjual aset perusahaan kepada perusahaan lain dengan harga dibawah harga pasar, dan memilih anggota keluarga untuk menduduki posisi penting di perusahaan. Beberapa penelitian tentang *transfer pricing* telah dilakukan. Hartanti, Desmiyawati, & Julita (2015) menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Mispuyanti (2015) menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Kemudian F, Mayowan, & Karjo (2016) *tunneling incentive* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan indikasi melakukan transaksi *transfer pricing*. Sehingga *tunneling incentive* sangat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* suatu perusahaan.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka penelitian ini akan diuji kembali perusahaan - perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Penelitian ini menggunakan sample seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2015 kecuali yang bergerak dibidang keuangan. Penggunaan sample cukup untuk menggambarkan kondisi perusahaan di Indonesia yang melakukan *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2015 kecuali perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Metode Analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi variabel dalam penelitian ini.

Statistik deskriptif digunakan untuk

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

memberikan gambaran tentang nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata - rata, dan standar devisiasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi logistik. Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Nilai koefisien determinasi pada regresi logistik ditunjukkan dengan nilai *Nagelkerke R Square*. *Nagelkerke R Square*. Persamaan regresi logistik (*logistic regression*) dapat dinyatakan sebagai berikut (Ghozali, 2011):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = *Transfer Pricing*
- α = Konstanta
- β = Koefision Regresi
- X₁ = Pajak
- X₂ = Mekanisme Bonus
- X₃ = *Tunneling Incentive*
- ε = *error* atau sisa

(residual)

Tabel 1
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| Pajak | 140 | ,00 | 13,25 | ,5491 | 1,34896 |
| Mekabon | 140 | ,03 | 59,33 | 1,6103 | 4,97292 |
| Tunneling | 140 | 20,90 | 93,00 | 55,8928 | 21,94179 |
| TP | 140 | ,00 | 1,00 | ,5857 | ,49437 |
| Valid N (listwise) | 140 | | | | |

Sumber : data diolah dengan SPSS

Dari hasil perhitungan deskriptif pada tabel 1 diatas nampak bahwa dari 140 data seluruh perusahaan selama 4 (empat) tahun pengamatan, nilai rata – rata pajak sebesar 0.5491 dengan standar devisiasi 1.34896. Nilai rata – rata mekanisme bonus sebesar 1.6103 dengan standar deviasi sebesar 4.97292. Nilai rata – rata *tunneling*

incentive sebesar 55.8928 dengan standar deviasi sebesar 21.94179. Nilai rata – rata pengungkapan *transfer pricing* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 – 2015 selama periode pengamatan sebesar 0.5857 dengan standar devisiasi sebesar 0.49437.

Uji Kelayakan Model Regresi
Tabel 2
Hosmer and Lemeshow Test

| Step | Chi-square | Df | Sig. |
|------|------------|----|------|
| 1 | 10,100 | 8 | ,258 |

Sumber : data diolah dengan SPSS 20.0, 2016

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Dari hasil pengujian pada tabel 2 diatas diperoleh nilai *Chi-square* sebesar 10.100 dengan nilai signifikansi 0,258 dan derajat bebas (df) 8.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi logistik yang telah digunakan memenuhi kecukupan data (fit).

Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Penilaian keseluruhan model (*Overall Model Fit*) dilakukan dengan membandingkan nilai antara *-2 Log Likelihood* (-2LL) pada awal (*Block Number = 1*), dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai *-2 Log Likelihood* (-2LL) pada akhir (*Block Number = 0*), dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai *-2 Log Likelihood* (-2LL) pada akhir (*Block Number = 1*).

Tabel 3
Iteration History^{a,b,c}

| Iteration | | -2 Log likelihood | Coefficients |
|-----------|---|-------------------|--------------|
| | | | Constant |
| Step 0 | 1 | 189,947 | ,343 |
| | 2 | 189,947 | ,346 |
| | 3 | 189,947 | ,346 |

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 189,947

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : data diolah dengan SPSS

Tabel 4
Iteration History a,b,c,d

| Iteration | -2 Log likelihood | Coefficients | | | |
|-----------|-------------------|--------------|-------|---------|-----------|
| | | Constant | Pajak | Mekabon | Tunneling |
| 1 | 180,917 | -,233 | -,186 | -,060 | ,014 |
| 2 | 179,513 | -,155 | -,255 | -,121 | ,015 |
| 3 | 175,741 | ,278 | -,311 | -,461 | ,015 |
| 4 | 175,277 | ,480 | -,340 | -,628 | ,015 |
| 5 | 175,273 | ,501 | -,344 | -,645 | ,015 |
| 6 | 175,273 | ,501 | -,344 | -,646 | ,015 |

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 189,947

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : data diolah dengan SPSS 20.0

Pada tabel 3 Nilai -2LL awal adalah sebesar 189.947 dan setelah dimasukkan variabel independen, maka pada tabel 4 nilai -2LL akhir mengalami penurunan menjadi 175.273. penurunan nilai -2LL ini menunjukkan bahwa model regresi yang baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Tabel 5
Model Summary

| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 175,273 ^a | ,100 | ,134 |

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : data diolah dengan SPSS 20.0

Telah dijelaskan pada tabel 5 diatas, Nilai variabel independen yaitu variabel pajak, *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,134 mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* yang berarti variabilitas variabel dependen adalah 13,4 persen, sedangkan sisanya yaitu pengungkapan yaitu pengungkapan sebesar 86,6 persen dijelaskan oleh variabel *Transfer Pricing* yang dapat dijelaskan oleh – variabel lain diluar model penelitian.

Tabel 6
Classification Table^a

| | Observed | Predicted | | Percentage Correct |
|--------------------|----------|-----------|------|--------------------|
| | | TP | | |
| | | ,00 | 1,00 | |
| Step 1 | TP ,00 | 21 | 37 | 36,2 |
| | 1,00 | 10 | 72 | 87,8 |
| Overall Percentage | | | | 66,4 |

a. The cut value is ,500

Sumber : data diolah dengan SPSS 20.0

Tabel tersebut menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah sebesar 66.4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi tersebut, terdapat sebanyak 58 perusahaan (87,8%) yang dapat diprediksi melakukan *transfer pricing* dari total 140 data perusahaan sampel selama periode pengamatan (2012-2015) yang telah melakukan *transfer pricing*.

Uji Hipotesis

**Tabel 7
Variables in the Equation**

| | B | S.E. | Wald | Df | Sig. | Exp(B) | |
|---------------------|---------------|-------|------|-------|------|--------|-------|
| Step 1 ^a | PAJAK | -,344 | ,226 | 2,310 | 1 | ,129 | ,709 |
| | MEKABON | -,646 | ,280 | 5,300 | 1 | ,021 | ,524 |
| | TUNNELIN G | ,015 | ,008 | 3,115 | 1 | ,078 | 1,015 |
| | Constant | ,501 | ,611 | ,673 | 1 | ,412 | 1,651 |

a. Variable(s) entered on step 1: pajak, mekabon, tunneling.

Sumber : data yang diolah dengan SPSS 20.0

Model regresi yang terbentuk berdasarkan nilai estimasi parameter dalam *Variables in The Equation* adalah sebagai berikut :

$$TP = 0,501 - 0,344PAJAK - 0,646 MEKABON + 0,015 TUNNELING + e$$

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) dan hipotesis ketiga (H3) yaitu pajak dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, hal ini dilihat

dari tingkat signifikansi sebesar 0,129 dan 0,078 yang lebih besar dari 0,05. Sedangkan hipotesis kedua (H2) yaitu mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* hal ini dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,021 yang lebih kecil dari 0,05.

Dalam perkembangannya upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dapat dilakukan melalui manajemen pajak (Suandy, 2011). Manajemen pajak bisa dilakukan dengan perencanaan pajak dengan cara meminimalkan pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak berada pada posisi seminimal mungkin dan hal ini dilegalkan oleh pemerintah. Cara meminimalkan beban pajak bisa dilakukan dengan penghindaran pajak, yaitu dengan meminimalkan beban pajak dengan menggunakan alternatif yaitu mencari celah-celah ketentuan perundangan perpajakan yang riil yang dapat diterima fiskus, dan penghematan pajak, yaitu dengan memperkecil utang PPh dengan cara memperkecil jam kerja atau pekerjaan yang dilakukan sehingga penghasilannya terlihat kecil.

Hasil uji regresi logistik variabel pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0.129 yang lebih besar dari 0.05. Beban pajak yang besar tidak memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Mispiyanti, 2015) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Mekanisme bonus merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memberikan penghargaan kepada direksi dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Kerena apabila pemilik perusahaan atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Biasanya pemilik perusahaan akan melihat laba secara keseluruhan yang dihasilkan untuk menilai kinerja para direksinya. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0.021 yang lebih kecil

dari 0.05. Dalam menjalankan tugasnya para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Hartati, Desmiyawati, & Azlina (2014) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0.078 yang lebih besar dari 0.05. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa pemegang saham asing tidak menggunakan hak kendalanya untuk memerintahkan manajemen dalam melakukan *transfer pricing* atau bisa juga diartikan bahwa ada atau tidaknya pemegang saham asing, perusahaan akan tetap melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi & Jati (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diduga yang diduga karena pemilik institusional hanya berfikir untuk memaksimalkan

kesejahteraannya sehingga apapun keputusan yang dibuat oleh manajemen itu baik asalkan menguntungkan bagi mereka, termasuk keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Dimana didalam kepemilikan institusional terdapat kepemilikan saham asing.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis dari permasalahan yang diangkat pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. , maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yakni Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

REFERENSI

- Cooper, D. S., & Schindler, P. S. (2006). *Metode Riset Bisnis* (Vol. 2). Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Dewi, N. N., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *ISSN: 2302-8556 E-*

- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6 (2), 249-260.
- F, D. N., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8 (1).
- Fitriandi, Primandita;. (2011). *Kompilasi Undang – Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (5 ed.). Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Gusnardi. (2009). Penetapan harga Transfer dalam kajian Perpajakan. *Pekbis Jurnal*, 1 (1), 36 - 43.
- Hartanti, W., Desmiyawati, & Julita. (2015) Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 18*, 16 - 19.
- Hartati, W., Desmiyawati, & Azlina, N. (2014, September). Analisis Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Simposium Nasional Akuntansi 17*, 24 - 27.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis* Yogyakarta: Badan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Kurniawan, A. M. (2015). *Pajak Internasional : Beserta Contoh Aplikainya* (2 ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mangoting, Y. (2000, Mei). Aspek Perpajakan Dalam Praktek Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2 (2), 69 - 82.
- Marfuah, & Azizah, A. P. (2014, Desember). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*

- & *Auditing Indonesia*, 18 (2), 156-165.
- Mispiyanti. (2015, Januari). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 16 (1).
- Mutamimah. (2009, Agustus). Tunneling Atau Value Added Dalam Strategi Merger Dan Akuisisi Di Indonesia . *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 2 (2).
- Pramono, J. (2007, Maret). Pengaruh Faktor Higine Dan Pemuas Padamotivasi Dan Kinerja: Uji Terhadap Teori Herzberg. *Jurnal Optimal*, 11.
- Purwanti, L. (2010, Mei). Kecakapan Manajerial, Skema bonus, Managemen Laba dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 8 (2).
- Rahayu, Ning;. (2010, Juni). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7 (1).
- Ramdania. (2014). *Google, Starbucks Diduga Terkait Skandal Pajak*.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang NO.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (7 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2012, September). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *SNA* 15, 20 - 23.
- www.saham.ok
- www.idx.co.id

RETURN ON ASSETS, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL

Marwan Effendi, Nugraha

Universitas Pendidikan Indonesia

marwan.effendi@upi.edu

Diterima: 5 Februari 2018; Direvisi: 7 Februari 2018; Disetujui: 18 Februari 2018

Abstract

The purpose of this research is to know the effect of ROA, Liquidity and Firm Size on Capital Structure of Micro Finance Institution Company (LKM) registered in Otoritas Jasa Keuangan in 2016 up to Mei 2017. The object of research which then operationalized consists of Return On Assets (ROA), Liquidity and Firm Size as independent variable and Capital Structure is operated as dependent variable. The method in this research is quantitative verification. The population used is a conventional Microfinance Institution (LM) registered in the Otoritas Jasa Keuangan in 2016 up to May 2017 of 147 companies, and the financial data of that period from all populations is used for research samples. Data analysis technique using multiple linear regression statistic with simultaneous significance test with F test. The result of F Test statistic shows that regression model can be used to draw conclusion and predict about ROA, Liquidity, Firm Size to Capital Structure in the future. Hypothesis test results accept that ROA, Liquidity and Company Size negatively affect the Capital Structure.

Keywords: ROA, Liquidity, Company Size, Capital Structure.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh ROA, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada perusahaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016- Mei 2017. Objek dalam penelitian yang kemudian dioperasionalkan terdiri dari Return On Assets (ROA), Likuiditas dan Ukuran Perusahaan (Firm Size) sebagai variabel bebas serta Struktur Modal dioperasikan sebagai variabel terikat. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif verifikatif. Populasi yang digunakan adalah perusahaan Lembaga Keuangan Mikro (LM) konvensional yang tercatat di Otoritas Jasa sampai dengan bulan Mei 2017 sebanyak 147 perusahaan, dan data keuangan periode tersebut dari semua populasi digunakan untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data dengan menggunakan statistika regresi linier berganda dengan pengujian signifikansi simultan dengan Uji F. Hasil statistik Uji F menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dan memprediksi tentang gambaran ROA, Likuiditas, Ukuran Perusahaan terhadap struktur modal dimasa mendatang. Hasil uji hipotesis menerima bahwa ROA, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Struktur Modal.

Kata Kunci: ROA, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal.

PENDAHULUAN

Guna mendorong dan memberdayakan perekonomian dalam taraf perekonomian masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tentunya diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Perkembangan UMKM selama ini dapat diperkirakan terkendala oleh karena akses terhadap pendanaan ke lembaga keuangan formal. Panjangnya birokrasi, keragu-raguan pengelola lembaga keuangan formal terhadap performing loan ketika memberikan kredit kepada pelaku UMKM dan masih banyak kendala dalam hal teknis maupun non teknis lainnya yang patut diduga menjadi kendala atas akses pendanaan tersebut. Dengan alasan untuk memberikan solusi konkrit atas masalah tersebut maka banyaklah dijumpai di masyarakat, tumbuh dan berkembang lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk keuangan. Lembaga keuangan non-bank tersebut didirikan dengan struktur modal yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga keuangan tersebut dikenal dengan sebutan lembaga

keuangan mikro (LKM). Banyaknya LKM yang telah beroperasi tersebut belum diikuti oleh terbentuknya suatu berbadan hukum dan izin usaha yang terdaftar (OJK, 2017)

Landasan hukum bagi berlakunya operasionalisasi LKM, pada 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Hal ini patut diapresiasi sebagai bentuk dari dukungan pemerintah atas masalah bagi para pelaku UMKM. Menurut Undang-undang ini juga secara definitif disebutkan pengertian dari LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dalam pelaksanaannya, LKM dapat terbagi-bagi menjadi beberapa kegiatan bisnis, yaitu konvensional dan syariah, dan secara organisasi lembaga keuangan mikro di Indonesia dapat berbadan hukum Perseroan Terbatas, sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha

milik desa/kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20 persen), dan Koperasi (Lembaga and Mikro 2013). Yang tentu kesemuanya diatur menurut Undang-undang dan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut undang-undang diatas bahwa Modal LKM terdiri dari modal disetor untuk LKM yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah untuk LKM yang berbadan hukum Koperasi dengan besaran, Wilayah usaha desa/kelurahan Rp 50.000.000, Wilayah usaha kecamatan Rp 100.000.000, Wilayah usaha kabupaten/kota Rp 500.000.000. Struktur modal merupakan perimbangan pendanaan jangka panjang perusahaan terhadap modal sendiri (Martono; H 2001). Struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau harga saham adalah struktur modal yang optimal (Husnan 2003). Struktur modal yang optimal seringkali menjadi patokan perusahaan dalam penggunaan dana dari sumber modal yang tersedia. Struktur modal yang optimal adalah stuktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan

antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan nilai perusahaan. Menurut (Fred dan Thomas E. Copeland 1992) kebijakan mengenai struktur modal melibatkan *trade off* antara risiko dan tingkat pengembalian. Beberapa ahli dibidang keuangan menyatakan beberapa teori tentang struktur modal, seperti yang disampaikan oleh (James C. dan John M. Marchowicz.Jr 1997) yang dikenal dengan teori agensi menyatakan siapapun yang mengeluarkan biaya pengawasan, biaya tersebut pada akhirnya ditanggung oleh pemegang saham. Selanjutnya adalah signaling teori, merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan (Brigham, F, and Joel F 2006). Dari teori-teori yang disebutkan itu, kesemuanya menekankan bagaimana perusahaan seharusnya melakukan pendanaan atau membentuk struktur modal yang optimal.

Struktur modal adalah komposisi dana yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan investasi perusahaan yang tertiri dari hutang, ekuitas dan surat berharga lainnya (Berk, Jonathan, and Harfoed 2012). Menurut pendekatan

Trade Off Theory menyatakan bahwa didalam menetapkan kebijakan struktur modal, perusahaan akan mencari struktur modal yang optimal dengan menyeimbangkan anatara manfaat dan pengorbanan yang ditimbulkan dari penggunaan utang (Dreyer,2011). Sementara menurut pecking order theory bahwa perusahaan lebih menyukai pendanaan internal daripada dana eksternal dalam rangka pengembangan usahanya (Myers & Maljuf 1984).

Return On Assets (ROA) sama dengan Return On Investment sama dengan Net Margin dikalikan dengan perputaran asset, hal ini terlihat didalam the du pont chart yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan masing-masing rasio tersebut (Margaretha 2004). Rumusan matematis yang digunakan adalah dengan membandingkan Laba setelah pajak dengan Total Asset Likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Fahmi 2011). Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar hutang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Dalam mengukur rasio ini dipergunakan ukuran pada kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan membandingkan

aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya.

Ukuran perusahaan merupakan ukuran tentang besarnya asset yang dimiliki perusahaan. Pengukurannya adalah diproksi dengan nilai logaritma dari total aktiva (Prabansari and Kusuma 2005). Berdasarkan data Struktur Modal Perusahaan LKM Konvensional pada OJK Periode 2016-Mei 2017 menunjukkan bahwa dari bulan kebulannya Struktur modal mengalami kecendrungan stagnasi yang cukup dramatis, hal tersebut memberikan petunjuk bahwa setiap bulannya LKM Konvensional yang tercatat di OJK, secara total memperlihatkan kecendrungan stagnasi dalam penggunaan utang.

ROA mengalami penurunan yang cukup berarti hal ini dapat diperkirakan laba operasional LKM yang cenderung turun dari bulan ke bulannya. Sementara Likuiditas cenderung naik rasionya namun menjelang akhir periode data mengalami stagnasi dan penurunan, hal ini dapat dikarenakan peningkatan pada modal yang disetor dan kemudian dialokasikan kepada kenaikan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Dalam penentuan struktur modal yang perlu dipertimbangkan yaitu stabilitas penjualan, profitabilitas, struktur

aset, growth rate, kondisi internal perusahaan, dan kondisi ekonomi (Brigham et al. 2006). Tingkat bunga, profitabilitas, strukturaktiva, kadar risiko dari aktiva, besarnya jumlah modal yang diperlukan, keadaan pasar modal, sifat manajemen, dan ukuran perusahaan adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi struktur modal (Riyanto 2010).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dengan menggunakan variabel yang hampir sama, seperti yang dilakukan oleh Mayangsari (2001) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, laba bersih, struktur aktiva dan perubahan modal kerja terbukti secara signifikan mempengaruhi struktur modal. Asset, size dan price earning ratio (PER) terbukti berpengaruh positif terhadap struktur modal (debt to equity ratio) (Fitrijanti & Hartono, 2002).

Christianti (2006), penelitiannya menyimpulkan bahwa atribut assets tangibility, growth, profitability mempunyai pengaruh terhadap leverage perusahaan dalam penentuan keputusan pendanaan untuk perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta pada periode 2000-

2003. Penelitian Rr. Suprantinegrum (2011), menyatakan terdapat pengaruh negative dan signifikan antara ROA terhadap struktur modal.

Dari telusuran studi empiris dalam penelitian terdahulu, maka penelitian ini mengupayakan penelitian kembali faktor yang mempengaruhi struktur modal yang dititik beratkan ROA, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan. Sehingga demikian rumusan masalah yang dapat diajukan adalah apakah ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh ROA, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan LKM Konvensional terdaftar di OJK periode 2016 – mei 2017. Teori-teori yang berkesesuaian dengan struktur modal telah dikembangkan oleh beberapa ahli keuangan, diantaranya: (Brigham et al. 2006), Kesimpulan dari teori Modigliani-Miller tanpa pajak ini yaitu tidak membedakan antara perusahaan berhutang atau pemegang saham berhutang pada saat kondisi tanpa pajak dan pasar yang sempurna. Nilai perusahaan tidak bergantung pada struktur modalnya. Dengan kata lain, manajer keuangan tidak dapat meningkatkan nilai perusahaannya dengan merubah proporsi hutang dan

ekuitas yang digunakan untuk membiayai perusahaan. Teori ini juga disebut sebagai teori ketidakrelevanan hutang.

Myers dan Majluf (1984) mengemukakan mengenai teori pecking order. Teori pecking order menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan dimana para manajer akan memilih untuk menggunakan laba ditahan terlebih dahulu, kemudian hutang, dan penerbitan ekuitas sebagai pilihan terakhir. Teori pecking order menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam memilih sumber pendanaan. Perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi umumnya menggunakan hutang dalam jumlah yang lebih sedikit. Hal itu disebabkan karena keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang lebih kecil cenderung menggunakan hutang dengan jumlah yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. ROA merupakan indikator dalam mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Fahmi 2011). Peningkatan

profitabilitas akan meningkatkan laba ditahan, sesuai dengan pecking order theory yang mempunyai preferensi pendanaan pertama dengan dana internal berupa laba ditahan, sehingga komponen modal sendiri semakin meningkat. Perusahaan yang tingkat keuntungannya besar memiliki sumber pendanaan internal yang lebih besar dan memiliki kebutuhan untuk melakukan pembiayaan investasi melalui pendanaan eksternal yang lebih kecil. Dengan meningkatnya modal sendiri, menyebabkan rasio hutang menjadi menurun (dengan asumsi hutang relatif tetap).

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan guna memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan sumberdaya jangka pendek (James C. dan John M. Marchowicz. Jr 1997). Menurut pecking order theory, perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi cenderung tidak menggunakan pembiayaan dari hutang. Hal ini disebabkan perusahaan dengan likuiditas yang tinggi mempunyai dana internal yang besar, sehingga perusahaan tersebut akan mengutamakan dalam menggunakan dana internal untuk pembiayaan investasi sebelum menggunakan dana eksternal yang berasal

dari hutang. Myers dan Rajam (1998) mengatakan bahwa ketika biaya agensi dari likuiditas tinggi, maka kreditur luar membatasi jumlah pembiayaan hutang yang tersedia bagi perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan lebih besar cenderung memiliki sumber permodalan yang lebih terdiversifikasi sehingga ukuran perusahaan merupakan kebalikan terjadinya kebangkrutan. Dengan nilai aset yang cukup besar maka perusahaan akan lebih mudah memperoleh pinjaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik verifikasi. Data yang digunakan adalah data skunder dengan skala ukur data rasio. Data yang diolah berasal dari laporan kinerja keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dari tahun 2016 sampai dengan Mei 2017 yang didapat melalui publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada www.ojk.go.id.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumentasi yang menjadi populasi dalam penelitian sebanyak 146 entitas perusahaan LKM

Konvensional yang tercatat dari tahun 2016 sampai dengan Mei 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Struktur Modal = $147,149 + -0,170 \cdot ROA + -0,016 \cdot Likuiditas + -17,054 \cdot Firm\ Size$
Dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 147,149 menyatakan bahwa jika ROA, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama dianggap konstan, maka rata-rata struktur modal perusahaan sebesar 147,149 satuan. ROA, likuiditas dan Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap Struktur Modal.

ROA mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 1,705 dengan nilai Sig 0,112. Jika dilihat dari besarnya nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Struktur Modal sehingga H_1 dapat diterima. Kesimpulan ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Christiani (2006), Mayangsari (2001), Fitrijanti (2002), Rahman Alamsyah (2011), Susyanti (2008), Zein (2008) Andrayani (2014) dan Verena Sari (2013). Dari data yang telah diolah Menunjukkan nilai Likuiditas sebesar -

0,664 dengan nilai Sig 0,518 yang mengisyaratkan bahwa Likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Struktur Modal, dengan demikian H_2 diterima, kesimpulan ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Verena Sari (2013), Syeikh dan Wang (2011), Setiawati (2013) serta Basri Zein dan Miraza (2008).

Hasil olahan data yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel Ukuran perusahaan mempunyai nilai $t_{hitung} -13,939$ dengan nilai Sig. 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ukuran Persahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Struktur Modal. Kesimpulan ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprانتiningrum (2011), Andrayani (2014), Susyanti (2008), Hadiano (2008), Puspawardhani (2014), Setiawati (2013) Indrajaya dan Herlina (2011).

SIMPULAN

Analisis terhadap hasil perhitungan ROA menunjukkan bahwa semakin *profitable* perusahaan LKM Konvensional yang terdaftar di OJK, maka perusahaan cenderung mengurangi komposisi hutangnya. Semakin besar *profit* perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam membiayai kebutuhan investasinya dari sumber

internal (seperti laba ditahan). Hasil analisis pada rasio likuiditas ini mengisyaratkan perusahaan dengan likuiditas yang tinggi mempunyai dana internal yang besar, sehingga perusahaan tersebut akan lebih menggunakan dana internalnya terlebih dahulu untuk membiayai investasinya sebelum menggunakan pembiayaan eksternal melalui hutang. Myers dan Rajan (1998) menyatakan bahwa ketika biaya agensi dari likuiditas tinggi, maka kreditur luar membatasi jumlah pembiayaan hutang yang tersedia bagi perusahaan. Oleh karena itu terdapat hubungan negatif antara likuiditas dengan Struktur Modal. Hasil yang ditunjukkan pada Hipotesis 3 (H_3) memberikan arti bahwa perusahaan LKM Konvensional memiliki sebaran kepemilikan modalnya masih cukup sedikit. Setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau bergesernya pengendalian perusahaan yang dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya perusahaan yang kecil dimana sahamnya hanya tersebar pada lingkungan kecil maka penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya kontrol pihak

dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Alam hal ini bisa dikatakan bahwa perusahaan besar cenderung mempunyai hutang besar, berarti ada hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan hutang.

REFERENSI

- Agus Rahman Alamsyah (2011) Analisis Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan *Food And Beverage* Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi Vol 2 No1, Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Berk, Jonathan, and Peter Demarzo and Jarrad Harfoed. 2012. *Fundamentals of Corporate Finance*. Second Edi. Boston, Massachussetts: Prentice Hall.
- Brigham, Eugene F, and Houston Joel F. 2006. *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Bram Hadianto (2008) Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Emiten Sektor Telekomunikasi Periode 2000-2006: Sebuah Pengujian Hipotesis *Pecking Order*, Jurnal Manajemen Vol 7 No 2 hal. 14-29, Maranatha Christian University 2008
- Christianti, A. (2006). Penentuan Perilaku Kebijakan Struktur modal Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta: Hipotesis Static Trade-Off atau Pecking Order Theory. Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang, 23- 26 agustus 2006, hal. 1-20
- Devi Verena Sari (2013). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 – 2010. Jurnal Of Management Vol 2 No. 3 2013 hal 1
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fitrijanti, T., dan Hartono, J. (2002). “Set Kesempatan Investasi: Konstruksi dan Analisis Hubungannyadengan Kebijakan Pendanaan dan Dividen”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 5, No. 1: 35 – 63.
- Fred dan Thomas E. Copeland, Weston. 1992. *Manajemen Keuangan*.

- Delapan Ji. Jakarta: Erlangga.
- Glenn Indrajaya, Herlina an Rini Setiadi (2011). Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Tingkat Pertumbuhan, Profitabilitas dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi* Nomor 06 Tahun ke-2 September-Desember (2011)
- Husnan, Suad. (2003). *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas*. Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- James C. dan John M. Marchowicz, Jr, Van Horne. (1997). *Prinsip - Prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Jeni Susyanti (2008). Profitabilitas, pertumbuhan aktiva, ukuran perusahaan, struktur aktiva dan likuiditas terhadap struktur modal pt bank syariah x tbk. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Iqtishoduna Iqtishoduna* (Vol 4, No 3).
- Lembaga, Direktorat and Keuangan Mikro. (2013). "Frequently Asked Questions (Faq) Lembaga Keuangan Mikro." (6).
- Lusi Setiawati (2013) Pengaruh Struktur Aktiva, Tingkat Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. *Kajian Imiah Mahasiswa Manajemen* Vol 2 No 1
- Mayangsari, S (2001). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pendanaan perusahaan : Pengujian Pecking Order Hypotesis, Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol 1, No. 3 (Desember 2001) : 1-26
- Margaretha, Farah. (2004). *Teori Dan Aplikasi Manajemen Keuangan; Investasi Dan Sumber Dana Jangka Pendek (Dilengkapi Dengan Penyelesaian Kasus)*. Jakarta: Grasindo.
- Martono; H, Agus. (2001). *Manajemen Keuangan*. Ketiga. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nadia Puspawarhani (2014) Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Struktur Aktiva Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan

- Pariwisata Dan Perhotelan Di Bei. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, Vol 3 No. 7 2014
- Ni Putu Devi Andrayani dan I Made Surya Negara Sudirman (2014) Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan *Tangibility Assets* Terhadap Struktur Modal. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, Vol 3 No. 5 (2014)
- Prabansari dan Kusuma. (2005). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta."
- Riyanto, Bambang. (2010). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Rr. Suprantiningrum (2011). Pengaruh Pertumbuhan Aktiva dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Perbankan. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen, Vol 24. No. 2 (Juli 2011), hal. 90
- www.ojk.co.id

DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI ACEH

Sri Mulyati, Yusriadi

Universitas Malikussaleh

Email: srimumulyati@gmail.com, yusriadi@gmail.com

Diterima: 08 Februari 2018; Direvisi: 14 Februari 2018; Disetujui: 22 Februari 2018

Abstract

This study aims to examine the effect of revenue-sharing on capital expenditures on the influence of revenue-sharing funds on district / municipal spending in Aceh. The population in this study is the Local Government Financial Statement obtained from the Regional Revenue Budget data in the form of data on revenue sharing, general allocation funds, and regional expenditure in 23 districts / cities in Aceh from 2013 until 2015 with a total population of 69 LGFS. By using multiple linear regression analysis method as data analysis method. The results of this study indicate that revenue sharing funds and general allocation funds have an effect simultaneously on local expenditures on District / City Government in Aceh. While partially, revenue sharing has significant effect to local expenditure, while general allocation fund also influences to district / city expenditure in Aceh.

Keywords: *Regional Expenditure, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di peroleh dari data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berupa data tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan belanja daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2013 s.d 2015 dengan total populasi sebanyak 69 LKPD. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Sedangkan secara parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum.

PENDAHULUAN

APBD yang mencakup pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Mardiasmo (2009: 63) menyatakan terdapat beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik yaitu: (a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (b) Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber.

Komposisi anggaran idealnya harusnya berbalik, di mana belanja langsung bisa lebih besar. Komposisi anggaran yang tidak ideal dapat membuat pemerintah daerah sulit untuk melaksanakan pembangunan karena kurangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal dalam anggaran belanja daerah,

pemerintah daerah juga mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU) pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang diperolehnya untuk membiayai belanja daerah di daerahnya.

Transfer dari Pemerintah pusat seringkali digunakan sebagai sumber pendanaan utama Pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda dilaporkan

di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Berdasarkan pada gambaran tersebut maka pemerintah daerah dimungkinkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan melalui APBD yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal ini berarti peran pemerintah daerah dalam mempengaruhi kemiskinan melalui kebijakan APBD diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada dengan cara mengalokasikan anggaran yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan permasalahan tersebut

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya

pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain. Belanja daerah dibagi menjadi belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer dan pengeluaran tidak tersangka.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) (Wahyuni & Adi, 2009). Berdasarkan UU PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan

sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelemat bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Penerimaan DBH pajak bersumber dari : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri (PPh WPOPND). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Wahyuni & Adi, 2009). Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Menurut UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam.

Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

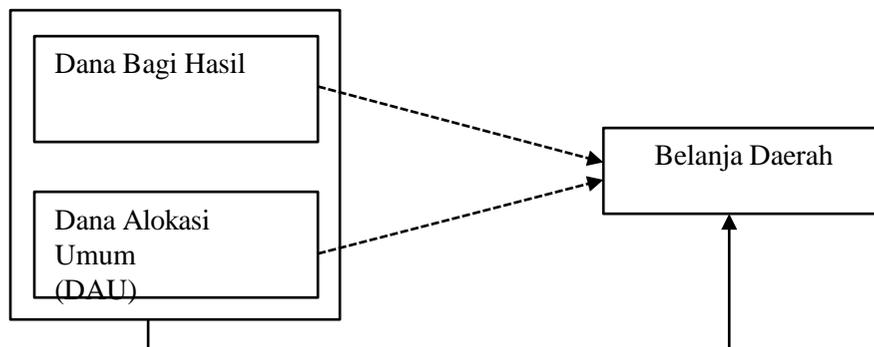
Kuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (Rahmawati, 2010).

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Dari penjelasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka skema kerangka pemikirannya dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2013 s.d 2015. Dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu dengan mengambil keseluruhan populasi.

Objek penelitian adalah APBD Kabupaten/Kota di Aceh.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti bersumber dari laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, yakni Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, serta belanja daerah yang diperoleh dari dari Dinas Keuangan Aceh. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data *cross section* dengan metode panel data, periode waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dari masing-masing data APBD Kabupaten/Kota yang akan dijadikan data.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan

penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya.

Menurut Mulyana dan Slamet (2006:134) DBH merupakan bagian daerah yang dihasilkan oleh daerah, baik penerimaan perpajakan, maupun sumber daya alam. Perubahan anggaran DBH menunjukkan adanya penyesuaian anggaran pemda terkait dengan tempat penerimaan DBH yang menjadi hak pemda. Penyesuaian atau revisi anggaran atas DBH terjadi karena adanya keputusan/ peraturan menteri keuangan (KMK atau PMK) yang menyatakan adanya revisi atau alokasi DBH untuk Kabupaten/ Kota. Pengukuran untuk variabel ini menggunakan selisih antara angka DBH dalam APBD Perubahan dengan angka DBH dalam APBD murni.

Tabel 1
Deskriptif Data Penelitian

| Variabel | N | Minimum | Maksimum | Mean | Std. Deviasi |
|----------|----|---------|----------|-------|--------------|
| DBH | 69 | 8,2 | 510,0 | 54,9 | 86,2 |
| DAU | 69 | 252,0 | 780,0 | 496,5 | 140,8 |
| BD | 69 | 343,0 | 1840,0 | 868,0 | 317,6 |

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh Anggaran Dana Bagi Hasil selama 3 tahun, nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 54,9 Milyar Rupiah, nilai minimum

sebesar 8,2 Milyar Rupiah untuk Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2013 sedangkan nilai maksimum untuk Dana Bagi Hasilnya sebesar 510 Milyar Rupiah

untuk Kabupaten Aceh Utara pada 2014. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan sebesar 86,2.

Variabel selanjutnya yaitu Dana Alokasi Umum diperoleh nilai rata-rata (*mean*) selama 3 tahun sebesar 496,5 Milyar Rupiah, dengan nilai minimumnya sebesar 252 Milyar Rupiah untuk Kabupaten Subulussalam tahun 2013, dan nilai maksimum sebesar 780 Milyar Rupiah diperoleh Kabupaten Aceh Bireuen pada tahun 2015. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan sebesar 140,8.

Anggaran Belanja Daerah pada semua Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

memperoleh rata-rata (*mean*) selama 3 tahun sebesar 868 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 343 Milyar Rupiah pada Kota Subulussalam di tahun 2013, dan nilai maksimum sebesar 1.840 Milyar Rupiah untuk Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2015.

Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan adalah sebesar 317,6.

Hasil dan PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda dari pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

| | |
|--|---------|
| Persamaan Regresi: $BD = -9,037 + 0,904DBH + 1,830 DAU + \epsilon$ | |
| R | = 0,958 |
| R ² | = 0,879 |

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar -9,037, artinya jika Dana Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dianggap konstan, maka Belanja Daerah adalah mempunyai nilai sebesar -9,037. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis yang

menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Metode analisis linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan dengan beberapa variabel independen dalam suatu model penelitian. Maka dilakukan uji signifikan terhadap nilai koefisien regresi yang diperoleh baik secara simultan maupun

secara parsial. Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil sebesar 0,904, artinya jika Dana Bagi Hasil meningkat 1% maka Belanja

Daerah akan meningkat sebesar 90,4%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Aceh mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan meningkat.

Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1,830, jika Dana Alokasi Umum meningkat 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 183%. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum sangat menunjang untuk anggaran Belanja Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Rona (2015) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Artinya bila dana Bagi Hasil meningkat Rp. 1 maka Belanja Daerah akan meningkat pula sebesar Rp. 0,904.

Hal tersebut bermakna bahwa Dana Bagi Hasil ikut meningkatkan Anggaran Belanja Daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DBH) untuk memberikan

pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Artinya bila Dana Alokasi Umum meningkat Rp. 1 maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar Rp. 1,830.

Diperoleh hubungan yang positif antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah. Hal ini bermakna bahwa pengalokasian anggaran Dana Alokasi Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah lebih ditujukan untuk alokasi anggaran Belanja Daerah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syukriy & Halim yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Sesuai juga

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marzalita (2014) yang menunjukkan bahwa perubahan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja barang dan jasa di Indonesia.

Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pengaruh yang dihasilkan kuat yaitu sebesar 0,879 atau 87,9% (>50%), hal tersebut juga sesuai dengan nilai derajat hubungan (korelasi) antara Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah yang diperoleh sebesar 0,938. Nilai tersebut bermakna bahwa hubungan antara Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan positif, searah dan sangat kuat terhadap Belanja Daerah.

Alasan terjadi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi karena faktor ekonomi, politik, dan sosial, namun pada umumnya karena

faktor financial dan kebutuhan fiskal. Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atas pengeluaran. Perubahan APBD menjadi sarana bagi legislatif dan eksekutif untuk merubah alokasi anggaran secara legal.

Perilaku oportunistik legislatif dan eksekutif saat perubahan APBD dapat mengakibatkan terjadinya misalokasi anggaran belanja pemerintah. Kecenderungan Pendapatan Asli Daerah yang selalu bertambah saat perubahan anggaran, membuka peluang bagi legislatif untuk merekomendasikan penambahan anggaran bagi program dan kegiatan yang menjadi preferensinya (Abdullah, 2013).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dougherty, et al. (2003) dimana Perubahan anggaran dilakukan agar lebih bermanfaat dalam pelaksanaan jangka panjang dalam siklus anggaran baik sebelum maupun dimasa yang akan datang, penyesuaian dilakukan dalam tahun anggaran berjalan karena adanya pertumbuhan pendapatan ekonomi yang memberi kontribusi terhadap peningkatan *surplus* terhadap penyesuaian terutama di bidang belanja modal. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) dimana Dana

Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil yang telah diuraikan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum untuk Belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh lebih besar dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil.

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi, Oktober. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Abdullah, Syukriy & Riza Rona. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. Makalah

- dipresentasikan pada Konferensi Regional Akuntansi (KRA) ke-II, IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan, Malang, 29-30 April 2015.
- Cornia, Gray C, Ray D. Nelson & Andera Wilko. (2004). Fiskal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review*. Vol.64, No. 2 (Mar – Apr): 164 – 179.
- Dougherty, Michael John, Kenneth A. Klase & Soo Geun Song. (2003). Managerial Necessity and The Art of Creating Surpluses: The Budget-Execution Process in West Virginia Cities. *Public Administration Review*. Vol. 63, No. 4 (Jul – Aug): 484 – 497.
- Forrester, Jhon P. & Daniel R. Mullins. (1992). Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Proseses. *Public Administration Review*. Vol. 52 No. 5 (Sept – Oct): 467 – 473.
- Halim, Abdul . 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Rahmawati, Nur Indah. (2010). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)”. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Tahun (2004) tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun (2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah
- Republik Indonesia, Undang – Undang Perpajakan No. 17 Tahun (2000), tentang Pajak Penghasilan, Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama, Citra Umbara, Bandung, 2000.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Desentralisasi Fiskal
- Sekaran, Uma. (2006). Research Methods for Business. Buku Satu, Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Sumarni, Saptaningsih. (2008). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, MANAJEMEN LABA DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Maryati Rahayu, Bida Sari

Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta

Email: ayu.mr77@gmail.com, sari_bida@yahoo.co.id

Diterima: 4 Januari 2018; Direvisi: 8 Januari 2018; Disetujui: 18 Januari 2018

Abstract

The purpose of this study was to determine the influence of Institutional ownership, Management profit and leverage to the company performance by taking samples to manufacturing companies who registered at the Indonesian stock exchange the period 2012 - 2015 as many as 19 company with the sample collection in purposive sampling. Data processed using spss.20. Based on sample t test known Institutional ownership and Management profit will not affect to the company performance in the proxy with cash flow return on asset, only leverage in the proxy with debt to equity ratio that influence the company performance. Based on ANOVA test, there is influence between institutional ownership, Management profit and debt to equity ratio to the company performance simultaneously. The value of the determination adjusted r square of 15,5 %. While the rest 84,5 % can be explained by other factors that is not incorporated into research

Keywords: *Institutional ownership, management profit, leverage, the company performance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba dan Leverage terhadap Kinerja Perusahaan dengan mengambil sampel pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2015 sebanyak 19 perusahaan dengan pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Data diolah menggunakan Program SPSS.20. Berdasarkan Uji t diketahui bahwa Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan *cash flow return on*, hanya Leverage yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* yang berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan Uji ANOVA terdapat pengaruh antara Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba dan *Debt to Equity Ratio* terhadap Kinerja Keuangan secara bersama-sama. Nilai koefisien determinasi Adjusted R² sebesar 15,5% sedangkan sisanya 84,5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

Kata Kunci: Kepemilikan institusional, manajemen laba, leverage, kinerja perusahaan

PENDAHULUAN

Dalam teori keagenan (*agency theory*) (Jensen dan Meckling, 1976), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Atmaja (2008) menyatakan “Hubungan keagenan atau *agency relationship* muncul ketika satu lebih individu (majikan) menggaji individu lain (agent atau karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agent atau karyawannya”.

Pihak Manajer sebagai pengelola perusahaan akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pihak pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri

informasi (*information asymmetric*) (Haris, 2004).

Kinerja perusahaan menurut Brandon dan Dyrina dalam Zulmiati (2012) merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, pemilik perusahaan dapat meningkatkan kepemilikan institusional, karena semakin besar nilai kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan sehingga pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditentukan.

Hasil penelitian Darwis (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Hapsoro (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Manajemen laba merupakan suatu cara penyajian laba dimana bertujuan untuk memaksimalkan utilitas manajemen dan atau meningkatkan nilai pasar melalui pemilihan kebijakan prosedur akuntansi oleh manajemen (Scott, 2006). Manajemen akan memilih metode tertentu

untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya.

Menurut Theresia (2005) manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, Menurut Ujiyantho (2007) Variabel *Manajemen Laba* tidak berpengaruh signifikan terhadap *cash flow return on assets*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Pae (1999), Feltham dan Pae (2000) dalam Gideon (2005), Theresia (2005) dan Gideon (2005). *Cash flow* menunjukkan hasil yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004).

Ada hal lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yaitu *leverage*. Ibarat alat pendongkrak, disatu sisi utang bisa membuat pertumbuhan suatu perusahaan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan mengandalkan modalnya sendiri. Namun, jika terlalu besar nilainya, dapat membuat kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak sehat. *Leverage* juga dapat meningkatkan risiko bisnis dan risiko keuangan perusahaan,

karena jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan merugikan keuntungan pemegang saham.

Menurut Ludijanto (2014) Variabel *debt to equity ratio* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan ROI dan ROE. Artinya bahwa apabila *debt to equity ratio* mengalami kenaikan maka akan disertai pula dengan kenaikan jumlah ROI dan ROE. Hasil analisis di atas mengindikasikan bahwa semakin tinggi DER menunjukkan perusahaan dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada investor bahwa perusahaan dapat memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan modal eksternal dalam mengembangkan perusahaan dengan adanya peningkatan ROI dan ROE.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut diatas, dirasakan penelitian ini masih layak untuk dilakukan penelitian kembali. Perbedaan dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas makatema ini menarik untuk diuji

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal

komparatif (*Causal-Comparative Research*) yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih, yang pada penelitian ini menjelaskan pengaruh likuiditas Kepemilikan Institusional, Manajemen laba dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian *ex pas facto* yaitu tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Ketiga variabel independen penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Manajemen laba dan *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio*. Sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan *Cash Flow of Return On Assets*.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Siregar dan Utama, 2005).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon, 2005).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Darwis menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Berdasarkan Penjelasan tersebut maka perhitungan Kepemilikan Institusional dapat dirumuskan, sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{JumlahsahamKI}}{\text{Jumlahsahamberedar}}$$

Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mungkin dilakukan untuk menarik minat para investor sehingga

perlu diperhatikan karena akan melibatkan potensi pelanggaran, kejahatan, dan konflik yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan

Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa definisi manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama intervensi manajemen laba terhadap laporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan *judgment*. Misalnya *judgment* yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan, seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, tanggung jawab untuk pensiun, pajak yang ditangguhkan, kerugian piutang dan penurunan nilai aset. Disamping itu manajer memiliki pilihan untuk metode akuntansi, seperti metode penyusutan dan metode biaya. Kedua, tujuan manajemen laba untuk menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini muncul karena ketika manajemen memiliki akses terhadap informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar.

Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba

yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang. Adapun perhitungan Manajemen laba dapat diukur sebagai berikut :

$$\text{Akrual Modal Kerja} = \Delta AL - \Delta HL - \Delta Kas$$

Leverage

Ketika memutuskan untuk mengembangkan potensinya, perusahaan akan membutuhkan modal yang cukup besar, dan modal tersebut dapat berasal dari utang maupun ekuitas. Utang memiliki dua keunggulan penting. Pertama, bunga yang dibayarkan dapat menjadi pengurangan pajak. Kedua, kreditor akan mendapatkan pengembalian dalam jumlah tetap, sehingga pemegang saham tidak harus membagi keuntungannya jika bisnis berjalan dengan sangat baik.

Menurut Kasmir (2012) *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayarkan seluruh kewajibannya (baik kewajiban jangka

pendek maupun jangka panjang). *Leverage Ratio* digunakan untuk mengukur seberapa besar dana yang *supply* oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan.

Berdasarkan para ahli, banyak rasio yang digunakan dalam perhitungan Leverage seperti *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Long Term Debt to Equity Ratio*. Namun dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *Debt to Equity Ratio*.

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

Rumusan untuk mencari *Debt to Equity Ratio* adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan suatu tolak ukur untuk menilai keberhasilan

manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu.

Menurut Moerdiyanto (2010), kinerja perusahaan tersebut merupakan hasil dari serangkaian proses bisnis dengan mengorbankan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun keuangan perusahaan. Meningkatnya kinerja perusahaan ditandai dengan gencarnya kegiatan perusahaan dalam menghasilkan laba sebesar-besarnya. Beda ukuran perusahaan, berbeda pula laba yang dihasilkan.

Menurut Munawir (2007) “Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan.”

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan.

Kinerja perusahaan yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu. Kinerja keuangan dalam penelitian ini dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Muh. Arief Ujiyantho diukur dengan

menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA), yang dirumuskan sebagai berikut:

$$CFROA = \frac{EBIT + Depresiasi}{TotalAktiva}$$

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015 yang telah mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut selama periode pengamatan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability Sampling*, dimana semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2010:122), dengan

tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan,

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam Industri Manufaktur.

Perusahaan-perusahaan yang memiliki data laporan keuangan yang dipublikasikan lengkap dan merupakan data laporan keuangan auditan.

Perusahaan yang tidak mengalami delisting di BEI pada periode penelitian.

Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan adalah rupiah.

Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional selama periode penelitian.

Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Dari 138 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 21 perusahaan tidak menggunakan mata uang rupiah, 12 perusahaan tidak lengkap laporan keuangannya, 24 perusahaan yang merugi, 57 Perusahaan yang tidak memiliki aset minimum 2 Triliun selama periode penelitian, dan 5 perusahaan yang

delestering, sehingga hanya diperoleh 19 perusahaan yang dapat dijadikan sebagai sampel penelitian

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran terhadap data-data pada variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan deviasi standar. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini

Tabel 1
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| KI | 76 | ,3293 | ,9824 | ,654701 | ,1948954 |
| MLB | 76 | ,0003 | ,4782 | ,058354 | ,0800712 |
| DER | 76 | ,0853 | 2,2460 | ,791454 | ,5593668 |
| CFROA | 76 | ,0176 | ,5370 | ,166622 | ,1029951 |
| Valid N (listwise) | 76 | | | | |

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00

Uji Normalitas Data

Tabel 2
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| N | | 76 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | ,09467882 |
| Most Extreme Differences | Absolute Positive | ,154 |
| | Negative | -,102 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1,344 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,054 |

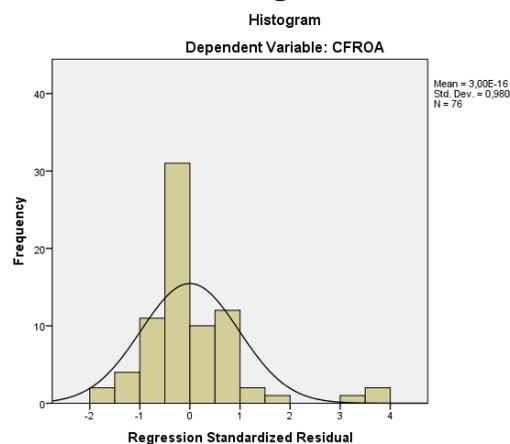
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,054 berarti diatas 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data telah berdistribusi secara normal

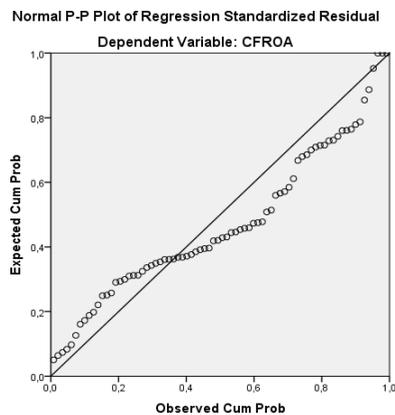
Grafik 1
Uji Normalitas Data dengan Grafik Histogram



Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00

Hasil tampilan grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang tidak menceng ke kiri maupun ke kanan berarti nilai residualnya menunjukkan pola distribusi normal. Kemudian hasil dari uji normalitas dengan grafik P-P Plot dapat dilihat pada Grafik 2.

Grafik 2
Uji Normalitas Data dengan Grafik P-P Plot



Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00

Hasil tampilan grafik normal plot terlihat titik-titik tersebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 3
Uji t (Uji Parsial)
 Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | ,188 | ,052 | | 3,645 | ,001 |
| 1 KI | ,048 | ,063 | ,091 | ,769 | ,444 |
| MLB | -,024 | ,145 | -,018 | -,162 | ,872 |
| DER | -,065 | ,022 | -,354 | -2,954 | ,004 |

a. Dependent Variable: CFROA

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00

Berdasarkan tabel uji t diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Variabel independen Kepemilikan Institusional (KI) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,444, lebih besardari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho

diterima dan Ha ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara Kepemilikan Institusional dengan Kinerja Keuangan.

Variabel independen Manajemen Laba (MLB) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,872 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara Manajemen Laba (MLB) dengan Kinerja Keuangan.

Variabel independen DER diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara *Debt to Equity Ratio (DER)* dengan Kinerja Keuangan.

Uji F (Anova)

Tabel 4
 ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Regressi on | ,123 | 3 | ,041 | 4,401 | ,007 ^b |
| Residual | ,672 | 72 | ,009 | | |
| Total | ,796 | 75 | | | |

a. Dependent Variable: CFROA

b. Predictors: (Constant), DER, MLB, KI

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima atau dapat dikatakan bahwa Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba dan *Debt*

to *Equity Ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Uji Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

| Model | R | RSquare | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|---------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,394 ^a | ,155 | ,120 | ,0966312 |

a. Predictors: (Constant), DER, MLB, KI

b. Dependent Variable: CFROA

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00

Dari hasil pengolahan Regresi Linear diketahui bahwa koefisien determinasi Adjusted R² = 0,155, yang artinya secara bersama-sama *Kepemilikan Institusional*, *Manajemen Laba* dan *Debt to Equity Ratio* mempengaruhi Kinerja Keuangan sebesar 15,5% sedangkan sisanya 84,5% (100% – 15,5%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini ditolak artinya tidak terdapat pengaruh *Kepemilikan Institusional* terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai signifikansi sebesar 0,444, lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsoro (2008), namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Fransisca Widyati (2013) dan Darwis

(2009) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

H2 dalam penelitian ini ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh *Manajemen Laba (MLB)* terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai signifikansi sebesar 0,872, lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Arief Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka (2007).

H3 dalam penelitian ini diterima, artinya terdapat pengaruh *Debt to Equity Ratio (DER)* terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0,004, lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shella Ekawati Ludijanto (2014)

H4 dalam penelitian ini diterima, artinya terdapat pengaruh *Kepemilikan Institusional*, *Manajemen Laba* dan *Debt to Equity Ratio* terhadap Kinerja Keuangan secara bersama-sama dengan nilai signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0,007, lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka model regresi yang diperoleh dalam penelitian ini terbukti dapat diterima dan layak digunakan untuk peramalan.

REFERENSI

- Atmaja, L.S., Ph.D (2008). Teori dan Praktik Manajemen Keuangan. Edisi 1. Yogyakarta.
- Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. (2006). Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance.
<http://papers.ssrn.com/>
- Darwis, Herman.(2009). Corporate Governace Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Vol. 13, No. 3, September 2009, hal. 418-430.
- Fachrudin, Khaira Amalia (2011). Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan *Agency Cost* Terhadap Kinerja Perusahaan. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Jurnal Akuntansi dan Keuangan, VOL. 13, NO. 1, MEI 2011: 37-46
- Gideon SB Boediono. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governace dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
- Gunarsih, Tri (2002). “Struktur Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan: Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Strategi Diversifikasi Terhadap Kinerja Perusahaan.” Disertasi Doktor UGM Yogyakarta
- Hapsoro, Dody. (2008). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 19, No. 3, Desember 2008.
- Healy, P., Wahlen, J. (1999). A Review of The Earnings Management Literture and Its Implications for Standard Setting. Accounting Horizons 13, p.365-383.
- Kasmir, (2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kieso, D.E, Weygant J & Terry, (2008). Akuntansi Intermediate. Jilid 2.Edisi 12. Jakarta: Erlangga.

- Muh. Arief Ujiyantho, Bambang Agus Pramuka. (2007). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. SNA X. Unhas Makasar
- Munawir. (2007). Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Pearce II, J.A dan Robinson Jr, R.B (2008). Manajemen strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian (Edisi kesepuluh). Jakarta: Salemba Empat.
- Shella Ekawati Ludijanto, Siti Ragil Handayani, Raden Rustam Hidayat. (2014). Pengaruh Analisis Leverage terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 8 No. 1. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang
- Siregar, Sylvia Veronica dan Utama, Sidharta. (2005). Pengaruh Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earning Management). Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo 15-16 September 2005
- Suad Husnan. (2000). Corporate Governance di Indonesia: Pengamatan terhadap Sektor Corporate dan keuangan. Program magister hukum. UGM yogyakarta, (2000).
- Theresia, Dwi Hastuti (2005). Hubungan Antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan. SNA VIII . Solo.
- Widyati, Maria Fransisca. (2013). Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institutional terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Ilmu Manajemen | Volume 1 Nomor 1 Januari 2013
- <http://www.idx.co.id/>

PERAN AUDIT INTERNAL DALAM *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK SYARIAH DI INDONESIA

Rito, Fathimah Azzahra

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: doankrito@gmail.com

Abstract

This paper aims to discover the implementation of GCG in Islamic banks', structural analysis of Islamic banks' internal audit, and the role of internal audit in the GCG implementation of Indonesia's Islamic banks. This type of study is qualitative descriptive method by using literature studies. The result shows that banks, which are the top banks in term of asset; BSM, BMI, BNIS and BRIS, have implemented GCG really well. The structure of internal audit in the banks is effective by placing internal audit under the main director/commisaris/others. Generally, the role of internal audit in the banks are; investigating work unit, monitoring the audit findings, evaluating the audit finding, reporting any non-sharia compliance activities, and doing internal control either by whistleblowing system or SPI in each banks according to their needs.

Keywords: *Role of Internal Audit, Good Corporate Governance, Islamic Bank.*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* Bank Syariah, analisis struktur Audit Internal Bank Syariah, dan untuk mengetahui peran Audit Internal dalam menerapkan *Good Coporate Governance* Bank Syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data studi literatur pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Bank Syariah dengan aset terbesar yaitu BSM, BMI, BNIS dan BRIS sudah menerapkan GCG dengan baik. Struktur Audit Internal pada Bank Syariah tersebut sudah cukup efektif dengan menempatkan posisi Audit Internal berada dibawah Direktur Utama/Komisaris/lainnya. Peran Audit Internal pada bank-bank tersebut secara umum adalah melakukan pemeriksaan pada unit kerja, *monitoring* terhadap temuan hasil audit, mengevaluasi hasil temuan audit, melaporkan terkait pelanggaran/kecurangan terhadap aspek syariah, dan melakukan pengendalian internal dengan *whistleblowing system* maupun SPI dimasing-masing Bank sesuai dengan kebutuhan tiap Bank Syariah tersebut.

Kata Kunci: Peran Audit Internal, *Good Corporate Governance*, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan dipengaruhi oleh suatu tata kelola yang baik. Wardoyo dan Lena menyatakan (2010) *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.

GCG merupakan sistem mengenai bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. *GCG* antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. *GCG* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti Kreditor, Pemasok, Asosiasi Bisnis, Konsumen, Karyawan, Pemerintah, serta Masyarakat Umum (Wardoyo & Lena, 2010).

Pelaksanaan *GCG* pada sektor perbankan sangat diperlukan untuk

membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Selain itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal terhadap praktik *GCG* pada lembaga perbankan (Akbar, 2013).

Setiap Bank harus memastikan bahwa asas *GCG* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran bank. Asas *GCG* yang harus dipastikan pelaksanaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Asas *GCG* diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha bank dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

Untuk meningkatkan kinerjanya, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *GCG*. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang

berlaku umum pada industri perbankan (BI, 2013).

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*)
5. Kewajaran (*fairness*)

Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala. Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yang terdapat dalam Surat Edaran BI meliputi 11 faktor (BI, 2013), yaitu:

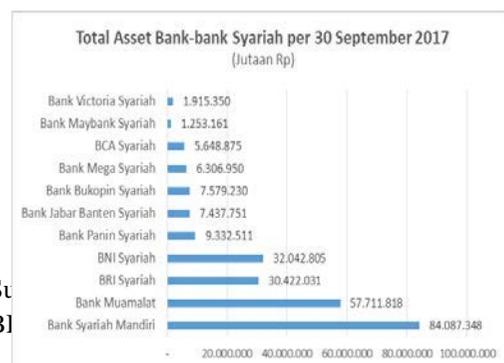
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan

pelaksanaan GCG dan pelaporan internal;

11. Rencana strategis Bank.

Salah satu bentuk perkembangan perbankan di Indonesia adalah lahirnya perbankan syariah. Bank Syariah, walaupun secara jumlah relatif sedikit, setidaknya keberadaannya dianggap mampu untuk bersaing dengan perbankan konvensional.

Beberapa bank syariah di Indonesia memiliki asset terbesar seperti yang pernah dilansir oleh Bank Indonesia pada September 2017, bahwa asset terbesar ditempati oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) senilai Rp 84,087 triliun. Disusul Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan total asset sebesar Rp57,711 triliun. Bank BNI Syariah (BNIS) membukukan asset senilai Rp 32,042 triliun, dan Bank BRI Syariah (BRIS) dengan total aset sebesar Rp 30,422 triliun. (lihat tabel 1)



Pengoperasian bank syariah tersebut tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya didominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000 (Maradita, 2014). Menurut Maradita (2014) mengutip dari Wibowo dan Widodo (2005) krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktik *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan. Pelaksanakan prinsip GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat terciptanya sistem perbankan yang dapat dikelola dengan baik. (BI, 2009).

Pelaksanaan GCG dimaksudkan sebagai wujud komitmen Bank Syariah Mandiri terhadap Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG maka BSM secara rutin telah melaksanakan *self assessment*. Pelaksanaan *self*

assessment telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Pada laporan tahunan yang berisi tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan, keempat Bank tersebut mendapat peringkat berbeda-beda menurut hasil penilaian *self assessment* masing-masing Bank. BSM pada semester I tahun 2016 dengan hasil penilaian 1 atau kategori predikat “**Sangat Baik**”. (Bank Syariah Mandiri, 2016). BMI mendapat peringkat 2 atau masuk dalam kategori “**Baik**” (Bank Muamalat Indonesia, 2016). BNIS pada akhir semester 2 tahun 2016 mendapatkan peringkat 2 yaitu kategori “**Baik**”. Dan BRIS mendapat peringkat 2 atau masuk dalam kategori “**Baik**” (BRI Syariah, 2016).

Peran Audit Internal yang independen sangat penting dalam di penerapan GCG perusahaan termasuk di bank syariah, dimana anggota audit internal tidak mempunyai saham, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris dan pemegang saham utama perusahaan tersebut, dan tidak memiliki hubungan

usaha baik langsung maupun tidak langsung. GCG juga menuntut sejauh mana Auditor Internal dapat berperan dengan baik untuk mewujudkannya pada sektor publik maupun pada sektor swasta (Wardoyo & Lena, 2010).

Audit Internal dituntut untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Auditor Internal haruslah seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan, karena Audit Internal lebih berperan untuk mengawasi kegiatan manajemen, kompetensi di bidang audit merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang akan melakukan tugasnya di bidang audit. Selain pengetahuan di bidang audit, Auditor diharapkan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam substansi yang diaudit karena itulah kompetensi anggota Audit Internal sangat diperlukan untuk menjembatani kebutuhan Dewan Komisaris akan peran auditing dan pengendalian internal yang efektif dengan kendala daya serap terhadap masalah-masalah yang teknis dalam akuntansi, *auditing*

dan pengendalian internal (Wardoyo & Lena, 2010).

Penelitian ini terbatas pada Bank Syariah di Indonesia berdasarkan total asset terbesar periode 30 September 2017 dan tidak membandingkan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data studi literatur pustaka (*library research*) dan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen dan literatur lainnya (Sugiyono, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip GCG

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci dapat bertahannya perusahaan dalam menghadapi persaingan. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan *tools* untuk menumbuhkan integritas perusahaan

dan menjaga kepercayaan dari *stakeholders* (Bank Syariah Mandiri, 2016).

Penerapan prinsip GCG diperlukan di setiap Organisasi Perusahaan maupun Bank Syariah, hal tersebut merupakan wujud komitmen Bank Syariah dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata kepada OJK tentang pelaksanaan GCG (Bank Muamalat Indonesia, 2016).

Komitmen BNI Syariah terhadap implementasi GCG dapat di lihat dari kesungguhan dalam melakukan penyempurnaan struktur dan proses

implementasi GCG secara berkelanjutan, dengan prinsip selalu ada ruang untuk perbaikan. BNI Syariah meyakini bisnis yang dijalankan dengan kesempurnaan implementasi GCG (*GCG Excellence*) akan lebih memungkinkan untuk tetap kokoh dan sustain dalam jangka panjang (Laporan GCG BNI Syariah, 2016).

Berikut tabel penerapan prinsip GCG Bank Syariah dengan kriteria peringkat aset terbesar:

| Prinsip GCG : Transparansi/ <i>Transparency</i> | |
|---|---|
| BSM | Bank Syariah Mandiri tidak menjelaskan secara rinci prinsip-prinsip GCG. |
| BMI | Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan prinsip Transparansi, yaitu keterbukaan dalam unsur pengungkapan (<i>disclosure</i>) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalil yang dipakai dalam prinsip ini adalah QS. An-Nisa : 58. Kebijakan BMI dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap <i>stakeholders</i> yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut. |
| BNIS | Berdasarkan prinsip syariah yang |

| | | | |
|--|---|------|--|
| | ditegaskan dalam surat Al Baqarah/2:282“....Dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...” dan berdasarkan hadits yang menyatakan “.....barang siapa melakukan ghisyy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan. | | QS. Al-Fatir: 28, QS. Az-Zumar: 9 dan QS. Al-Mujaadilah: 11. |
| BRIS | BRI Syariah telah menerapkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini menuntut bank untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap <i>stakeholders</i> -nya. | BNIS | Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam surat Al Isra/17:84 yang artinya “Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian”. Dan dalam ayat 36 yang artinya “....Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan mintai pertanggungjawaban”. Tanggung jawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermati nanti, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Isra/17:14 yang artinya “Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawabanmu). Cukuplah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri”. |
| Prinsip GCG : Akuntabilitas/ <i>Accountability</i> | | | |
| BSM | | | |
| BMI | BMI telah melaksanakan prinsip Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara pertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bisnis BMI harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan. Berlandaskan dalil | BRIS | BRI Syariah telah menerapkan prinsip Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Penerapan prinsip ini secara efektif menyebabkan kejelasan fungsi, hak, |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | keajiban dan wewenang serta tanggung jawab di antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan jajaran yang ada di bawahnya. | | terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagaimana firmanNya dalam surat An Nisa/4:69 “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada Ulil amri diantara kamu...”. Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (<i>good corporate citizen</i>). |
| Prinsip GCG : Pertanggungjawaban/ <i>Responsibility</i> | | | |
| BSM | | | |
| BMI | <p>BMI telah melaksanakan prinsip Pertanggungjawaban, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.</p> <p>Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/<i>good corporate citizen</i>.</p> <p>BMI dan Jajaran BMI harus selalu mengingat kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan. Prinsip tersebut berlandaskan dalil QS. Al-Muddatsir: 38.</p> | BRIS | <p>BRI Syariah menerapkan prinsip Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.</p> |
| | Prinsip GCG : Profesional/ <i>Professional</i> | | |
| BSM | | | |
| BNIS | Dalam hubungannya dengan prinsip responsibilitas (pertanggungjawaban), pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundang undangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung jawab | BMI | <p>BMI telah melaksanakan prinsip Profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (<i>independen</i>), bebas dari benturan kepentingan serta</p> |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| | <p>memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BMI. Berlandaskan dengan hadist <i>“Barangsiapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka”</i> (HR Abu Daud) <i>“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional (itqon)”</i>(HR Albany)</p> | | <p>untuk mengembangkan dan memajukan bank syariah.</p> |
| <p>BNIS</p> | <p>Dalam hubungannya dengan prinsip independensi bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (ulul al bab) yang dalam Al Qur’an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantaranya adalah <i>“mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)”</i> (Az Zumar/39:18)</p> | <p>Prinsip GCG : Kewajaran/<i>Fairness</i></p> | |
| <p>BRIS</p> | <p>BRI Syariah menerapkan prinsip Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi</p> | <p>BSM</p> | |
| | | <p>BMI</p> | <p>BMI telah melaksanakan prinsip Kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan kesempatan yang samasesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BMI dan segenap Jajaran BMI bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: a. BMI menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (<i>equal treatment</i>) di dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholders</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. BMI menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>) akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip tersebut berlandaskan dalil QS. An-Nahl: 90 dan An-Nisa: 135.</p> |

| | |
|------|--|
| BNIS | <p>Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah/5:8, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan”.</p> <p><i>Fairness</i> atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis.</p> |
| BRIS | <p>BRI Syariah menerapkan prinsip Kewajaran, yaitu kesetaraan dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholders</i> berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |

Sumber : Annual Report BRI Syariah (2016), Laporan GCG BNI Syariah (2016), Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia (2016) & Laporan Pelaksanaan GCG Bank Syariah Mandiri (2016).

Implementasi Penerapan GCG

BSM telah menerapkan prinsip GCG, namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut. BSM menginternalisasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG kedalam sistem dan

prosedur kerja serta perilaku jajaran BSM sehingga prinsip-prinsip GCG benar-benar menjadi sebuah budaya di BSM. Implementasi prinsip-prinsip GCG pada BSM diharapkan mampu menjadi pendukung dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai perusahaan (Bank Syariah Mandiri, 2016).

Menurut Laporan Pelaksanaan GCG BSM (2016) BSM juga mengikuti program *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute Corporate Governance (IICG)*.

BMI telah melaksanakan prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara Islami (Syariah) dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku di perbankan nasional maupun internasional serta sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat. Sebagai pelopor Bank Syariah di Indonesia, selain melaksanakan ke 5 prinsip tersebut, BMI menambahkan satu aspek yaitu sikap kepedulian (*social awareness*)

sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)(Bank Muamalat Indonesia, 2016). BMI menjadikan ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan untuk penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Implementasi penerapan GCG di BNI Syariah yaitu untuk prinsip **transparansi** ditunjukkan melalui :

1. Memiliki sekretaris perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memastikan informasi perusahaan yang relevan telah tersampaikan kepada pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan masyarakat.
2. Memiliki website resmi perusahaan yang selalu diperbarui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan oleh badan regulator.
3. Senantiasa keterbukaan mengedepankan dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan.
4. Mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham

pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

5. Senantiasa menyajikan dan menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.

Komitmen implementasi penerapan GCG di BNI Syariah untuk prinsip akuntabilitas tercermin melalui :

1. Memiliki pedoman atau kebijakan yang menjadi pegangan bagi setiap organ perusahaan dan semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Menetapkan rincian dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi perusahaan.
3. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan

tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

4. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
5. Menyiapkan rencana jangka panjang perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan serta rencana kerja lainnya.
6. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system)

Komitmen implementasi penerapan GCG di BNI Syariah untuk prinsip tanggung jawab terwujud melalui :

1. Senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
2. Memiliki sistem teknologi informasi internal yaitu electronic corporate guideline yang menjadi panduan bagi pegawai mengenai kebijakan internal BNI Syariah.
3. Memiliki divisi internal audit, selain itu bank memiliki satuan kerja kepatutan yang berfungsi sebagai second line of defense (ex ante) yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

4. Memiliki divisi kepatuhan yang memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi OJK dan badan regulator lain.

Komitmen implementasi penerapan GCG di BNI Syariah untuk prinsip profesionalisme terwujud melalui :

1. Komposisi Direksi, Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga samapai dengan derajat kedua.
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris independen. Direktur Utama maupun direktur lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.
3. Telah memiliki aturan mengenai benturan kepentingan yang di atur di dalam kode etik insan BNI Syariah.

Komitmen implementasi penerapan GCG di BNI Syariah untuk prinsip kewajaran & kesetaraan terwujud melalui :

1. Memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan

asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).

2. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan melalui mekanisme RUPS (bagi pemegang saham) serta mekanisme lainnya seperti surat menyurat ke alamat perusahaan gedung tempo pavilion I lt 3-6, jl. HR Rasuna Said Kav. 10. 11, Jakarta Selatan 12950 dan email : clean@bnisyariah.co.id.

BRIS juga telah menerapkan ke 5 prinsip GCG. BRIS telah melakukan langkah-langkah evaluasi baik tingkat kesehatan Bank maupun perbaikan aktivitas tata kelola yang meliputi kelengkapan struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*), efisiensi proses tata kelola (*governance process*) dan kualitas hasil tata kelola (*governance outcome*)(BRI Syariah, 2016).

Menurut Laporan Pelaksanaan GCG BRIS (2016) pelaksanaan GCG yang konsisten akan memberikan manfaat antara lain:

- a. Melindungi kepentingan *stakeholders*
- b. Mengarahkan Bank BRIS menuju keseimbangan kekuatan kewenangan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha (*going concern*) dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*
- c. Memberikan arahan strategis dalam mendukung tercapainya Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan.
- d. Menghindarkan timbulnya berbagai macam risiko, yang tidak terbatas pada risiko kredit dan risiko reputasi
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah dan nilai etika yang berlaku pada industri perbankan syariah.

Peran Audit Internal

Audit Internal merupakan suatu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Pada setiap Bank Syariah kebutuhan akan Audit Internal berbeda-beda tentunya sesuai dengan kebijakan Bank Syariah tersebut.

Berikut peran Audit Internal pada setiap Bank Syariah dengan kriteria peringkat aset terbesar:

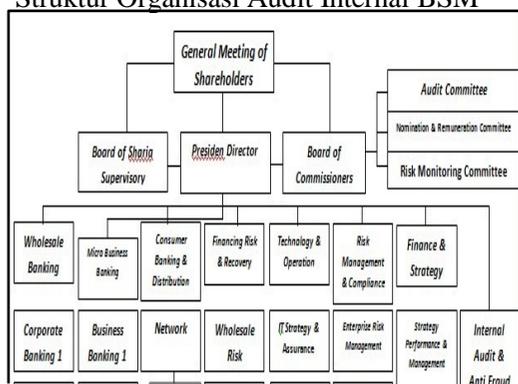
| Peran Audit Internal | |
|----------------------|--|
| BSM | Audit Internal memiliki peran dan fungsi untuk mengawal jalannya bisnis agar tetap dalam koridor pengendalian internal yang efektif dan efisien, pengelolaan risiko yang kuat dan tata kelola perusahaan yang baik. Audit Internal membuat analisa dan memberikan rekomendasi melalui pemberian jasa <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> . |
| BMI | Kegiatan <i>assurance</i> (menjamin) dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kegiatan organisasi/perusahaan. |
| BNIS | Menurut Laporan GCG Tahun 2016, BNIS tidak mencantumkan definisi audit internal. |
| BRIS | Menurut Laporan Keuangan Tahunan, BRIS tidak mencantumkan definisi audit internal. |

Sumber : Laporan Pelaksanaan GCG BSM (2016), Laporan Tahunan BMI (2016), Laporan GCG BNIS (2016) dan Laporan Keuangan Tahunan BRIS (2016)

Struktur Organisasi Audit Internal

Struktur organisasi Audit Internal memiliki alternatif-alternatif posisi yaitu berada di bawah Dewan Komisaris, di bawah Direktur Utama dan di bawah Kepala Bagian Keuangan.

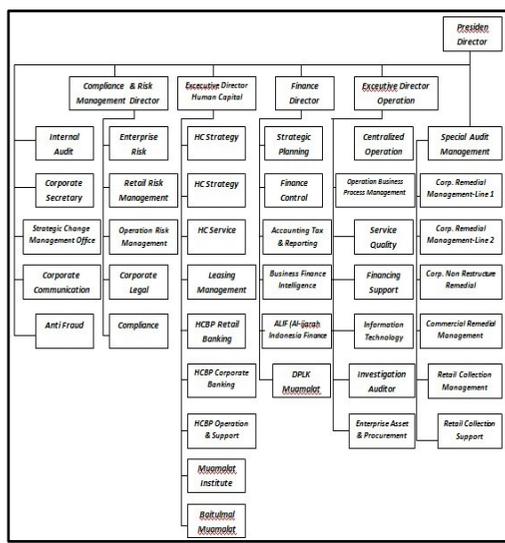
Struktur Organisasi Audit Internal BSM



Struktur Organisasi Audit Internal BSM (Sumber : (Bank Syariah Mandiri, 2016))

Posisi Audit Internal BSM berada dibawah *Presiden Director*/Direktur Utama. Audit Internal bertanggung jawab pada Direktur Utama. Sistem ini dinilai cukup efektif karena lingkup kerja Audit Internal menjadi lebih luas. Namun sistem ini jarang digunakan mengingat Direktur Utama terlalu sibuk dengan tugas-tugas sehingga tidak sempat untuk mempelajari laporan yang dibuat Audit Internal.

Posisi Audit Internal BSM tidak sesuai dengan struktur organisasi



perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG bahwa posisi Audit Internal seharusnya dibawah oleh Komite Audit yang berada dibawah Dewan Komisaris dan sejajar dengan Direktur Utama. Posisi Audit Internal yang berada dibawah Dewan Komisaris membuat posisi Audit Internal semakin kuat.

Struktur Organisasi Audit Internal BMI
 Sumber : (Bank Muamalat Indonesia, 2016)

Posisi Audit Internal BMI juga berada langsung dibawah Direktur Utama. Menurut Laporan Tahunan BMI (2016) Divisi Audit Internal BMI memiliki struktur organisasi yang sudah menyesuaikan dengan kompleksitas Bank.

Posisi Audit Internal BMI yang berada dibawah Direktur Utama sudah cukup efektif. Namun, posisi Audit Internal masih sejajar dengan Direktur lain. Secara hierarki posisi tersebut dapat mempengaruhi ruang lingkup pemeriksaan dan independensi Audit Internal. Posisi tersebut juga tidak sesuai dengan struktur organisasi

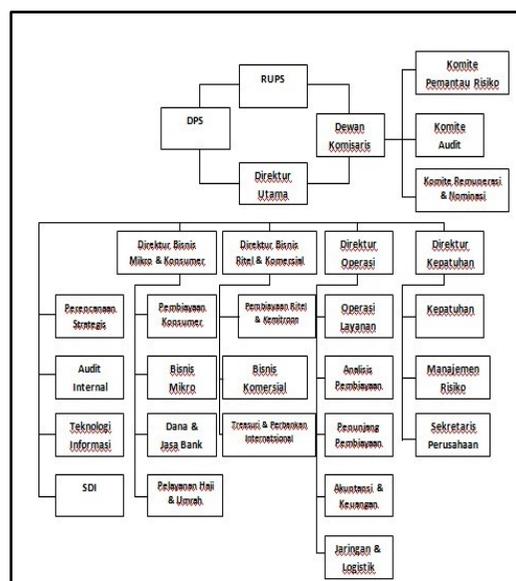
perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG.

Dalam laporan GCG BNI Syariah tahun 2016, struktur organisasi internal audit tidak ada. Di laporan tertulis bahwa Fungsi Audit Internal dijalankan oleh Internal Audit Division (IAD) sebuah unit setingkat divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Berdasarkan Ketetapan Organisasi No. ORG/11/III No. 2013 tanggal 4 April 2013, struktur dan kedudukan IAD PT Bank BNI Syariah sebagai berikut :

1. Pemimpin Divisi Audit
2. Internal Audit Charter
3. Branch Internal Controller dan Head Office Internal Controller.

Pemimpin Divisi Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama



atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Organisasi Audit Internal BRIS
Sumber : (BRI Syariah, 2016)

Posisi Audit Internal BRIS juga berada dibawah Direktur Utama dan sejajar dengan posisi Direktur lain. Posisi tersebut juga dapat mempengaruhi ruang lingkup pemeriksaan dan independensi Audit Internal.

Struktur organisasi Audit Internal di BRIS juga tidak sesuai dengan struktur organisasi perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG.

Audit Internal Dalam Pelaksanaan GCG

Audit Internal merupakan salah satu unsur dari GCG yang ada di sebuah perusahaan maupun Bank. Dalam penerapan GCG di setiap Bank Syariah tentulah peran Audit Internal diperlukan.

Setiap Bank mempunyai peran Audit Internal yang berbeda-beda. Termasuk Bank Syariah, peran Audit Internal pada Bank Syariah juga diharapkan mampu menjalankan peranannya sesuai dengan yang

diharapkan oleh *stakeholder* serta visi dan misi perusahaan.

Pelaksanaan Audit Internal BSM pada 2016 memfokuskan pada 4 area yaitu: Evaluasi Produk, *Review Fungsi Pendukung Bisnis*, Evaluasi *Branching Strategy* dan Audit Operasional atas *Business Unit*. Tahun 2016, Audit Internal BSM mengangkat tema pelaksanaan Audit Internal “*Leveraging Business Partner to Improve Internal Control, Governance and Risk Maturity*” sebagai spirit dalam memperkuat fungsi pengendalian internal di setiap lini bisnis (Bank Syariah Mandiri, 2016).

BSM melakukan berbagai cara untuk pelaksanaan Audit Internal dalam rangka menerapkan GCG. BSM melakukan 3 pelaksanaan audit yaitu : Audit Rutin, Audit Tematik, dan Audit Khusus serta pendeteksian dini atas setiap tindakan penyimpangan melalui Whistleblowing System.

Audit Internal BMI memiliki tugas dan tanggungjawabnya terhadap perusahaan guna mendukung pelaksanaan GCG. Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal dicantumkan dalam Audit Intern dan sesuai dengan Anggaran

Dasar BMI. Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal menurut Laporan Tahunan BMI bagian *Coporate Governance* (2016) sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan semua bidang kegiatan secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko.
- b. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan rencana audit yang disusun berdasarkan *Risk Based Audit* (RBA) yang telah disetujui oleh Direktur Utama.
- c. Melaksanakan audit dengan mengacu pedoman yang berlaku umum, seperti SPFAIB, Pedoman Audit Intern Bank Muamalat Indonesia.
- d. Melaksanakan pemeriksaan secara reguler pada unit kerja Divisi dan Cabang-Cabang oleh Auditor Kantor Pusat berdasarkan skala risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya sesuai rencana pemeriksaan.
- e. Melaksanakan pemeriksaan secara rutin cabang-cabang di Wilayah masing-masing oleh Area Auditor, khususnya cabang-cabang yang

tidak termasuk pada pemeriksaan reguler.

- f. Bekerja sama dengan Divisi Kepatuhan dalam hal pemeriksaan kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek syariah.
- g. Membuat Laporan Hasil Audit dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- h. Mengadakan pertemuan dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil temuan audit.
- i. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
- j. Menyiapkan laporan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris berupa laporan Pokok-Pokok Hasil Audit untuk disampaikan ke Bank Indonesia dan laporan lainnya sesuai kebutuhan.

Divisi Audit Internal BMI mengacu kepada pedoman yang berlaku SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum) dan laporan hasil audit setiap objek audit

disampaikan dalam laporan hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Auditee (Bank Muamalat Indonesia, 2016).

Internal Audit Division menjalankan audit tahunan meliputi :

1. Audit umum kantor cabang reguler
2. Audit umum kantor cabang mikro
3. Audit umum kantor pusat
4. Audit tindak lanjut
5. Audit tindak lanjut whistleblowing system
6. Audit tematik
7. Audit lainnya

Internal Audit Division menerapkan 2 jenis metode pemeriksaan terhadap kantor cabang yaitu dengan metode *offsite audit* (pemeriksaan di kantor pusat) dan *onsite audit* (pemeriksaan di lokasi kantor cabang).

Internal audit division menerapkan metoda *rating* terhadap hasil audit kantor cabang, sehingga memudahkan manajemen untuk mengukur tingkat risiko terhadap hasil audit di semua kantor cabang. Rating audit dihasilkan melalui pengukuran terhadap signifikansi dan jumlah

kelemahan yang terjadi selama pemeriksaan.

Menurut Laporan Tahunan BRIS (2016) pelaksanaan fungsi Audit Internal di BRIS dalam upaya mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik antara lain meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja, serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan-kelemahan yang memiliki potensi risiko.
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala (setiap semester) dan menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia.
3. Melakukan *monitoring* terhadap tindak lanjut temuan audit sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit.
4. Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat

berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran.

5. Memiliki tenaga-tenaga yang profesional dan berpengalaman di bidang Perbankan Syariah, Teknologi, Sumber Daya Manusia, *Treasury*, dan Akuntansi, sesuai dengan perkembangan bisnis dan organisasi.
6. Meningkatkan kualitas aparat Audit Intern secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi maupun nonsertifikasi.
7. Melakukan pelaporan kepada DPS terkait pelanggaran prinsip syariah.
8. Sebagai unit *Anti Fraud* yang melakukan investigasi atas *fraud* yang terjadi.

SIMPULAN

Penerapan GCG di Bank Syariah teratas aset terbesar sudah diterapkan dengan baik, terlihat dari penilaian *self assessment* yang dilakukan oleh masing-masing Bank dan masuk dalam kategori sangat baik maupun baik. BSM menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga menjadi sebuah budaya di BSM, BMI dan BNI Syariah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara Islami dan menambahkan satu

prinsip yaitu *social awareness* dan BRIS juga telah menerapkan kelima prinsip tersebut.

REFERENSI

- AAOIFI. (2015). *Accounting, Auditing And Governance Standards*. Manama: The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Akbar, I. (2013). Penerapan GCG pada Bank Syariah Mandiri. *Karya Ilmiah Februari 2014*.
- Akmal, D. A. (2006). *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Astuti, D. (2010). Peran Internal Audit dan Komite Audit Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 8, No. 1 April 2010*.
- Bank BNI Syariah. (2016). *Laporan GCG Tahun 2016*. Dipetik pada Desember 2016
- Bank Muamalat Indonesia. (2016). *Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG*. Dipetik pada

- Desember 2016, dari http://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/GCG_BMI_2016.pdf.
- Bank Syariah Mandiri. (2016). *Laporan Pelaksanaan GCG*. Dipetik pada Desember 2016, dari <http://www.syariahamandiri.co.id/wp-content/uploads/2016/05/LAPORAN-PELAKSANAAN-GCG-2016.pdf>.
- BI. (2009). Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.
- BI. (2017). Laporan Keuangan Publikasi Bulanan BI Per 30 September 2017. Dipetik pada September 2017, dari <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx>.
- BRI Syariah. (2016). *Laporan Pelaksanaan GCG*. Dipetik pada Desember 2016, dari <http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/Laporan%20GCG%20BRIS%202015.pdf>.
- Husaini (2009). *Komite Audit & Audit Internal: Integritas Pengawasan Korporasi*. UNPAD PRESS: ISBN: 978-979-3985-60-9.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Dipetik pada November 2016, dari http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik GCG pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Jurnal Ilmiah Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014*.
- Susilawati, C. D., & Soetjipta, F. H. (2013). Peranan Audit Intern Dalam Penerapan Good Corporate Governance Yang Efektif (Studi Kasus PT. XYZ, Bandung). *Jurnal Ilmiah Akuntansi ISSN:2086-4159 No. 10 Tahun ke-3 Bulan Mei-Agustus*.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syukron, A. (2013). *Good Corporate Governance Di Bank Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan*

99 AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Vol. 2, No. 1, Maret 2018
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat>
p-ISSN: 2549-5658 e-ISSN: 2549-7243
DOI: 10.22236/agregat_vol2/is1pp79-99
Hal 79-99

Hukum Islam, Vol. 3, No. 1 ISSN:
2088-6365.

Wardoyo, T.,S.& Lena. (2010).
Peranan Auditor Internal dalam
Menunjang Pelaksanaan *Good
Corporate Governance*(Studi
Kasus Pada PT Dirgantara
Indonesia). *Jurnal Ilmiah
Akuntansi* No. 3 Tahun ke-1.

Wulan, M. (2010). Peran Divisi Audit
Internal Dalam Penerapan *Good
Coorporate Governance* (Studi
Kasus Pada PT. Syarikat Takaful
Indonesia). *Tesis Fakultas
Ekonomi Program Studi
Akuntansi Universitas Indonesia*.

PROYEKSI POTENSI FISKAL DKI JAKARTA 2018-2022

Yurianto

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: yurianto@uhamka.ac.id

Diterima: 26 Januari 2018; Direvisi: 28 Januari 2018; Disetujui: 11 Februari 2018

Abstract

The purpose of this study was to determine the fiscal potency of DKI Jakarta on 2018-2022 which cover Total Owned Resource Revenue, Fiscal Capacity, Total Revenue, Fiscal Gap, Economic Growth, Total Expenditure and Total Gross Domestic Regional Product of DKI Jakarta. This study use quantitative approach to obtain optimal results. This approach use simultaneously equation model. Simultaneously equation model are divided into five block consisting of thirty-three equation, which nineteen of them are structural equation and fourteen of them are identity equation. The results of this study showed quite promising number on economic growth of Jakarta in 2018-2022. However inflation also shows increasing number. Therefore this study recommended, for economic growth continous to grow on quality then inflation control should continue to be done with various policies especially distribution policies.

Keywords: *Governance, potention, fiscal.*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menghitung potensi fiskal Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 yang meliputi total Pendapatan Asli Daerah, kapasitas fiskal, total penerimaan, celah fiskal, pertumbuhan ekonomi, total pengeluaran, dan total PDRB DKI Jakarta. Selanjutnya untuk memperoleh dan melengkapi hasil yang optimal maka dalam kajian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah menggunakan model persamaan simultan. Model persamaan simultan yang disusun terbagi menjadi lima blok yang terdiri dari 33 persamaan, dimana 19 persamaan merupakan persamaan struktural dan 14 persamaan adalah persamaan identitas. Hasil dari kajian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta 2018-2022 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Namun dari sisi inflasi angkanya juga terus menunjukkan kenaikan. Untuk itu disarankan agar pertumbuhan ekonomi terus tumbuh berkualitas maka pengendalian inflasi harus terus juga dilakukan dengan berbagai kebijakan terutama kebijakan distribusi.

Kata Kunci: Pemerintahan, potensi, fiskal

PENDAHULUAN

Jakarta mempunyai dua peran yang strategis dalam tata pemerintahan di Indonesia yaitu sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007. Sementara sebagai daerah otonom didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta dituntut untuk memiliki fasilitas infrastruktur dan sarana prasana yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga harus tetap mensejahterakan masyarakatnya bukan hanya infrastruktur yang harus dicukupi tetapi pelayanan kepada masyarakat pun harus tetap diselenggarakan dengan baik.

Sementara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa mengelola seluruh potensi termasuk asset dan keuangan daerah yang ada

dengan baik. Selain itu sebagai daerah otonom, DKI Jakarta dituntut untuk mempunyai pemerintahan yang solid dan mampu menyelenggarakan konsep *Good Governance*.

Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat perekonomian dan keuangan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat regional maupun internasional. Sehingga tidak mengherankan apabila pembangunan perekonomian di DKI Jakarta menjadi barometer bagi pembangunan ekonomi nasional. Kedudukan sebagai pusat perekonomian ini menjadikan DKI Jakarta menjadi magnet bagi banyak orang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di Jakarta.

Konsekuensi dari berbagai peran strategis tersebut maka diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Dengan sumber dana yang ada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu pengelolaan dengan baik dan efektif serta efisien.

Dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dilakukan berbagai langkah kebijakan keuangan di DKI Jakarta. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari berbagai aturan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana yang diatur dalam: (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan berbagai peraturan tersebut, pengelolaan keuangan daerah terdiri atas tiga komponen utama yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

. Provinsi DKI Jakarta perlu mengkaji dan mengidentifikasi sejauh mana kapabilitas keuangan daerah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, sehingga nantinya dapat menjadi acuan dalam menggali sumber alternatif pembiayaan potensial yang dapat menopang proses pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Berbagai indikator diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai

sumber alternatif pembiayaan pembangunan di DKI Jakarta.

Indikator ekonomi bagi daerah sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini karena indikator tersebut digunakan untuk dasar perhitungan dalam penentuan target dan dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian diharapkan pembangunan DKI Jakarta akan lebih terarah dan terstruktur.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dengan telah diidentifikasinya indikator makro maka akan mempermudah dalam mengidentifikasi kemampuan fiskal daerah. Apabila fiskal daerah telah teridentifikasi akan mempermudah dalam penyusunan dan perencanaan anggaran program yang telah disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Artinya visi dan misi Kepala Daerah terpilih akan dapat diketahui lebih awal dengan diketahuinya kemampuan fiskal daerah.

Dalam konteks ini pertanyaan yang mendasar adalah sampai seberapa besar kemampuan fiskal DKI Jakarta periode 2018-2022. Periode ini sangat kritikal karena masa ini merupakan periode tahap ke-4 dari RJPD Daerah Provinsi DKI

Jakarta 2005-2025 dan periode masa kerja Gubernur terpilih.

Sejalan dengan hal tersebut maka kajian ini bertujuan untuk menghitung potensi fiskal Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 yang meliputi total Pendapatan Asli Daerah, kapasitas fiskal, total penerimaan, celah fiskal, pertumbuhan ekonomi, total pengeluaran, dan total PDRB DKI Jakarta.

Pada era otonomi daerah terjadi perubahan struktural dari pengelolaan keuangan daerah yang bersifat sentralistik yang terjadi pada era orde baru menjadi pengelolaan keuangan daerah yang desentralistik pada era otonomi daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk membentuk dan membangun sistem publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik secara lokal yang sedemikian efektif dan efisien dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan untuk mengelola belanja daerah, memungut pajak dan mengelola bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kebijakan otonomi daerah ini dimaksudkan agar dapat mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam hal ini banyak penelitian yang memfokuskan pada otonomi daerah dengan hasil yang sangat bervariasi. Menurut Simanjuntak (2010) kebijakan otonomi daerah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat tetapi tidak semua daerah memperoleh tingkat perbaikan kesejahteraan. Ini artinya pada daerah tertentu kebijakan fiskal tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tidak mempunyai pola yang jelas.

Aktivitas perekonomian sebelum dan sesudah kebijakan fiskal pada era otonomi daerah tidak berpengaruh terhadap sektor-sektor perekonomian daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal juga tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan daerah. Ditambahkan oleh Hidayat (2010) ternyata kebijakan otonomi daerah telah mendegradasi hubungan negara dan masyarakatnya atau telah terjadi bias antar elite

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal di Indonesia masih sering diperdebatkan terutama dilihat dari sisi efektivitas dan efisiensinya jika

dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Kaitan dengan hal tersebut Martinez-Vazquez dan McNab (2001) mengemukakan bahwa beberapa alasan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah di Negara berkembang untuk memilih desentralisasi fiskalnya adalah: (1) dengan adanya desentralisasi fiskal maka diharapkan pengeluaran pemerintah akan lebih efisien. (2) dengan sentralisasi fiskal diakui telah mengalami kegagalan (3) peran pemerintah daerah akan lebih besar dan pemerintah daerah tidak didikte oleh pemerintah pusat.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal didasarkan pada Undang undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini mendeskripsikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini maka urusan fiskal daerah diserahkan kepada daerah otonom atau pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal di Indonesia mempunyai tujuan (1) memberikan

keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi; (2) membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah; (3) melaksanakan fungsi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah; dan (4) membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Penjelasan UU No. 33 tahun 2004). Jadi desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi

fiskal agar sukses adalah bahwa kebijakan ini harus diikuti dengan kewenangan yang jelas dan efektif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakannya harus adil dan transparan terutama dalam hal transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Rodriguez-Pose dan Kroijer, 2009).

Kebijakan fiskal dapat berhasil dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya jika pemerintah daerah komitmen yang direpresentasikan dengan kebijakan yang tepat, kualitas birokrat yang memadai, dan kesadaran masyarakat terhadap pemerintahan yang konsisten. Penelitian Tiebout (1956) dalam Rodriguez-Pose dan Kroijer (2009) menemukan bahwa salah satu keuntungan dari desentralisasi fiskal adalah bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi pemerintah lokal karena pemerintahnya akan lebih mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Tetapi beberapa studi tentang desentralisasi fiskal menemukan bahwa kebijakan desentralisasi banyak yang tidak berhasil terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Bardhan, 2002 dalam Rodriguez-Pose dan Kroijer, 2009). Untuk itu perlu dicermati faktor

apa dalam desentralisasi fiskal yang sangat dominan dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Selanjutnya disebutkan pada pasal 5 UU no 33 Tahun 2004 bahwa pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah; penerimaan pinjaman daerah dana cadangan daerah; dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya penerimaan daerah ini akan sangat menentukan pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain besarnya penerimaan ini menentukan besarnya belanja per sektor.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan merupakan komponen dari penerimaan daerah yang cukup besar. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum

dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Adapun besarnya jumlah dana perimbangan setiap tahun anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pengeluaran pemerintah daerah tidak terlepas dari penerimaan daerah, karena secara teoritis pengeluaran merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah semakin tinggi tingkat pengeluaran daerah. Untuk itu daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan kewenangannya daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Hal inilah yang mendorong pemerintah daerah berusaha meningkatkan potensi pendapatan melalui peningkatan PAD nya agar bisa digunakan untuk belanja daerah dalam kerangka pembangunan daerah.

Investasi dalam Pembangunan Daerah

Investasi dapat diartikan sebagai istilah yang berkaitan dengan [keuangan](#) dan [ekonomi](#). Investasi diartikan sebagai

akumulasi bentuk [aktiva](#) dengan suatu harapan mendapatkan manfaat di masa depan. Dengan demikian, maka secara ekonomi investasi berarti pembelian [kapital atau modal](#) barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi untuk keperluan yang akan datang.

Investasi dalam perekonomian mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam menggerakkan perekonomian. Investasi akan menimbulkan *multiplier effect* bagi perekonomian. Peningkatan investasi tidak hanya akan meningkatkan permintaan agregat tetapi juga akan meningkatkan penawaran agregat melalui meningkatnya stok kapital dan kapasitas produksi. Adanya peningkatan dari sisi stok kapital dan kapasitas produksi dapat mendorong kegiatan produksi dan pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain investasi swasta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Huang, 2009)

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya mempunyai pengertian meningkatnya output barang dan jasa pada wilayah tertentu dan biasanya diukur dengan

pertumbuhan nilai (GDP) *Gross Domestic Product*. Dalam hal ini ada tiga faktor atau komponen utama yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah (Todaro dan Smith, 2006). Pertama adalah berapa besar tingkat akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang dialokasikan dalam perekonomian. Kedua adalah berapa besar laju pertumbuhan penduduk yang akan menambah jumlah angkatan kerja dan yang ketiga adalah tingkat kemajuan teknologi yang akan mempengaruhi secara langsung proses produksi dan akhirnya akan meningkatkan kuantitas produksi.

Hampir sama dengan Todaro dan Smith (2006), teori pertumbuhan model Solow memfokuskan pada empat variabel, yaitu *output* (Y), *capital* (K), *labor* (L) dan *Knowledge* atau *the effectiveness* tenaga kerja (A) (Romer, 2001). Formulasi model pertumbuhan Romer adalah:

$$Y_t = F(K_t, A_t, L_t) \dots\dots\dots t$$

merupakan waktu.

Ini menunjukkan bahwa, faktor kapital sangat dominan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Disamping faktor tersebut, faktor tenaga kerja dan ilmu pengetahuan

yang dimiliki tenaga kerja tersebut juga menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dalam konteks ini, dari sisi permintaan agregat, maka peningkatan output domestik dapat diidentifikasi dengan empat komponen perekonomian, yaitu : (1) pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga (C), (2) pengeluaran investasi oleh dunia bisnis dan rumah tangga (I), (3) belanja pemerintah untuk barang dan jasa (G), dan (4) *nett eksport* (X-M) (Dornbusch, Fischer dan Startz, 2004).

Formula ini diadaptasikan oleh McCann (2006) untuk perekonomian daerah yang dikenal dengan permintaan agregate standar dari *Keynesian* untuk regional yang dapat dideskripsikan sebagai berikut.

$$Y_r = C_r + I_r + G_r + X_r - M_r$$

dimana Y_r : Pendapatan regional

I_r : Investasi regional

C_r : Konsumsi regional

G_r : Pengeluaran pemerintah daerah

X_r : Eskpor daerah

M_r : Impor daerah.

Formula di atas mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah sangat tergantung dari empat komponen di atas. Artinya pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor juga meningkat atau nilai total dari ke empat komponen bernilai positif.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan data series untuk periode tahun 1987-2011. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, SKPD/UKPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Bank Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu data keuangan Provinsi DKI Jakarta, kemiskinan, PDB, inflasi dan lain-lain. Bappeda yaitu data mengenai jumlah pegawai Pemprov DKI Jakarta. Bank Indonesia (BI), yaitu tentang nilai tukar, cadangan devisa, uang beredar, dan suku bunga.

Setelah data dikumpulkan kemudian data ditabulasi sesuai dengan kepentingan kajian. Selanjutnya dilakukan analisis dari data yang telah terkumpul tersebut. Analisis yang digunakan dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai kondisi obyektif di lapangan. Di samping itu, analisis deskriptif juga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang.

Selanjutnya untuk memperoleh dan melengkapi hasil yang optimal maka dalam kajian ini juga digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah menggunakan model persamaan simultan. Model persamaan simultan yang disusun terbagi menjadi lima blok yang terdiri dari 33 persamaan, dimana 19 persamaan merupakan persamaan struktural dan 14 persamaan adalah persamaan identitas. Secara lengkap persamaan-persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Blok Fiskal Penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

1. $PJK_t = a_0 + a_1PDRB_t + a_2SIUP_t + a_3POP_t + a_4D_{9899} + a_5PJK_{t-1} + u_{1t}$
2. $RET_t = b_0 + b_1PDRB_t + b_2POP_t + b_3D_{9899} + b_4RET_{t-1} + u_{2t}$

3. $PAD_t = PJK_t + RET_t + HSLKAYA_t + LPAD_t$
 Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3 > 0$; $b_3, a_4 < 0$; dan $0 < b_4, a_5 < 1$.

Dana Perimbangan

4. $BHP_t = c_0 + c_1 CONCAP_t + c_2 JMKEND_t + c_3 D_{9899} + c_4 BHP_{t-1} + u_{3t}$
 5. $BHBP_t = d_0 + d_1 PDRB_t + d_2 POP_t + d_3 D_{9899} + d_4 BHBP_{t-1} + u_{4t}$
 6. $DAU_t = e_0 + e_1 PDRBCAP_t + e_2 CAPFIS_t + e_3 D_{9899} + e_4 DAU_{t-1} + u_{5t}$
 7. $DBH_t = BHP_t + BHBP_t$
 8. $DANPER_t = DAU_t + DAK_t + DBH_t$
 9. $CAPFIS_t = PAD_t + DBH_t$
 10. $TOTREV_t = PAD_t + DANPER_t + LPEND_t + PEMBY_t$
 Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $c_1, d_1, e_1, c_2, d_2 > 0$; $e_2, c_3, d_3, e_3 < 0$; dan $0 < c_4, d_4, e_4 < 1$.

Celah Fiskal

11. $GAPFIS_t = TOTPENG_t - CAPFIS_t$

Blok Fiskal Pengeluaran Daerah

12. $BLJPEG_t = f_0 + f_1 CAPFIS_t + f_2 JMPEG_t + f_3 D_{9899} + f_4 BLJPEG_{t-1} + u_{6t}$
 13. $BLJBRG_t = g_0 + g_1 CAPFIS_t + g_2 D_{9899} + g_3 BLJBRG_{t-1} + u_{7t}$
 14. $TOTPENG_t = BLJPEG_t + BLJBRG_t + BLJLAIN_t$

Blok PDRB

15. $CON_t = h_0 + h_1 (PDRB_t - PJK_t) + h_2 BLJPEG_t + h_3 POP_t + h_4 D_{9899} + h_5 CON_{t-1} + u_{8t}$
 16. $CONCAP_t = CON_t / POP_t$
 17. $INV_t = i_0 + i_1 PDRB_t + i_2 SBI_t + i_3 TABMAS_t + i_4 D_{9899} + i_5 INV_{t-1} + u_{9t}$
 18. $GOV_t = j_0 + j_1 TOTPENG_t + j_2 D_{98} + u_{10t}$
 19. $EKSPOR_t = k_0 + k_1 PDRB_t + k_2 KURS_t + k_3 D_{9899} + k_4 EKSPOR_{t-1} + u_{11t}$
 20. $IMPOR_t = l_0 + l_1 PDRB_t + l_2 KURS_t + l_3 D_{9899} + u_{12t}$
 21. $PDRB_t = CON_t + INV_t + GOV_t + EKSPOR_t - IMPOR_t$
 22. $PDRBCAP_t = PDRB_t / POP_t$
 23. $RPDRB_t = PDRB_t * 100 / IHK_t$
 24. $GROWTH_t = (RPDRB_t - RPDRB_{t-1}) / RPDRB_{t-1} * 100$

Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $h_1, i_1, j_1, k_1, l_1, h_2, k_2, h_3, i_3 > 0$; $i_2, j_2, l_2, k_3, l_3, h_4, i_4 < 0$; dan $0 < k_4, h_5, i_5 < 1$.

Blok Inflasi dan Nilai Tukar

$$25. \text{IHK}_t = m_0 + m_1 \text{UANGBR}_t + m_2 \text{KURS}_t + m_3 \text{HECBBM}_t + m_4 \text{TDL}_t + m_5 \text{D}_{98} + m_6 \text{IHK}_{t-1} + u_{13t}$$

$$26. \text{INFLASI}_t = (\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}) / \text{IHK}_{t-1} * 100$$

$$27. \text{KURS}_t = n_0 + n_1 \text{CADEV}_t + n_2 \text{INFLASI}_t + n_3 \text{KURS}_{t-1} + u_{14t}$$

$$28. \text{UANGBR}_t = o_0 + o_1 \text{RPDRB}_t + o_2 \text{SBI}_t + o_3 \text{D}_{98} + u_{15t}$$

Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $m_1, o_1, m_2, n_2, m_3, m_4 > 0$; $n_1, o_2, o_3, m_5 < 0$; dan $0 < n_3, m_6 < 1$.

Blok IPM, Kemiskinan, dan Tenaga Kerja

$$29. \text{IPM}_t = p_0 + p_1 \text{MYS}_t + p_2 \text{UMP}_t + u_{16t}$$

$$30. \text{JUMIS}_t = q_0 + q_1 \text{PDRBCAP}_t + q_2 \text{INFLASI}_t + q_3 \text{D}_{9899} + q_4 \text{JUMIS}_{t-1} + u_{17t}$$

$$31. \text{TKMIS}_t = \text{JUMIS}_t / \text{POP}_t * 100$$

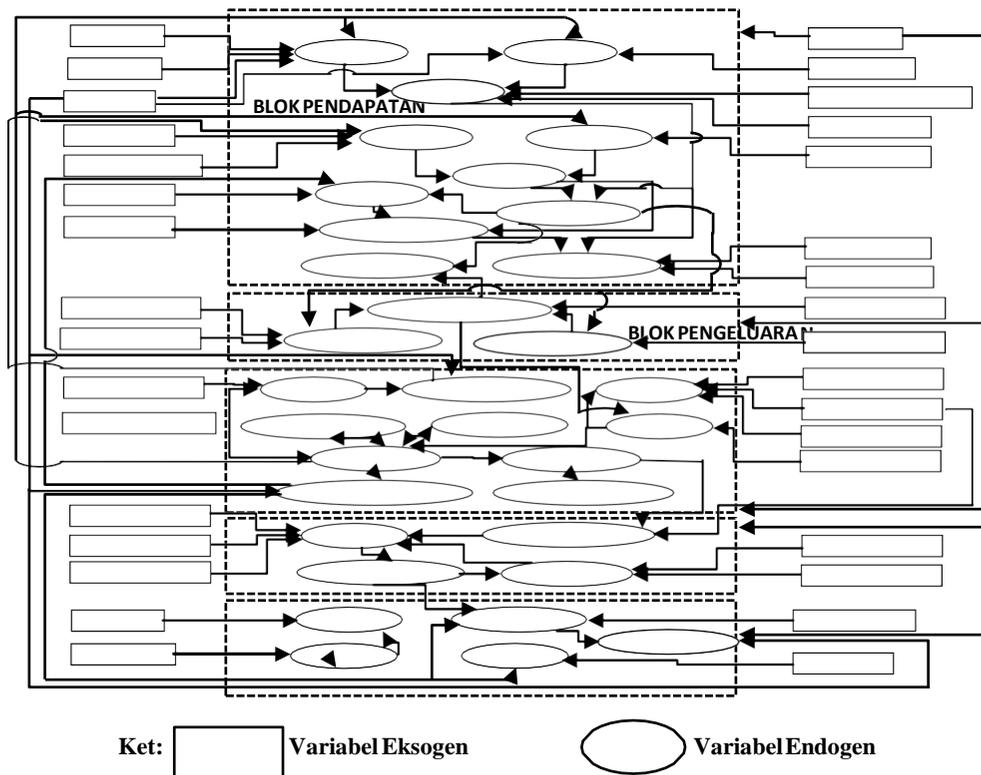
$$32. \text{MYS}_t = r_0 + r_1 \text{PDRBCAP}_t + r_2 \text{D}_{98} + r_3 \text{MYS}_{t-1} + u_{18t}$$

$$33. \text{TK}_t = s_0 + s_1 \text{PDRBCAP}_t + s_2 \text{D}_{9899} + s_3 \text{TK}_{t-1} + u_{19t}$$

Nilai dan tanda estimasi parameter yang diharapkan: $p_1, r_1, s_1, p_2, q_2, q_3 > 0$; $q_1, r_2, s_2 < 0$; dan $0 < r_3, s_3, q_4 < 1$.

Identifikasi Model dan Metode Estimasi

Menurut Koutsoyionis (1978), pendekatan ekonometrika dengan menggunakan sistem persamaan simultan mensyaratkan jumlah persamaan harus sama dengan jumlah variable endogen. Untuk itu diperlukan identifikasi model secara lengkap.



Gambar 1. Diagram Keterkaitan Antar Variabel dalam Model Perekonomian Provinsi DKI Jakarta

Syarat yang harus dipenuhi dalam proses identifikasi adalah *order condition of identification* yaitu bahwa jumlah variabel endogen dan eksogen yang tidak masuk dalam persamaan tetapi masuk dalam persamaan lain dalam sistem persamaan simultan tersebut harus sama dengan atau lebih besar dari jumlah variabel endogen di dalam model dikurangi satu (Gujarati, 1995). Deskripsi tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$(K - M) \geq (G - 1)$$

Keterangan:

K = jumlah variabel dalam model (variabel endogen dan predetermined)

M = jumlah variabel endogen dan eksogen yang terdapat dalam persamaan yang diidentifikasi, dan

G = jumlah persamaan dalam model, yaitu sama dengan jumlah variabel endogen dalam model

Berdasarkan order condition tersebut:

1. Jika $(K - M) > (G - M)$ maka persamaan disebut dikatakan

persamaan teridentifikasi secara berlebihan (*overidentified*).

2. Jika $(K - M) = (G - M)$ maka persamaan dikatakan teridentifikasi secara tepat (*just/exactly identified*).

3. Jika $(K - M) < (G - M)$ maka persamaan dikatakan tidak teridentifikasi (*unidentified*).

Hanya persamaan yang *exactly* dan *overidentified* saja yang parameternya dapat diestimasi berdasarkan kriteria *order condition* tersebut.

Model yang disusun terdiri dari 33 variabel endogen (G) yang terdiri dari 19 persamaan struktural dan 14 persamaan identitas. Jumlah variabel pre-determined adalah 34 variabel yang terdiri dari 19 variabel eksogen dan 15 variabel lag endogenous. Sehingga jumlah variabel yang digunakan dalam model seluruhnya berjumlah 67 variabel (K). Persamaan yang mempunyai jumlah variabel terbanyak adalah persamaan dengan 7 variabel (M) dan persamaan tersebut adalah *overidentified*. Berdasarkan kriteria *order condition*, maka model adalah *overidentified* karena seluruh persamaan struktural yang ada dalam model adalah *over identified*.

Karena model adalah *overidentified* maka *two-stage least squares* (2SLS) merupakan prosedur estimasi yang sangat bermanfaat untuk memperoleh nilai parameter struktural (Pyndyck dan Rubinfeld, 1998). Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan metode estimasi parameter 2SLS.

Kalkulasi dalam penelitian ini dilakukan untuk periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2025 dengan penekanan pada periode 2018-2022. Kondisi ini dilakukan pada stasioner artinya tidak dilakukan kebijakan apapun. Kebijakan dilaksanakan *Business as usual*. Semua perhitungan mulai dari estimasi parameter persamaan struktural, peramalan sampai dengan simulasi skenario kebijakan menggunakan bantuan software *Statistical Analysis System/Estimation Time Series* (SAS/ETS) versi 9.1.

HASIL PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Hasil estimasi dari model yang telah disusun selanjutnya dilakukan pengujian berdasarkan kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrika. Dari hasil pengujian enam

Blok yang diteliti tersebut selanjutnya dibahas secara terinci sebagai berikut.

Berdasarkan kriteria ekonomi, hasil estimasi parameter setiap persamaan struktural dalam model yang disusun adalah sesuai harapan. Hal ini ditunjukkan dengan tanda dan besaran nilai estimasi parameter untuk menggambarkan hubungan antara variabel endogen dengan variabel-variabel penjelasnya.

Dengan mendasarkan pada penjelasan di atas selanjutnya digunakan kriteria statistik untuk menguji persamaan yang telah disusun. Hasil estimasi model juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Nilai koefisien determinasi (R^2) setiap persamaan struktural yang sedang yaitu berkisar antara 0,74 sampai dengan 0,99, kecuali untuk persamaan bagi hasil bukan pajak (BHBP) dan dana alokasi umum (DAU) yang bernilai masing-masing 0,44 dan 0,64. Ini menunjukkan bahwa secara umum variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan antara 74 persen sampai dengan 99 persen keragaman variabel-variabel endogennya.

Secara konsep, nilai statistik uji-F yang dihasilkan untuk menguji apakah variabel-variabel penjelas yang digunakan berpengaruh nyata terhadap variabel

endogennya semuanya bernilai kurang dari 0,01. Ini berarti variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel endogennya.

Hasil statistik uji-t untuk menguji apakah suatu variabel penjelas secara individu berpengaruh terhadap variabel endogennya atau tidak. Dengan tingkat kesalahan (α) sampai dengan 20 persen menunjukkan bahwa sebagian besar variabel penjelas secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel endogennya. Namun terdapat beberapa variabel penjelas dalam model yang secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel endogennya.

Berdasarkan hasil pengujian estimasi parameter tersebut, maka model yang digunakan dalam penelitian ini cukup baik dalam menjelaskan perilaku variabel-variabel ekonomi terhadap keuangan dan perekonomian DKI Jakarta.

Blok Fiskal Penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Hasil pendugaan parameter persamaan penerimaan pajak daerah disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel 1 tersebut terlihat bahwa penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh produk domestik regional bruto (PDRB) dan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998-1999 juga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak di DKI Jakarta.

Parameter dugaan PDRB sebesar 0,008435 dan mempunyai hubungan yang positif. yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sebesar Rp. 1 miliar berpotensi meningkatkan penerimaan pajak bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 8,44 juta. Ini menunjukkan bahwa semakin besar kapasitas ekonomi suatu wilayah akan memperbesar pendapatan yang diterima oleh pemerintah di daerah tersebut. Hal ini diperkuat faktor usaha DKI Jakarta yang sudah menjadi pusat bisnis dan sentral usaha.

Tabel 1
Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Pajak Daerah (PAJAK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|-----------|--------------------|-----------|----------------|
| Intercept | -3233482 | 0,4538 | |
| PDRB | 0,008435 | 0,0054 | PDRB (Juta Rp) |

| | | | |
|--|----------|--------|-----------------------------|
| SIUP | 60,28329 | 0,2893 | Jumlah SIUP (buah) |
| POP | 281,5804 | 0,5818 | Jumlah penduduk (000 orang) |
| D9899 | -865333 | 0,1249 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LPJK | 0,318602 | 0,1937 | Lag PJK |
| Adj-R ² = 0,96936; F-Stat = 146,54; Pr > F = <0,0001; DW = 1,970146 | | | |

Penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta juga dipengaruhi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami karena dalam menentukan target penerimaan pajak pada tahun tertentu biasanya didasari pada penerimaan pajak tahun sebelumnya.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998-1999 juga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak. Ini dikarenakan krisis ekonomi telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi di berbagai sektor, banyak perusahaan tutup, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, dan pendapatan riil masyarakat juga berkurang.

Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, sumber pendapatan lain adalah retribusi daerah. Hasil pendugaan parameter persamaan penerimaan retribusi daerah disajikan pada Tabel 2 Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah di DKI

Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh penerimaan retribusi pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami karena dalam menentukan target penerimaan dari retribusi tahun tertentu biasanya didasari pada penerimaan retribusi tahun sebelumnya.

Tabel 2
Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan
Retribusi Daerah (RET) Provinsi DKI Jakarta
Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|---|--------------------|-----------|-----------------------------|
| Intercept | -210421 | 0,7157 | |
| PDRB | 0,000135 | 0,2226 | PDRB (Juta Rp) |
| POP | 34,81373 | 0,6171 | Jumlah penduduk (000 orang) |
| D9899 | -112939 | 0,0999 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LRET | 0,559504 | 0,0195 | Lag RET |
| Adj-R ² = 0,73902; F-Stat = 17,28; Pr > F = <0,0001; DW = 2,179869 | | | |

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998-1999 juga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan retribusi daerah. Ini dikarenakan krisis ekonomi telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi di berbagai sektor, banyak perusahaan tutup, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, dan pendapatan riil masyarakat juga berkurang.

Dana Perimbangan

Selain berasal dari pendapatan asli daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerima transfer dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana alokasi umum.

Bagi Hasil Pajak

Hasil pendugaan parameter persamaan bagi hasil pajak disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh dana bagi hasil pajak pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena dalam menentukan jumlah dana dari bagi hasil pajak ditentukan kapasitas dan penerimaan pajak dari daerah tersebut. Sementara kapasitas dan penerimaan pajak suatu daerah biasanya tidak akan berubah secara drastis dari waktu ke waktu. Selain itu relatif stabilnya dana bagi hasil pajak dari waktu ke waktu juga untuk menjaga keberlangsungan dan kepastian pembiayaan pembangunan di suatu daerah.

Tabel 3.
Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak (BHP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|---|--------------------|-----------|----------------------------------|
| Intercept | -381605 | 0,3574 | |
| CONCAP | 4,976618 | 0,9488 | Konsumsi per kapita (000 Rp) |
| JMKEND | 0,239029 | 0,2626 | Jumlah kendaraan bermotor (unit) |
| D9899 | -455258 | 0,3564 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LBHP | 0,755667 | 0,0170 | Lag BHP |
| Adj-R ² = 0,96909; F-Stat = 181,26; Pr > F = <0,0001; DW = 1,66268 | | | |

Bagi Hasil Bukan Pajak

Hasil pendugaan parameter persamaan bagi hasil bukan pajak disajikan pada Tabel 4. Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa penerimaan bagi hasil bukan pajak Pemerintah provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh dana bagi hasil bukan pajak pada tahun sebelumnya. Sebagaimana dana bagi hasil pajak, dalam menentukan jumlah dana dari bagi hasil bukan pajak juga ditentukan kapasitas dan penerimaan bukan pajak dari daerah tersebut. Sementara kapasitas dan penerimaan bukan pajak suatu daerah biasanya tidak akan berubah secara drastis dari waktu ke waktu. Selain itu relatif stabilnya dana bagi hasil bukan pajak dari waktu ke waktu juga akan membantu keberlangsungan dan kepastian pembiayaan pembangunan di suatu daerah.

Tabel 4. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|---|--------------------|-----------|-----------------------------|
| Intercept | -14290,2 | 0,9600 | |
| PDRB | 0,000053 | 0,3892 | PDRB (Juta Rp) |
| POP | 4,456294 | 0,8940 | Jumlah penduduk (000 orang) |
| D9899 | 31990,59 | 0,4046 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LBHBP | 0,517443 | 0,0232 | Lag BHBP |
| Adj-R ² = 0,44913; F-Stat = 5,69; Pr > F = 0,0035; DW = 2,174886 | | | |

Dana Alokasi Umum

Hasil pendugaan parameter persamaan dana alokasi umum disajikan pada Tabel 5. Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa penerimaan dana alokasi umum Pemerintah provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh dana alokasi umum tahun sebelumnya. Sebagaimana dana bagi hasil, dalam menentukan jumlah dana alokasi umum juga ditentukan dari kapasitas dan kebutuhan daerah tersebut. Sementara kapasitas dan kebutuhan daerah biasanya tidak akan berubah secara

drastis dari waktu ke waktu. Selain itu relatif stabilnya dana alokasi umum dari waktu ke waktu juga akan membantu keberlangsungan dan kepastian pembiayaan pembangunan di suatu daerah.

Blok Fiskal Pengeluaran Daerah
Struktur pengeluaran pemerintah daerah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam kajian ini blok pengeluaran daerah dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya.

Tabel 5.
Hasil Estimasi Parameter Persamaan Dana Alokasi Umum (DAU)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|---|--------------------|-----------|----------------------------|
| Intercept | 87091,79 | 0,2497 | |
| PDRBCAP | 9,706077 | 0,2799 | PDRB per kapita (000 Rp) |
| CAPFIS | -0,04240 | 0,2376 | Kapasitas fiskal (Juta Rp) |
| D9899 | 72967,17 | 0,6016 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LDAU | 0,751911 | <0,0001 | Lag DAU |
| Adj-R ² = 0,64154; F-Stat = 11,29; Pr > F = <0,0001; DW = 2,153375 | | | |

Belanja Pegawai

Hasil pendugaan parameter persamaan belanja pegawai disajikan pada Tabel 6. Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa pengeluaran belanja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh kapasitas fiskal dan jumlah pegawai yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta serta belanja pegawai tahun sebelumnya.

Parameter dugaan kapasitas fiskal sebesar 0,246922 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan kapasitas keuangan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta berpotensi meningkatkan belanja untuk pegawainya.

Sementara parameter dugaan jumlah pegawai sebesar 134997,2 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti penambahan jumlah pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan belanja untuk menggaji pegawainya. Ini dapat dipahami karena setiap penerimaan pegawai baru tentunya harus diikuti dengan anggaran untuk membayar pegawainya.

Tabel 6. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Belanja Pegawai (BLJPEG) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|--|--------------------|-----------|----------------------------|
| Intercept | -1,03E+07 | 0,1998 | |
| CAPFIS | 0,246922 | 0,0327 | Kapasitas fiskal (Juta Rp) |
| JMPEG | 134997,2 | 0,2038 | Jumlah pegawai (000 orang) |
| D9899 | -183184 | 0,6349 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LBLJPEG | 0,356997 | 0,1649 | Lag BLJPEG |
| Adj-R ² = 0,97954; F-Stat = 276,34; Pr > F = <0,0001; DW = 2,130631 | | | |

Belanja pegawai Pemprov DKI Jakarta juga dipengaruhi belanja pegawai tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena biasanya pemerintah menyesuaikan gaji pegawainya setiap tahun untuk menyesuaikan berbagai kenaikan harga yang biasanya terjadi setiap tahun.

Belanja Barang dan Jasa

Hasil pendugaan parameter persamaan belanja barang dan jasa disajikan pada Tabel 7. Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa pengeluaran barang dan jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh kapasitas fiskal dan belanja barang dan jasa tahun sebelumnya.

Parameter dugaan kapasitas fiskal sebesar 0,064452 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan kapasitas keuangan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta berpotensi meningkatkan belanja untuk barang dan jasa. Selain itu belanja barang dan jasa

Pemprov DKI Jakarta juga dipengaruhi belanja barang dan jasa tahun sebelumnya.

**Tabel 7
 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Belanja Barang dan Jasa (BLJBRG) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011**

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|---|--------------------|-----------|----------------------------|
| Intercept | -44174,2 | 0,6529 | |
| CAPFIS | 0,064452 | 0,0882 | Kapasitas fiskal (Juta Rp) |
| D9899 | -16934,4 | 0,9346 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LBLJBRG | 0,966879 | <,0001 | Lag BLJBRG |
| Adj-R ² = 0,98975; F-Stat = 741,64; Pr > F = <,0001; DW = 2,838368 | | | |

Blok PDRB

Dalam perekonomian produk domestik regional bruto (PDRB) sangat penting karena indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu daerah. Selain itu, PDRB juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, wilayah, atau daerah. Dalam teori makro ekonomi, PDB atau PDRB merupakan persamaan identitas dari konsumsi rumah tangga,

investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor.

Konsumsi Rumah Tangga

Hasil pendugaan parameter persamaan total konsumsi rumah tangga disajikan pada Tabel 8. Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa total konsumsi rumah tangga

dipengaruhi secara nyata oleh pendapatan disposable (*disposable income*) dan konsumsi tahun sebelumnya. Krisis yang terjadi tahun 1998-1999 juga mempengaruhi tingkat konsumsi warga DKI Jakarta.

Tabel 8. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Konsumsi Rumah Tangga (CON) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|---|--------------------|-----------|-----------------------------|
| Intercept | -1,49E+07 | 0,6052 | |
| DISP (PDRB-PJK) | 0,411207 | <0,0001 | Disposable income (Juta Rp) |
| BLJPEG | 0,539246 | 0,7275 | Belanja pegawai (Juta Rp) |
| POP | 849,9434 | 0,8013 | Jumlah Penduduk (000 org) |
| D9899 | -6566103 | 0,1651 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LCON | 0,323081 | 0,0177 | Lag CON |
| Adj-R ² = 0,9991; F-Stat = 5099,78; Pr > F = <,0001; DW = 2,150054 | | | |

Parameter dugaan pendapatan disposable sebesar 0,411207 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan pendapatan disposable berpotensi meningkatkan nilai konsumsinya. Dari nilai parameter tersebut juga dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat DKI Jakarta hanya membelanjakan sekitar 41 persen pendapatan disposablenya untuk konsumsi.

Total konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta juga dipengaruhi nilai konsumsi tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena konsumsi barang dan jasa oleh rumah tangga biasanya tidak akan secara drastis berubah tapi mengikuti perubahan pendapatannya, maka biasanya konsumsi

waktu sebelumnya dapat menjadi acuan untuk memperkirakan nilai konsumsi waktu tertentu.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998-1999 juga berpengaruh terhadap penurunan konsumsi rumah tangga. Ini dikarenakan krisis ekonomi telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi di berbagai sektor, banyak perusahaan tutup, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga pendapatan riil masyarakat juga menurun. Penurunan pendapatan ini akab berpengaruh terhadap konsumsinya.

Investasi

Hasil pendugaan parameter persamaan investasi disajikan pada Tabel 9. Pada Tabel 9 tersebut dapat dilihat bahwa nilai

investasi di DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh PDRB dan besarnya tabungan masyarakat yang disimpan di perbankan.

Parameter dugaan PDRB sebesar 0,253027 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan PDRB berpotensi meningkatkan nilai investasi yang terjadi. Hasil pendugaan parameter tersebut juga mengindikasikan semakin besar kapasitas perekonomian suatu daerah, maka akan mendorong investasi di daerah tersebut.

Salah satu sumber dana untuk investasi adalah dari perbankan, sementara kredit yang diberikan perbankan sangat dipengaruhi banyaknya tabungan masyarakat yang mereka simpan. Parameter dugaan tabungan masyarakat sebesar 0,329855 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti semakin besar dana tabungan masyarakat yang disimpan di perbankan berpotensi meningkatkan nilai investasi yang terjadi.

Tabel 9. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Investasi (INV) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|-----------|--------------------|-----------|-------------------------------|
| Intercept | -9066593 | 0,4546 | |
| PDRB | 0,253027 | 0,0005 | PDRB (Juta Rp) |
| SBI | -57973,5 | 0,9276 | Suku bunga (Persen) |
| TABMAS | 0,329855 | 0,0918 | Tabungan masyarakat (Juta Rp) |
| D9899 | 2922875 | 0,8222 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LINV | 0,128069 | 0,6134 | Lag INV |

Adj-R² = 0,9905; F-Stat = 480,36; Pr > F = <,0001; DW = 1,634142

Pengeluaran Pemerintah

Meskipun nilainya relatif kecil, pengeluaran pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memutar perekonomian di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan turut serta peran pemerintah

sebagai pembuat regulasi dan pengontrol semua aktivitas perekonomian yang terjadi, serta mendistribusikannya kepada semua lapisan masyarakat aspek yang dibutuhkan

Tabel 10. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Pengeluaran Pemerintah (GOV) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| Intercept | -1008995 | 0,7477 | |
| TOTPENG | 2,530814 | <0,0001 | Total pengeluaran (Juta Rp) |
| D98 | 5089540 | 0,6532 | 1998=1, lainnya 0 |

Adj-R² = 0,83365; F-Stat = 58,63; Pr > F = <,0001; DW = 0,335896

Pengeluaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh total belanja yang dianggarkan dalam APBD. Parameter dugaan total belanja (total pengeluaran) sebesar 2,530814 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan belanja pemerintah berpotensi meningkatkan peranan pengeluaran pemerintah dalam perekonomian.

Ekspor Barang dan Jasa

Hasil pendugaan parameter persamaan ekspor disajikan pada Tabel 11. Pada Tabel 11 tersebut dapat dilihat bahwa nilai ekspor Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh PDRB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan nilai ekspor tahun sebelumnya.

Tabel 11
Hasil Estimasi Parameter Persamaan
Ekspor Barang dan Jasa (EKSPOR)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|--|--------------------|-----------|-------------------------|
| Intercept | -696127 | 0,8699 | |
| PDRB | 0,313413 | 0,0006 | PDRB (Juta Rp) |
| KURS | 2962,680 | 0,0043 | Nilai tukar Rp thd US\$ |
| D9899 | -6025624 | 0,4410 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LEKSPOR | 0,385694 | 0,0305 | Lag EKSPOR |
| Adj-R ² = 0,99585; F-Stat = 1380,45; Pr > F = <,0001; DW = 1,741443 | | | |

Parameter dugaan PDRB sebesar 0,313413 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan PDRB

berpotensi meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa. Hasil pendugaan parameter tersebut juga mengindikasikan semakin besar kapasitas perekonomian suatu daerah, maka akan mendorong ekspor daerah tersebut.

Parameter dugaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 0,313413 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa. Ini terjadi karena melemahnya nilai rupiah terhadap dolar menyebabkan barang di dalam negeri lebih murah daripada di luar negeri sehingga produsen cenderung menjual barangnya di luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Selain itu, ekspor tahun sebelumnya juga mempengaruhi nilai ekspor tahun sekarang. Ini dapat disebabkan untuk ekspor beberapa komoditi, terutama barang tambang seperti batu bara dan gas alam, biasanya mempunyai kontrak dalam jangka waktu tertentu.

Impor Barang dan Jasa

Hasil pendugaan parameter persamaan impor disajikan pada Tabel 12. Pada Tabel 12 tersebut dapat dilihat

bahwa nilai impor Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara nyata oleh PDRB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan nilai ekspor tahun sebelumnya.

Parameter dugaan PDRB sebesar 0,56832 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti peningkatan PDRB berpotensi meningkatkan nilai impor barang dan jasa. Hasil pendugaan parameter tersebut juga mengindikasikan semakin besar kapasitas perekonomian suatu daerah, maka akan mendorong impor daerah tersebut. Ini terjadi karena untuk beberapa produk sangat tergantung pada barang-barang impor, sehingga ketika permintaan naik akan meningkatkan impor bahan bakunya.

Tabel 12. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Impor Barang dan Jasa (IMPOR) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|---|--------------------|-----------|-------------------------|
| Intercept | 6943441 | 0,2628 | |
| PDRB | 0,56832 | <,0001 | PDRB (Juta Rp) |
| KURS | -3249,56 | 0,0209 | Nilai tukar Rp thd US\$ |
| D9899 | -5485445 | 0,6238 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| Adj-R ² = 0,99163; F-Stat = 909,14; Pr > F = <,0001; DW = 2,372879 | | | |

Parameter dugaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 3249.56 dan mempunyai hubungan yang negatif, yang berarti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menurunkan nilai impor barang dan jasa. Ini terjadi karena melemahnya nilai rupiah terhadap dolar menyebabkan barang di dalam negeri lebih mahal daripada di luar negeri sehingga produsen cenderung menjual barangnya di dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Blok Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar

Indeks Harga Konsumen

Hasil pendugaan parameter persamaan indeks harga konsumen (IHK) disajikan pada Tabel 13. Pada Tabel 13 tersebut dapat dilihat bahwa IHK dipengaruhi secara nyata oleh uang beredar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga eceran BBM dan IHK tahun sebelumnya. Krisis ekonomi juga berpengaruh terhadap kenaikan IHK.

Tabel 13. Hasil Estimasi Parameter Persamaan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|---|--------------------|-----------|-------------------------------|
| Intercept | 2,060537 | 0,0303 | |
| UANGBR | 9,99E-06 | 0,0563 | Jumlah uang beredar (Juta Rp) |
| KURS | 0,001296 | <0,0001 | Nilai tukar Rp thd US\$ |
| HECBBM | 0,002289 | 0,0002 | Harga eceran BBM (Rp) |
| TDL | 0,003273 | 0,4654 | Tarif dasar listrik (Rp) |
| D98 | 12,29251 | <0,0001 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LIHK | 0,675464 | <0,0001 | Lag IHK |
| Adj-R ² = 0,9987; F-Stat = 2950,33; Pr > F = <,0001; DW = 1,700096 | | | |

Parameter dugaan uang beredar sebesar $9,99 \times 10^{-6}$ dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti meningkatnya jumlah uang beredar memicu kenaikan IHK dan berarti memicu inflasi. Sementara parameter dugaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 0,001296 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat memicu inflasi. Ini dikarenakan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan harga di dalam negeri lebih mahal daripada barang luar negeri atau dengan kata lain terjadi kenaikan harga di dalam negeri.

Parameter dugaan harga eceran BBM sebesar 0,002289 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti kenaikan harga BBM dapat memicu kenaikan IHK dan berarti memicu inflasi. Hal ini dikarenakan BBM merupakan

salah satu sumber energy utama bagi dunia usaha, sehingga kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan biaya produksi. Akibatnya harga produk yang dihasilkan juga cenderung naik untuk menutupi biaya produksi.

Nilai IHK tahun sekarang juga dipengaruhi nilai IHK tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan inflasi merupakan salah satu indikator sehat tidaknya suatu perekonomian, sehingga perkembangannya selalu dipantau oleh pemerintah. Apabila terjadi gejolak harga yang biasanya ditandai dengan inflasi tinggi, pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya seperti operasi pasar.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 juga berpengaruh terhadap naiknya IHK. Pada saat terjadi krisis ekonomi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi yang cukup tajam, sehingga barang-

barang kebutuhan terutama barang impor mengalami kenaikan tajam. Di lain pihak, pendapatan masyarakat turun drastis baik karena kehilangan pekerjaan maupun menurunnya nilai uang yang mereka pegang.

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

Tabel 14 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (KURS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|--|--------------------|-----------|-----------------------------|
| Intercept | 20,30757 | 0,9606 | |
| CADEV | -0,00196 | 0,8613 | Cadangan devisa (Juta US\$) |
| INFLASI | 51,78111 | 0,0011 | Tingkat inflasi (Persen) |
| LKURS | 0,966387 | <0,0001 | Lag KURS |
| Adj-R ² = 0,93795; F-Stat = 116,89; Pr > F = <,0001; DW = 2,258541 | | | |

Parameter dugaan tingkat inflasi sebesar 51,78111 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti terjadinya inflasi dapat memicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Nilai tukar tahun sekarang juga dipengaruhi nilai tukar tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat perkembangannya selalu dipantau oleh pemerintah karena akan terkait dengan daya saing produk

Hasil pendugaan parameter persamaan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disajikan pada Tabel 14. Pada Tabel 14 tersebut dapat dilihat bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi secara nyata oleh tingkat inflasi dan nilai tukar tahun sebelumnya Indonesia terhadap produk dari luar negeri. Sehingga apabila terjadi gejolak nilai tukar biasanya pemerintah untuk menanggulangnya Bank Indonesia akan mengambil beberapa langkah tertentu untuk mengatasi daya saing produk tersebut seperti operasi pasar.

Jumlah Uang Beredar

Hasil pendugaan parameter persamaan uang beredar disajikan pada Tabel 15. Pada Tabel 15 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah uang beredar di DKI Jakarta dipengaruhi PDRB riil Provinsi DKI Jakarta. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga berpengaruh terhadap peredaran uang di DKI Jakarta.

Tabel 15 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Jumlah Uang Beredar (UANGBR) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|-----------|--------------------|-----------|---------------------|
| Intercept | -991728 | <0,0001 | |
| RPDRB | 0,003809 | <0,0001 | PDRB riil (Juta Rp) |
| SBI | -3691,86 | 0,4658 | Tingkat suku |

| | | | |
|---|----------|--------|----------------------|
| | | | bunga (Persen) |
| D98 | 292663,7 | 0,0468 | 1998=1, lainnya 0 |
| Adj-R ² = 0,97658; F-Stat = 320,65; Pr > F = <,0001; DW = 2,376742 | | | |

Parameter dugaan PDRB riil sebesar 0,003809 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti kenaikan PDRB riil dapat memicu kenaikan uang beredar. Ini dikarenakan kenaikan PDRB yang berarti terjadi kenaikan kapasitas ekonomi akan memerlukan uang yang lebih banyak, sehingga uang beredar juga naik.

Krisis ekonomi tahun 1998 juga berpengaruh terhadap kenaikan uang beredar. Hal ini dikarenakan pada saat krisis terjadi penarikan investasi dalam

bentuk tabungan uang secara besar-besaran karena ketakutan kebangkrutan bank tempat mereka menyimpan uang, sehingga uang beredar di masyarakat meningkat tajam.

Blok IPM, Kemiskinan, dan Lama Sekolah

Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pendugaan parameter persamaan indeks pembangunan manusia (IPM) disajikan pada Tabel 16. Pada Tabel 16 tersebut dapat dilihat bahwa IPM di DKI Jakarta dipengaruhi rata-rata lama sekolah.

Tabel 16 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|--|--------------------|-----------|--------------------------------|
| Intercept | 43,99172 | <0,0001 | |
| MYS | 2,710559 | <0,0001 | Rata-rata lama sekolah (Tahun) |
| UMP | 0,006164 | 0,2326 | Upah Minimum Provinsi (000 Rp) |
| Adj-R ² = 0,72956; F-Stat = 32,02; Pr > F = <,0001; DW = 0,166577 | | | |

Parameter dugaan rata-rata lama sekolah sebesar 2,710559 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti kenaikan rata-rata lama bersekolah akan menaikkan IPM. Hal ini dikarenakan rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen penghitungan IPM.

Jumlah Penduduk Miskin

Hasil pendugaan parameter persamaan jumlah penduduk miskin disajikan pada Tabel 17. Pada Tabel 17

tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta dipengaruhi tingkat inflasi dan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya.

Parameter dugaan tingkat inflasi sebesar 0,973057 dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti terjadinya inflasi akan memicu kenaikan jumlah penduduk miskin. Hal ini dikarenakan jika terjadi inflasi maka pendapatan riil masyarakat akan

mengalami penurunan, sehingga garis kemiskinan dapat jatuh menjadi masyarakat yang berada di atas sedikit miskin.

Tabel 17
Hasil Estimasi Parameter Persamaan Jumlah Penduduk Miskin (JUMIS)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|--|--------------------|-----------|--------------------------|
| Intercept | 133,8099 | 0,0174 | |
| PDRBCAP | -0,00011 | 0,6812 | PDRB per kapita (000 Rp) |
| INFLASI | 0,973057 | 0,1789 | Tingkat inflasi (Persen) |
| D9899 | 41,36422 | 0,3512 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LJUMIS | 0,625289 | 0,0003 | Lag JUMIS |
| Adj-R ² = 0,72226; F-Stat = 15,95; Pr > F = <,0001; DW = 1,696705 | | | |

Jumlah penduduk miskin tahun pendapatan masyarakat, selain ada sekarang juga dipengaruhi jumlah kecenderungan orang tua menginginkan penduduk miskin tahun sebelumnya. Hasil anaknya mempunyai pendidikan lebih ini menunjukkan ada kemiskinan baik dibandingkan mereka.

struktural di DKI Jakarta, sehingga Krisis ekonomi yang melanda pada penduduk miskin cenderung mewariskan tahun 1998 juga mempengaruhi kemiskinan tersebut kepada generasi penurunan rata-rata lama bersekolah. Ini berikutnya.

Rata-rata Lama Sekolah

Hasil pendugaan parameter persamaan kebangkrutan, sehingga banyak rata-rata lama sekolah disajikan pada keputusan hubungan kerja baik karena Tabel 18. Pada Tabel 18 tersebut dapat perusahaan tempat mereka bekerja tutup dilihat bahwa rata-rata lama sekolah atau karena alasan efisiensi. Akibatnya penduduk DKI Jakarta dipengaruhi rata-rata banyak anak-anak usia sekolah terpaksa penduduk DKI Jakarta dipengaruhi rata-rata berhenti sekolah untuk membantu orang ini dapat terjadi seiring membaiknya tuanya mencari nafkah.

Tabel 18. **Hasil Estimasi Parameter Persamaan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011**

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|
| Intercept | 0,652145 | 0,2104 | |
| PDRBCAP | 3,54E-06 | 0,4706 | PDRB per kapita (000 Rp) |
| D98 | -0,38531 | 0,1368 | 1998=1, lainnya 0 |

| | | | |
|---|----------|---------|---------|
| LMYS | 0,943757 | <0,0001 | Lag MYS |
| Adj-R ² = 0,98482; F-Stat = 498,23; Pr > F = <,0001; DW = 2,944845 | | | |

Jumlah Tenaga Kerja

Hasil pendugaan parameter persamaan jumlah tenaga kerja disajikan pada Tabel 19. Pada Tabel 19 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja DKI Jakarta dipengaruhi PDRB riil dan jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya. Krisis ekonomi tahun 1998-1999 juga mempengaruhi jumlah orang yang bekerja di DKI Jakarta.

Standar pengukuran dengan parameter dugaan PDRB riil mempunyai hubungan yang positif dengan jumlah te-

naga kerja yang terserap. Dimana ekonomi yang meningkat akan diikuti oleh pertumbuhan tenaga kerja yang pesat. Hal ini mengandung arti bahwa kenaikan PDRB riil akan menaikkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Hal ini dikarenakan kenaikan kapasitas ekonomi akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak penyerapan ini menjadi aspek positif tersendiri bila dilihat dari standar pengukuran parameter dugaan PDRB tersebut.

Tabel 19.

Hasil Estimasi Parameter Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja (TK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1987-2011

| Variabel | Estimasi Parameter | Prob > t | Keterangan |
|---|--------------------|-----------|------------------------|
| Intercept | 100,8531 | 0,4130 | |
| RPDRB | 1,82E-06 | 0,0747 | PDRB riil (Juta Rp) |
| D9899 | -220,787 | 0,1265 | 1998-1999=1, lainnya 0 |
| LTK | 0,728147 | 0,0002 | Lag TK |
| Adj-R ² = 0,96269; F-Stat = 198,81; Pr > F = <,0001; DW = 2,6218 | | | |

Jumlah tenaga kerja yang terserap tahun sekarang juga dipengaruhi jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya. Selain itu, krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1998 - 1999 juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Ini terjadi karena saat krisis ekonomi melanda banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga banyak pemutusan hubungan kerja baik karena

perusahaan tempat mereka bekerja tutup atau karena alasan efisiensi.

PROYEKSI POTENSI FISKAL DKI JAKARTA 2018-2022

Dengan mendasarkan pada perhitungan dan model seperti dijelaskan pada uraian sebelumnya maka hasil proyeksi potensi fiskal DKI Jakarta tahun 2018-2022 dapat diuraikan seperti pada table berikut.

Tabel 20. Nilai Dasar Ramalan Variabel Endogen Tahun 2018 – 2022

| No | Endogen | Keterangan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | PAD | Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rp) | 30,644.2 | 34,211.4 | 38,282.5 | 42,944.9 | 48,301.8 |
| 2. | CAPFIS | Kapasitas Fiskal (Miliar Rp) | 46,384.9 | 51,023.8 | 56,205.3 | 62,024.5 | 68,593.7 |
| 3. | TOTREV | Total Penerimaan (Miliar Rp) | 52,221.6 | 57,237.7 | 62,842.9 | 69,141.3 | 76,255.1 |
| 4. | GAPFIS | Celah Fiskal (Miliar Rp) | 9,909.0 | 10,293.3 | 10,577.7 | 10,733.6 | 10,727.4 |
| 5. | TOIPENG | Total Pengeluaran (Miliar Rp) | 56,293.9 | 61,317.1 | 66,783.0 | 72,758.1 | 79,321.1 |
| 6. | PDRB | Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rp) | 2,136,374.4 | 2,414,563.0 | 2,735,321.5 | 3,106,030.0 | 3,535,437.1 |
| 7. | RPDRB | PDRBRiil (Miliar Rp) | 1,224,468.0 | 1,317,475.1 | 1,418,641.6 | 1,528,601.7 | 1,648,126.5 |
| 8. | GROWTH | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) | 7.49 | 7.60 | 7.68 | 7.75 | 7.82 |
| Sumber: NDAAS | Tingkat Inflasi (Persen) | | 4.91 | 5.04 | 5.21 | 5.38 | 5.57 |

Pemilihan periode 2018-2022 pada analisis ini didasarkan bahwa periode ini merupakan tahapan pembangunan 5 tahunan yang keempat pada RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025. Selain itu periode ini juga merupakan periode Pemerintahan Gubernur terpilih.

Data pada Tabel 20 merupakan hasil proyeksi perekonomian tanpa adanya intervensi kebijakan apapun, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian merupakan kondisi *non-policy* atau kondisi *Business As Usual*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi perekonomian DKI Jakarta tahun 2018-2022 cenderung membaik. Hal ini dilihat dari perkembangan beberapa faktor antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kapasitas Fiskal (CAPFIS), *Total Revenue (TOTREV)*, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH) cenderung menaik.

Pendapatan Asli Daerah cenderung terus meningkat. Pada tahun 2018 PAD DKI Jakarta mencapai Rp. 30,6 triliun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 48.3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai potensi yang cukup baik dalam mengelola pendapatannya. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi sebagai pengelola kebijakan harus mampu mengelola kondisi

si yang kondusif dalam pembangunan ekonomi.

Dilihat dari sisi PDRB juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 PDRB DKI Jakarta mencapai Rp. 2.136,3 triliun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 3.535,4 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta terus *sustainable*. Ini tentunya perlu terus dijaga. Artinya bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus *pro growth* agar perekonomian tetap berkualitas dan mampu membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jakarta.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta periode 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,49 persen sementara pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,82 persen.

Dilihat dari sisi inflasi ternyata inflasi DKI Jakarta terus meningkat. Pada tahun 2018 hanya 4,91 persen namun tahun 2022 inflasi diperkirakan mencapai 5,57 persen. Tentunya hal ini memerlukan pengelolaan yang holistik agar inflasi DKI Jakarta dapat terkelola dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi yang terus

meningkat tidak tergerus dengan inflasi yang meningkat.

Dalam hal Kapasitas Fiskal juga ada kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 2018 Kapasitas Fiskal DKI Jakarta hanya berjumlah Rp. 46,38 triliun sementara proyeksi untuk tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 68,59 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi fiskal DKI Jakarta sangat pro terhadap pertumbuhan.

Potensi Fiskal yang ditunjukkan dengan indikator yang terus menaik diikuti dengan peningkatan dari Total Penerimaan. Total Penerimaan ada kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 2018 Total penerimaan DKI Jakarta berjumlah Rp. 52,22 triliun sementara proyeksi untuk tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 76,25 triliun. Hal ini menunjukkan pengelolaan penerimaan di DKI Jakarta sangat cerdas dalam memanfaatkan momen pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya dalam hal total pengeluaran ada kecenderungan juga terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa total pengeluaran berkorelasi positif. Untuk itu maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyeleksi pengelluaran secara cermat agar kualitas pengeluaran

yang dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikelola dengan baik. Dikhawatirkan jika pengeluaran tidak dikelola dengan baik akan menjadikan nilai manfaat dari pengeluaran tidak mencapai sasaran. Tentu pada akhirnya masyarakat yang akan menerima dampak negatifnya. Pada tahun 2018 Total pengeluaran DKI Jakarta mencapai Rp. 56,29 triliun sementara proyeksi untuk tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 79,32 triliun.

Gap Fiskal di DKI Jakarta untuk periode 2018-2022 juga menunjukkan kinerja yang membaik karena pada tahun 2022 diproyeksikan gapnya menurun jika dibanding pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat. Hal seperti ini harus dikelola dengan komprehensif agar kedepannya kinerja fiskal DKI menjadi lebih baik.

SIMPULAN

Periode 2018-2022 merupakan periode tahap ke 4 RPJPD 2005- 2025 sehingga merupakan tahapan strategis dalam pencapaian pembangunan DKI Jakarta. Selain itu periode ini juga merupakan periode Gubernur terpilih sehingga mudah

untuk dilakukan untuk evaluasi dan merupakan periode RPJMD 2018-2022.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta 2018-2022 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Namun dari sisi inflasi angkanya juga terus menunjukkan kenaikan. Untuk itu disarankan agar pertumbuhan ekonomi terus tumbuh berkualitas maka pengendalian inflasi harus terus juga dilakukan dengan berbagai kebijakan terutama kebijakan distribusi. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih berkualitas.

Kondisi fiskal DKI Jakarta sangat dipengaruhi oleh kinerja perekonomian DKI Jakarta. Jika indikator perekonomian membaik maka kinerja fiskal DKI Jakarta juga membaik. Tentunya akan berlaku sebaliknya jika perekonomian kurang kondusif maka fiskal daerah akan terganggu. Oleh karenanya menjaga *performance* perekonomian Jakarta menjadi hal penting guna meningkatkan kinerja fiskal.

Total penerimaan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus cenderung meningkat tetapi total pengeluaran juga terus meningkat. Untuk menjadikan kemampuan fiskal DKI

Jakarta terus tumbuh dan berkualitas maka hal yang sangat penting dalam hal ini adalah penyusunan kebijakan pengeluaran terutama belanja daerah yang berkualitas. Artinya bahwa belanja daerah harus selektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2006). Penyusunan Data Basis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat. Kerjasama Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- _____. (2008). *Indek Pembangunan Manusia 2006 – 2007*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. (2009). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009*. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Bardhan, P. dan D. Mookherjee. (2005). *Decentralization, Corruption And Government Accountability: An Overview*. For 'Handbook of Economic Corruption' edited by Susan Rose-Ackerman, Edward Elgar. Revised, June.
- Dornbusch, R., S. Fischer and R. Startz. (2004). *Macroeconomics*. Ninth Edition. The McGraw-Hill Company, New York.
- Gujarati, N. D. 1995. *Basic Econometric*. Mc. Graw Hill, New York.
- Hidayat, S. (2010). *Mengurai Peristiwa Meretas Karsa, Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Prisma, 29 (3): 4-22.
- Huang, Y. (2009). *Dynamic Panel Data Evidence on the Finance-Investment Link*. *Journal of Statistics : Advance in Theory and Applications*, November (23): 1-23.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tatasaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- Koutsoyiannis, A. (1997). *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometrics*

- Methods, Second Edition*. Harper and Row Publisher, London.
- Martinez-Vazquez, J. dan M.R.McNab. (2001). Decentralization Fiskal and Economic Growth. International Studies Working paper Series No. 97-7 Andrew Young Schools of Policies Studies. July.
- McCann, P. (2006). Urban and Regional Economics. Oxford University Press, New York.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun (2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun (2000) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun (2010) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.
- Pyndick, S. R. dan L. D. Rubinfeld. (1997). *Econometric Model dan Economic Forecast, Fourth Edition*. McGraw–Hill International Editions, Boston, Massachussets.
- Rodriguez-Pose, A. dan A. Kroijs. (2009). Fiskal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. LEQS Paper No. 12. London School of Economics and Political Science. October.
- Simanjuntak, R. (2010). Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi, Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia. Prisma, 29 (3): 35-57.
- Sitepu, R. K., dan B. M. Sinaga. (2007). Aplikasi Model Ekonometrika. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Todaro, M. dan Stephen, S.C. (2006). Economic Development, Ninth Edition. Addison Wesley Harlow, Boston.
- Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Usman. (2006). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan. Tesis Magister Sains. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Yurianto. (2012). Dampak Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Pada Era Otonomi. Disertasi Doktor, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Ekonomi Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Pernyataan Pengalihan Hak Cipta

Nama Penulis Utama :

.....

Alamat Penulis :

Telp/Fax :

Email :

Nama Penulis :

Judul Artikel :

.....

1. Kami mengirimkan artikel pada Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, kami memastikan bahwa artikel yang kami kirimkan belum pernah dipublikasikan sebelumnya atau sedang dalam proses penelaahan pada jurnal lain atau mengandung materi yang melanggar hak cipta kepada orang atau entitas lain.
2. Kami menyetujui untuk mengalihkan hak cipta kepada Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis sebagai penerbit artikel ini dengan judul artikel yang tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini kami buat, apabila terjadi pelanggaran hak cipta terkait artikel ini, maka kami siap untuk menerima sanksi sesuai prosedur yang berlaku.

Tanggal:.....

Tanda Tangan

.....

(Jika ada lebih dari satu penulis, cukup penulis pertama yang menandatangani)

PETUNJUK PENULISAN

1. PETUNJUK UMUM

- a. Naskah merupakan ringkasan hasil
- b. Naskah sudah ditulis dalam bentuk format word yang sudah jadi dan siap cetak sesuai dengan template yang disediakan. Template tentang tata cara penulisan artikel dapat diunduh di laman
- c. Ukuran file word naskah maksimal 5MB.
- d. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf Time New Roman font 12. Panjang naskah sekitar 15–20 halaman dan diketik 1,5 spasi.
- e. Naskah dalam format pdf diunggah ke laman.....
- f. Seting halaman adalah 2 kolom dengan equal with coloumn dan jarak antar kolom 5 mm, sedangkan Judul, Identitas Penulis, dan Abstract ditulis dalam 1 kolom.
- g. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (margin) adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah dan kiri, sedang kanan adalah 2,0 cm.
- h. Naskah merupakan ringkasan hasil
- i. Naskah sudah ditulis dalam bentuk format word yang sudah jadi dan siap cetak sesuai dengan template yang disediakan. Template tentang tata cara penulisan artikel dapat diunduh di laman
- j. Ukuran file word naskah maksimal 5MB.
- k. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf Time New Roman font 11. Panjang naskah sekitar 15–20 halaman dan diketik 1,5 spasi.
- l. Naskah dalam format pdf diunggah ke laman.....
- m. Seting halaman adalah 2 kolom dengan equal with coloumn dan jarak antar kolom 5 mm, sedangkan Judul, Identitas Penulis, dan Abstract ditulis dalam 1 kolom.
- n. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (margin) adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah dan kiri, sedang kanan adalah 2,0 cm.

2. SISTIMATIKA PENULISAN

- a. Bagian awal : judul, nama penulis, abstraksi.
- b. Bagian utama : berisi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan dan saran (jika ada).
- c. Bagian akhir : ucapan terima kasih (jika ada), keterangan simbol (jika ada), dan daftar pustaka.

3. JUDUL DAN NAMA PENULIS

- a. Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (bold) dengan jenis huruf Times New Roman font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15.
- b. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata "oleh", urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan seterusnya.
- c. Nama perguruan tinggi dan alamat surel (email) semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman font 11.

4. ABSTRACT

- a. Abstract ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, berisi tentang inti permasalahan/latar belakang, cara pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata abstract dicetak tebal (bold).
- b. Jumlah kata dalam abstract tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi.
- c. Jenis huruf abstract adalah Times New Roman font 11, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan, disajikan dalam satu paragraph, dan ditulis tanpa menjorok (indent) pada awal kalimat.
- d. Abstract dilengkapi dengan Keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata Keywords dicetak tebal (bold).

5. ATURAN UMUM PENULISAN NASKAH

Setiap sub judul ditulis dengan huruf Times New Roman font 11 dan dicetak tebal (bold).

- a. Alinea baru ditulis menjorok dengan indent-first line 0,75 cm, antar alinea tidak diberi spasi.
- b. Kata asing ditulis dengan huruf miring.
- c. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari sepuluh harus dieja.
- d. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut.

6. REFERENSI

Penulisan pustaka menggunakan sistem Apa Style. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutakhiran referensi sangat diutamakan. Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (reference manager) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan lain-lain.

A. Buku

[1] Penulis 1, Penulis 2 dst. (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul Buku cetak miring. Edisi, Penerbit. Tempat Publikasi.

Contoh:

O'Brien, J.A. dan J.M. Marakas. (2011). Management Information Systems. Edisi 10. McGraw-Hill. New York-USA.

B. Artikel Jurnal

[2] Penulis 1, Penulis 2 dan seterusnya, (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul artikel. Nama Jurnal Cetak Miring. Vol. Nomor. Rentang Halaman.

Contoh:

Cartlidge, J. (2012). Crossing boundaries: Using fact and fiction in adult learning. The Journal of Artistic and Creative Education. 6 (1): 94-111.

C. Prosiding Seminar/Konferensi

[3] Penulis 1, Penulis 2 dst, (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul artikel. Nama Konferensi. Tanggal, Bulan dan Tahun, Kota, Negara. Halaman.

Contoh:

Michael, R. (2011). Integrating innovation into enterprise architecture management. Proceeding on Tenth International Conference on Wirt-schafts Informatik. 16-18 February (2011), Zurich, Swis. Hal. 776-786.

D. Tesis atau Disertasi

[4] Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul. Skripsi, Tesis, atau Disertasi. Universitas.

Contoh:

Soegandhi. (2009). Aplikasi model kebangkrutan pada perusahaan daerah di Jawa Timur. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Joyonegoro, Surabaya.

E. Sumber Rujukan dari Website

[5] Penulis. Tahun. Judul. Alamat Uniform Resources Locator (URL). Tanggal Diakses.

Contoh:

Ahmed, S. dan A. Zlate. (2013) Capital flows to emerging market economies: A brave new world?. <http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2013/1081/ifdp1081.pdf>. Diakses tanggal 18 Juni 2013.

Petunjuk Penulisan, silahkan download disini

Diterbitkan oleh :
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jl. Raya Bogor KM. 23, No. 99. Flyover Pasar Rebo Jakarta Timur 13830
Telp : 021 - 87796977, Fax : 021 - 87796977
Email : agregat@uhamka.ac.id
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat/index>

